

331.216  
610  
2 01



**ASPEK-ASPEK HUKUM PENERAPAN PRINSIP BAGI HASIL  
DALAM PEMBIAYAAN TERHADAP NASABAH  
OLEH BANK MUAMALAT SEMARANG**

**TESIS**

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Magister Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**SUDARTI**

**NIM. B.4A.099148**

**PEMBIMBING**

**PROF. H. ABDULLAH KELIB, SH.**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
KAJIAN HUKUM EKONOMI DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2003**

**UPT-PUSTAK UNDIP**

**ASPEK-ASPEK HUKUM PENERAPAN PRINSIP BAGI HASIL  
DALAM PEMBIAYAAN TERHADAP NASABAH  
OLEH BANK MUAMALAT SEMARANG**

Disusun Oleh :  
Sudarti  
B 4A 099 148

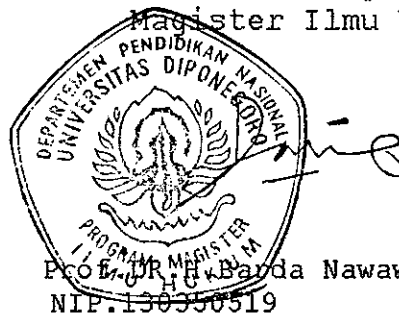
Dipertahankan di depan Dewan Penguji  
pada tanggal 24 Maret 2003

Tesis ini telah diterima  
Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh  
Gelar Magister Ilmu Hukum

Pembimbing

Prof.H.Abdullah Kelib,SH  
NIP. 130 354857

Mengetahui,  
Ketua Program  
Magister Ilmu Hukum



Prof. H. Banda Nawawi Arief, SH.  
NIP.130350519

UPT-PUSTAK-UNDIP
No. Daft: 2004/T/10 H.K.
Gl. : 21 Sept 03

## HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*"..... Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu..." (Al-Baqarah :185)*

*".....Allah tidak hendak menyulitkanmu, tetapi Dia hendak membereskan kamu dan menyiapkan nikmat-Nya bagimu supaya kamu bersyukur. (Al-Ma'idah :6)*

*Serendah-rendahnya Ilmu Pengetahuan  
adalah yang terhenti pada lida  
dan setinggi-tingginya Ilmu Pengetahuan  
adalah yang tampak pada seluruh amal perbuatan.*

*(Sudarti)*

## Persembahan

*Kupersembahkan kepada*

*Suami tercinta, Bra. Subari*

*Anak-anakku, (Indah, Ridho, Ayu)*

*Kedua orang tuaku,*

*Bapak H. Abu Sujak dan Ibu Sukinah (alm)*

*Almarhumterku.*

## ABSTRAK

### ASPEK-ASPEK HUKUM PENERAPAN PRINSIP BAGI HASIL DALAM PEMBIAYAAN TERHADAP NASABAH OLEH BANK MUAMALAT SEMARANG

(Sudarti)

Bank Muamalat Semarang berdiri sejak tahun 1995 merupakan cabang dari Bank Muamalat Indonesia yang didirikan sejak tahun 1992, yang berkantor pusat di Jakarta, keberadaannya dalam sistem perbankan nasional Indonesia sebagai bank umum pertama yang berlandaskan pada prinsip Syariah (Hukum Islam). Bank Muamalat Indonesia mendapatkan *legalitas institusional* sejalan dengan diberlakukannya UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan (Pasal 6 huruf m) yang selanjutnya diikuti dengan ditetapkannya ketentuan pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah No.72 tahun 1992, kemudian dilanjutkan dengan diberlakukannya UU No.10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No.7 tahun 1992. Dengan berlakunya kedua UU tersebut, perbankan nasional Indonesia menerapkan sistem perbankan berganda (*dual banking system*), yaitu sistem perbankan konvensional dan syariah.

Dalam penerapan pembiayaan terhadap nasabah Bank Muamalat Semarang berdasar pada prinsip bagi hasil yaitu *al-mudharabah* dan *al-musyarakah*. Aspek-aspek hukum dari perjanjian *mudharabah* maupun *musyarakah* timbul akibat adanya hubungan hukum (kerjasama) antara bank (*shahibul maal*) dengan nasabah pengelola dana (*mudharib*) di mana masing-masing pihak sama-sama memperoleh pembagian hasil keuntungan dan sama-sama menanggung risiko kerugian. Jika dibandingkan dengan perjanjian kredit pada bank konvensional, pembiayaan *mudharabah* maupun *musyarakah* memiliki perbedaan yang bersifat substantial dari konstruksi hukumnya dan kontra prestasi. Dalam klausula-klausulanya mencerminkan nilai-nilai keadilan, tidak terdapat klausula yang merugikan mitra usaha.

## **ABSTRACT**

### **THE LAW ASPECT OF PROFIT SHARING APPLICATION IN FINANCING TOWARDS CUSTOMER OF BANK MUAMALAT SEMARANG**

(Sudarti)

Bank Muamalat Semarang has been established since 1995 as a branch of Bank Muamalat Indonesia. Bank Muamalat Indonesia has been existed since 1992 which headquarters are in Jakarta. It appears in Indonesia national banking system as the first bank based on Syariah (Islamic Law) principle. Bank Muamalat Indonesia received its institutional legality accordance to Act no.7 of Banking (letter m of chapter 6) and its implementation regulation in Government Regulation no. 72/ 1992, followed by Act no. 10/ 1998 as the substitute of Act No. 7/ 1992. By committed to both of act, Indonesia national banking applied dual banking system, which are, conventional and syariah banking system.

In financing application towards customer, Bank Muamalat Semarang based on profit sharing principle of al-mudharabah and al-musyarakah. The law aspects of both of mudharabah and musyarakah agreement results from law corresponden (partnership) between bank (shaibul maal) and customer (mudharib) where each of them received profit and loss sharing. Compared to credit agreement of conventional bank, both of mudharabah and musyarakah financing have a substantial differ in their law construction and contra achievement. Its clauses reflect on values of justice, that is, none of its clauses inflicts their bussiness partner.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadlirat Allah Subhanaahu Wata'ala, yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan Tesis ini yang berjudul : "ASPEK-ASPEK HUKUM PENERAPAN PRINSIP BAGI HASIL DALAM PEMBIAYAAN TERHADAP NASABAH OLEH BANK MUAMALAT SEMARANG".

Penulisan tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi pada Program Magister Ilmu Hukum Kajian Hukum Ekonomi dan Teknologi Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa penulisan ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan pengetahuan, waktu dan terbatasnya literatur. Oleh karena itu semua saran dan kritik yang sifatnya membangun akan di terima dengan segala kerendahan hati.

Penulis menyadari bahwa tesis ini dapat terselesaikan karena bantuan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Untuk itu perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah sudi memberikan saran, nasehat, kritikan dan

bantuan, baik yang bersifat moril maupun materiil, sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan, terutama, kepada :

1. Rektor Universitas Diponegoro Semarang, Bapak Prof.Ir.H.Eko Budihardjo,MSc.
2. Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang,Bapak Prof.Dr.dr.Soeharyo Hadisaputro.
3. Prof. Dr. H.Barda Nawawi Arief, SH., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, yang telah mengesahkan penulisan tesis ini.
4. Sekretaris Program, Bapak Budiharto, SH.MS dan Bapak Ibu staf Administrasi yang banyak menunjang dan membantu kelancaran dalam menempuh program ini.
5. Para Guru Besar dan staf pengajar Program Magister Ilmu Hukum UNDIP yang secara profesional dan arif telah memberikan ilmu selama penulis mengikuti perkuliahan.
6. Prof.H.Abdullah Kelib,SH.,selaku pembimbing penulis, yang telah banyak memberikan masukan, dan nasehat, serta bimbingan, hingga selesainya tesis ini.

7. Pimpinan Bank Muamalat Indonesia Jakarta maupun cabang Semarang, beserta staf yang telah bersedia diwawancarai oleh penulis ketika melakukan penelitian, khususnya kepada Bapak Marsudi dan Baharudin, SH.
8. Rekan-rekan Angkatan XIX, yang menjadi mitra diskusi dalam mengikuti perkuliahan di Program Magister Ilmu Hukum khususnya Kajian Hukum Ekonomi dan Teknologi UNDIP.
9. Anak-anak tercinta, Indah Yuliasari, ST, Ridho Gusti Hendrawan, dan Ayu Nita Indraswari, yang dengan setia dan tulus mendorong serta memberikan semangat, untuk segera menyelesaikan studi ini.
10. Kedua orang tua penulis, Ibu Sakinah (alm) dan Bapak H. Abu Sujak, ucapan terima kasih dari lubuk hati paling dalam ananda sampaikan, atas doa dan bantuan yang diberikan kepada ananda, khusus untuk ibunda (alm) teriring doa untukmu semoga mendapatkan tempat disisi Allah SWT.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam melakukan penelitian sejak awal sampai penulisan tesis ini selesai.



Semoga segala amal dan kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis mendapat balasan dari Allah SWT.

Semarang, April 2003

Penulis

Sudarti

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Gambar 1. Skema Perjanjian Pembiayaan Al-Madharabah .....	98
2. Gambar 2. Skema Perjanjian Pembiayaan Al-Musyarakah .....	100
3. Gambar 3. Konsep dan Sistem Perbankan Konvensional .....	121
4. Gambar 4. Konsep dan Sistem Perbankan Syariah .....	122
5. Gambar 5. Konsep Produk Perbankan Syariah .....	123
6. Gambar 6. Struktur Organisasi BMI Semarang .....	123

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAM MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
ABSTRAKSI .....	iv
ABSTRACT .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR ISI .....	xi
BAB I     PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Kontribusi Penelitian .....	12
E. Metode Penelitian .....	13
1. Metode Pendekatan .....	13
2. Spesifikasi Penelitian .....	14
3. Lokasi Penelitian .....	14
4. Bahan Penelitian.....	15
5. Teknik Pengumpulan Data.....	17
6. Teknik Pengolahan dan Analisa Data .....	19
7. Teknik Pengecekan Validitas Data.....	20
8. Teknik Penyajian Data .....	21
F. Kerangka Pemikiran .....	21
G. Sistematika Penulisan.....	33
BAB II.   TINJAUAN PUSTAKA .....	35
A. Tinjauan terhadap Perbankan .....	35
Konvensional.....	

1. Ruang Lingkup Perbankan .....	35
1.1. Pengertian bank.....	35
1.2. Aspek Hukum Perbankan.....	38
1.3. Kegiatan Usaha .....	41
1.4. Bentuk hukum bank .....	45
2. Jenis-jenis Bank .....	46
2.1. Dilihat dari Bidang Usaha.....	47
2.2. Dilihat dari Kepemilikannya .....	48
2.3. Dilihat dari Fungsi dan tujuan usahanya .....	49
2.4. Dilihat dari Operasionalnya.....	51
3. Sistem Bunga dalam Bank Konvensional	51
3.1. Pengertian bunga .....	51
3.2. Hukum Bunga Bank .....	53
3.3. Alasan Pembayar Pengambilan Bunga .....	59
B. TINJAUAN TERHADAP BANK SYARIAH	60
1. Ruang Lingkup Bank syariah	61
1.1. Pengertian Bank Syariah	61
1.2. Pengaturan Hukum Positif Bank Syariah .....	62
1.3. Landasan Hukum Bank Syariah.....	63
1.4. Kegiatan Usaha Bank Syariah .....	64
1.5. Prinsip-prinsip Dalam Kegiatan Bank Syariah .....	69
2. Prinsip Bagi Hasil Dalam Kegiatan Bank Syariah.....	78
2.1. Pengertian Bagi Hasil.....	79
2.2. Pengaturan Hukum positif Prinsip Bagi Hasil .....	79
2.3. Prinsip -Prinsip Bagi Hasil .....	81

3. Sistem Pembiayaan .....	92
C. HUBUNGAN HUKUM ANTARA BANK DENGAN NASABAH DALAM PENERAPAN PEMBIAYAAN BERDASAR PRINSIP BAGI HASIL .....	94
1. Hubungan Hukum antara Bank dengan Nasabah berdasar Perjanjian Al-Mudharabah .....	96
2. Hubungan Hukum antara Bank dengan Nasabah berdasar Perjanjian Al-Musyarakah.....	99
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Profil BMI (Bank Muamalat Indonesia) Semarang .....	105
1. Sejarah .....	105
2. Kegiatan Operasional BMI Semarang ..	105
3. Struktur Organisasi BMI Semarang....	105
B. Penerapan Prinsip Bagi Hasil Dalam Pembiayaan terhadap Nasabah BMI .....	106
1. Pembiayaan Al-Mudharabah .....	124
2. Pembiayaan Al- Musyarakah .....	124
C. Aspek-aspek Hukum Penerapan Prinsip Bagi Hasil dalam Pembiayaan .....	124
1. Persamaan antara perjanjian kredit Dengan perjanjian pembiayaan al-Mudharabah dan Al-musyarakah.....	146
2. Perbedaan Konstruksi Hukum antara Perjanjian Kredit dengan Perjanjian Pembiayaan al-mudharabah dan al-Musyarakah .....	153
	154

D. Hambatan-hambatan yang dihadapi BMI	163
Semarang Dalam Menerapkan Prinsip Bagi Hasil .....	
1.Hambatan-hambatan .....	163
2.Usaha Mengatasi .....	167
BAB IV PENUTUP	169
1.Kesimpulan .....	169
2.Saran .....	170
Daftar Pustaka	172
Lampiran	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Indonesia pada umumnya tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan dan perkembangan pelaku-pelaku ekonomi yang melakukan kegiatan ekonomi melalui jasa *financial* perbankan. Bank merupakan lembaga keuangan yang mempunyai peranan yang strategis di mana kegiatan utama dari perbankan adalah menyerap dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat.

Isue yang berkembang dewasa ini, bahwa perbankan nasional Indonesia mengalami suatu "depresi" yang sangat berat untuk dipulihkan kembali sebagai sebuah lembaga yang sehat di dalam menunjang perekonomian suatu bangsa. Pemulihan sistem perbankan terkait satu dengan lainnya sangat penting untuk menggerakkan kembali perekonomian nasional, karena bank berfungsi tidak hanya sebagai perantara pihak-pihak *surplus of funds* (kelebihan dana) dan pihak *lack of funds* (memerlukan dana), namun juga berfungsi sebagai *agent*

of development<sup>1</sup> yaitu sebagai alat pemerintah dalam membangun perekonomian bangsa melalui pembiayaan semua jenis usaha pembangunan yaitu berfungsi sebagai *financial intermediary* (perantara keuangan) yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara. Hal tersebut ditegaskan kembali di dalam Arah Kebijakan Ekonomi Makro dalam GBHN 1999-2004 , bahwa :

Perekonomian nasional dituntut mampu memantapkan ketahanan ekonomi yang dapat mencegah terulangnya krisis dan mengamankan proses pemulihan ekonomi di mana langkah-langkah yang perlu ditempuh antara lain memulihkan fungsi intermediasi perbankan.

Sistem perbankan memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi yang menunjang perekonomian nasional. Untuk meningkatkan peran dan fungsi bank di dalam memulihkan perekonomian nasional, pengaturan perbankan terus disempurnakan, dan melakukan berbagai upaya dalam rangka optimalisasi sistem perbankan.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan fungsi sistem perbankan adalah pengembangan sistem perbankan Syariah. Disamping itu di

---

<sup>1</sup> Muhammad Djurnhana, *Hukum Perbankan Indonesia*, (Citra Aditya Bakti, Bandung: 2000), hal. 86



sisi lain, masyarakat muslim Indonesia menginginkan suatu konsep perbankan sesuai dengan kebutuhan dan syariat Islam. Konsep penggunaan uang dalam Islam adalah untuk tujuan produktivitas bukan sebagai komoditas apalagi untuk spekulasi. Investasi dana masyarakat pada bank disalurkan kembali secara bagi hasil dan berbagi risiko dengan menciptakan keharmonisan bagi bank dan nasabah.

Konsep perbankan syariah apabila dipandang dari ekonomi makro, maka dapat dikemukakan bahwa dalam ekonomi Islam pemilik mutlak terhadap segala sesuatu yang ada di bumi termasuk harta benda adalah Allah SWT. Kepemilikan oleh manusia hanya bersifat relatif sebatas untuk melaksanakan amanah mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuan-Nya. Firman Allah SWT:

*"Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka, orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya mendapatkan pahala yang besar". (Al-Hadiid:7)*

Islam mendorong penganutnya untuk menikmati karunia yang telah diberikan oleh Allah. Karunia tersebut harus didayagunakan untuk meningkatkan pertumbuhan, baik materi maupun non materi. Islam juga

mendorong penganutnya berjuang untuk mendapatkan materi atau harta dengan berbagai cara, asalkan mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan.<sup>2</sup>

Firman Allah SWT :

*Hai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu". (Al-Baqarah:168)*

Salah satu hadits Rasulullah saw, menegaskan,

*"Kaum muslimin (dalam kebebasan) sesuai dengan syarat dan kesepakatan mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram". (at-Tarmidzi, Kitab al-Ahkam No.1272)*

Penyeimbangan aspek dunia dan akhirat sebagaimana tersirat dalam firman Allah SWT maupun Hadits Rasulullah saw, seperti tersebut di atas merupakan karakteristik unik sistem ekonomi Islam, sehingga dalam sistem perbankan di Indonesia tidak hanya berlaku sistem perbankan konvensional, melainkan juga mengembangkan sistem perbankan syariah yaitu sistem perbankan dalam kegiatannya mendasarkan pada syariat.

Keberadaan bank Muamalat Indonesia dalam sistem perbankan Indonesia sebenarnya telah dikembangkan sejak tahun 1992 sebagai bank umum pertama yang berlandaskan

---

<sup>2</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, (Gema Insani: Jakarta), hal.11

pada prinsip syariah (hukum) Islam, sejalan dengan diberlakukannya Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan (Pasal 6 huruf m) yang selanjutnya diikuti dengan ditetapkannya ketentuan pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah No.72 tahun 1992 yang diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemenuhan kebutuhan jasa perbankan masyarakat.

Dengan diberlakukannya Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No.7 Tahun 1992 memberikan landasan hukum bagi bank Syariah baik dari segi kelembagaan maupun operasionalnya. Selanjutnya, dengan diberlakukannya Undang-undang No. 23 Tahun 1999, Bank Indonesia dapat menerapkan kebijakan moneter berdasarkan prinsip-prinsip syariah, sehingga Bank Indonesia dapat mempengaruhi likuiditas perekonomian melalui bank-bank syariah.

Dengan berlakunya kedua Undang-undang tersebut, perbankan nasional Indonesia mulai menerapkan sistem perbankan berganda atau *dual banking system*, yaitu adanya sistem perbankan konvensional dan syariah yang berlangsung dalam suatu negara. Penerapan *dual banking system* harus berlandaskan pada karakteristik dari masing-masing sistem, sehingga Bank Indonesia sebagai

bank sentral dalam menetapkan kebijakan harus tetap dalam kerangka kedua undang-undang tersebut dan mengacu kepada prinsip-prinsip syariah yang berbeda dengan bank konvensional.

Perbedaan keduanya adalah Bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dengan sistem bunga yang diyakini umat Islam sebagai *riba* yang diharamkan memiliki sifat *inflatoir* dan cenderung *diskriminatif*,<sup>3</sup>. Sehubungan dengan bunga bank Anwar Nasution mengemukakan beberapa pengaruh dengan adanya bunga bank adalah sebagai berikut :<sup>4</sup>

Bahwa tingkat suku bunga yang mahal dewasa ini telah menimbulkan kesulitan bagi dunia usaha, neraca pembayaran luar negeri maupun bagi pengendalian moneter dan kurs devisa, bahkan menurutnya tingkat suku bunga yang semakin mahal sejak tahun 1990 telah meningkatkan biaya operasi, sehingga menimbulkan *high cost* bagi ekonomi Indonesia.

Sedangkan bank umum yang mendasarkan pada prinsip syariah lebih mengedepankan prinsip keadilan dan kebersamaan dalam berusaha, baik dalam memperoleh keuntungan maupun dalam menghadapi risiko. Bank Syariah

---

<sup>3</sup> Muhaimin, *Eksistensi Bank Syari'ah dan Pengembangannya Di Indonesia*, Tesis Undip, 2001, hal.8

<sup>4</sup> Neni Sri Imaniyati, *Sistem dan Prospek Perjanjian Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil Pada Bank Muamalat Indonesia*, Tesis Undip, 1997, hal. 4

telah terbukti sangat resisten (tahan) terhadap krisis moneter sebagaimana diungkapkan Soebardjo Joyo Sumantoro yang menyatakan bahwa:<sup>5</sup>

Upaya restrukturisasi perbankan yang berlangsung sejak Juli tahun 1998 hingga Desember 2001 ini, adalah upaya mengatasi dampak krisis dan peningkatan ketahanan sistem perbankan masa depan. Lebih lanjut Soebardjo mengatakan bahwa kalau Indonesia memiliki 40 % saja perbankan yang beroperasi secara Syariah tidak akan terkena krisis, apalagi semuanya beroperasi sesuai dengan Syariah Islam.

Bank Syariah memiliki prospek yang sangat cerah di masa yang akan datang, tujuan pengembangan sistem perbankan Syariah adalah terutama untuk memenuhi :<sup>6</sup>

1. Kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak dapat menerima konsep bunga. Dengan diterapkannya sistem perbankan Syariah yang berdampingan dengan sistem perbankan konvensional, mobilisasi dana masyarakat dapat dilakukan secara lebih luas terutama dari segmen yang selama ini belum dapat tersentuh oleh sistem perbankan konvensional.

---

<sup>5</sup> Soebardjo Joyosumantoro, (Mantan Deputy Gubernur Bank Indonesia yang sekarang menjadi Direktur Eksekutif Pusat Riset dan Pengembangan Bank Sentral Asia Tenggara SEACEN yang berkedudukan di Kuala Lumpur, Malaysia) dalam Majalah SAKSI No.20, Tahun II tanggal 31-13 Juni tahun 2000, hal. 9-21.

<sup>6</sup> Cecep K. Halim, *Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia*, Seminar Nasional perbankan Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Negeri Mataram, 21 September 2000, hal.3

2. Peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan. Dalam prinsip ini konsep yang diterapkan adalah hubungan kerjasama investasi yang harmonis (*mutual investor relationship*). Sementara dalam bank konvensional konsep yang diterapkan adalah hubungan debitur dan kreditur yang antagonis (*debtor to creditor relationship*).
3. Kebutuhan akan produk dan jasa perbankan yang memiliki beberapa keunggulan komparatif berupa peniadaan pembebanan bunga yang berkesinambungan, membatasi kegiatan spekulasi yang tidak produktif (*unproductive speculation*), pembiayaan ditujukan kepada usaha-usaha yang lebih memperhatikan unsur moral.

Bank umum yang mendasarkan prinsip syariah merupakan suatu aturan perjanjian berdasar hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain :

1. Pembiayaan berdasar penyertaan modal (*musyarakah*);
2. Pembiayaan berdasar prinsip bagi hasil (*mudharabah*);

3. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*);
4. Pembiayaan barang modal berdasar prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*);
5. Peminjaman kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah waqtina*).

Dalam proses penghimpunan dana maupun penyaluran dana Bank Muamalat Semarang menerapkan prinsip bagi hasil. Penerapan prinsip bagi hasil dalam pembiayaan terhadap nasabah oleh Bank Muamalat mempunyai legalitas institusional dengan diberlakukannya PP No.72 tahun 1992 tentang Bank berdasar prinsip bagi hasil.

Di dalam prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*) secara otomatis risiko kesulitan usaha ditanggung bersama oleh pemilik dana dan pengguna dana. Prinsip bagi hasil yang diterapkan bank Muamalat Semarang mengandung beberapa aspek hukum yang perlu dikaji untuk menyelesaikan permasalahan yang mungkin timbul. Oleh karena itu penulis tertarik meneliti lebih lanjut dengan mengangkat judul "Aspek-aspek Hukum Penerapan Prinsip Bagi Hasil Dalam Pembiayaan Terhadap Nasabah oleh Bank Muamalat Semarang".

## **B. Perumusan Masalah**

Berlakunya hukum diharapkan dapat berfungsi sesuai dengan perubahan yang terjadi didalam masyarakat di mana fungsi hukum sebagai *a tool of social control*, sekaligus sebagai *a tool of social engineering* maupun fungsinya sebagai pengintegrasi terhadap kepentingan yang berbeda menjadi prinsip yang mendasar apabila masyarakat menghendaki adanya perubahan di dalam suatu sistem hukum, maka fungsi hukum haruslah menempatkan kepada kepentingan masyarakat untuk menjamin stabilitas dan kepastian hukum.

Dengan berlakunya sistem hukum perbankan yang berdasarkan pada prinsip Syariah (hukum Islam) di mana prinsip bagi hasil dimungkinkan untuk dilakukan di Indonesia setelah diberlakukannya UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Pasal 6 huruf m) yang selanjutnya diikuti dengan ditetapkannya ketentuan pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 diharapkan akan dapat memberikan kontribusi, menciptakan kehati-hatian dan keharmonisan bagi bank dan nasabah serta dapat berfungsi lebih efektif dan efisien.

Sistem perbankan yang berdasarkan pada Syariah (hukum) Islam dengan penerapan prinsip bagi hasil dalam



pembiayaan terhadap nasabah baik melalui penghimpunan dana maupun penyaluran dana, dikaji dari aspek hukum privat merupakan hubungan hukum antara bank dengan nasabah yang didahului adanya suatu kontrak (*contractual agreement*) atau akad antara investor pemilik dana atau *shahibul maal* dengan investor pengelola dana atau *mudharib* yang bekerjasama untuk melakukan usaha yang produktif dan berbagi keuntungan secara adil (*mutual investment relationship*).

Di dalam penerapan prinsip bagi hasil dalam pembiayaan terhadap nasabah oleh bank Muamalat akan menimbulkan aspek-aspek hukum dalam hal *mudharib* atau pengelola dana wanprestasi atau di dalam melaksanakan usahanya mengalami kepailitan yang menyebabkan kerugian.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan prinsip bagi hasil dalam pembiayaan terhadap nasabah oleh Bank Muamalat Semarang ?
2. Aspek-aspek hukum apa yang terkait dengan penerapan prinsip bagi hasil dalam pembiayaan terhadap nasabah oleh Bank Muamalat Semarang ?

3. Hambatan-hambatan apa yang dihadapi Bank Muamalat Semarang dalam menerapkan prinsip bagi hasil dalam pembiayaan terhadap nasabah dan usaha mengatasinya?

#### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan dilakukannya penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui dan mengkaji penerapan prinsip bagi hasil pembiayaan terhadap nasabah oleh Bank Muamalat Semarang.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji aspek-aspek hukum yang terkait dengan penerapan prinsip bagi hasil dalam pembiayaan terhadap nasabah.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan hambatan-hambatan yang dihadapi Bank Muamalat Semarang dalam penerapan prinsip bagi hasil dalam pembiayaan terhadap nasabah dan usaha mengatasinya.

#### **D. Kontribusi Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini dengan tujuan yang ingin dicapai, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi sebagai berikut :

## 1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan substansi disiplin di bidang Ilmu Hukum, khususnya Hukum Perbankan berdasarkan Syariah.

## 2. Segi Praktis

Diharapkan dapat memberi manfaat bagi *policy maker* dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan Perbankan, khususnya Bank yang mendasarkan pada prinsip Syariah.

## E. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang didukung yuridis empiris.<sup>7</sup> Pendekatan penelitian hukum normatif dilakukan dengan penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal<sup>8</sup> sejarah hukum dan perbandingan hukum.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Menurut Sunaryati Hartono, dalam penulisan tesis penggunaan pendekatan penelitian hukum empiris disamping penelitian hukum normatif akan memberikan bobot lebih pada penelitian yang bersangkutan, dalam CFE Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke -21* (Bandung, 1994), hal.142.

<sup>8</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian dan Yurimetri*, (Jakarta, 1994), hal.12

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta, 1985), hal. 14-15.

Sedangkan pendekatan hukum empiris, metode yang digunakan adalah kualitatif-induktif-fenomenologis. Tujuan memilih penelitian dengan metode tersebut adalah untuk menjelaskan proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat, dalam hal ini yang terkait dengan permasalahan yaitu penerapan prinsip bagi hasil dalam pembiayaan terhadap nasabah pada Bank Syariah.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yang diskriptif analitis. Hal ini dimaksudkan untuk menggambarkan dan menemukan bahan-bahan mengenai sistem perbankan yang mendasarkan pada syariah dengan prinsip bagi hasil. Dengan gambaran diskriptif tersebut dilakukan analisis untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan aspek hukum penerapan prinsip bagi hasil dalam pembiayaan terhadap nasabah pada Bank Muamalat.

## 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Bank Muamalat Cabang Semarang. Dipilihnya Bank Muamalat Cabang Semarang yang merupakan Ibukota Propinsi Jawa Tengah dikarenakan Bank Muamalat ini yang masih relatif baru

eksistensinya, apalagi masyarakat Semarang dikenal sebagai masyarakat yang heterogen, beragam budaya, suku, agama maupun kepercayaan, sehingga sudah barang tentu memiliki problematika yang perlu dikaji secara ilmiah baik dari aspek hukum maupun ekonomi yang membutuhkan pemahaman bagi perkembangan sebuah Bank yang mendasarkan pada Syariah dengan prinsip bagi hasil.

#### 4. Bahan Penelitian

Sebagai dasar pembahasan dalam penelitian ini digunakan bahan penelitian yang bersumber pada data penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Penelitian kepustakaan antara lain terdiri dari:

a. Bahan hukum primer, yaitu :

1. Pembukaan dan Pasal-pasal Undang-undang Dasar 1945;
2. Ketetapan-ketetapan MPR:  
Ketetapan MPR No.IV/MPR/1999 tentang GBHN
3. Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan :
  - Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

- UU No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7/1992
- UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
- Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1992 tentang Bagi Hasil
- Surat Edaran BI No.25/4/BPPP tanggal 29 Pebruari 1993 tentang Penjabaran dari PP No.72 /1992
- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.32/34/KEP/DIR/Tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum berdasar prinsip Syariah (Pasal 28)

b. Bahan Hukum Sekunder yaitu

- Dokumen-dokumen sistem perbankan konvensional maupun Syariah dengan prinsip bagi hasil;
- Buku-buku literatur mengenai hukum dan ekonomi yang berkaitan dengan perbankan konvensional dan syariah;
- Hasil Penelitian hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini;
- Berbagai Jurnal, makalah maupun artikel-artikel yang berkaitan dengan materi penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu :

Kamus-kamus, ensiklopedia dan bahan-bahan lain yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara :

- a. Data Kepustakaan, dilakukan dengan studi kepustakaan/literatur. Dalam hal ini dilakukan dengan cara menginventarisasikan dan pengumpulan buku-buku, bahan-bahan bacaan, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen lain.
- b. Data Lapangan, dikumpulkan dengan menggunakan alat penelitian wawancara. Wawancara dilakukan terhadap sumber informasi yang telah ditentukan sebelumnya dengan berdasarkan pada pedoman wawancara, sehingga wawancara yang dilakukan merupakan wawancara yang difokuskan (*focus interview*).<sup>10</sup> Selain itu dilakukan pula *grand tour quisioner* (analisis domain).<sup>11</sup> Hal ini dilakukan untuk

---

<sup>10</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, Op.cit, hal.60

<sup>11</sup> Sanafiah Faisal, *Penelitian Kualitatif : Dasar Dasar dan Aplikasi* (Malang, 1990), hal.

memperoleh gambaran atau pengertian yang bersifat umum dan relatif menyeluruh tentang penerapan prinsip bagi hasil dalam pembiayaan terhadap nasabah. Dengan bertitik tolak dari analisis domain pada tahap awal dilakukan penelahaan lebih rinci dan mendalam dengan menetapkan domain-domain tertentu yang berguna dalam upaya mendiskripsikan atau menjelaskan hal-hal yang berkaitan langsung dengan penerapan prinsip bagi hasil. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan terhadap sumber informasi (informan) yang mempunyai pengalaman tertentu atau terjun langsung pada obyek tertentu berkaitan dengan permasalahan penelitian yaitu Kepala atau staf Bank Muamalat Cabang Semarang yang merupakan lembaga perbankan yang mendasarkan pada Syariah dengan prinsip bagi hasil. Selanjutnya wawancara dilakukan terhadap sample responden dari nasabah Bank Muamalat Semarang.

Dari hasil wawancara, dapat memberikan gambaran dalam praktek tentang aspek hukum penerapan prinsip bagi hasil dalam pembiayaan terhadap nasabah. Mula-mula kepada subyek penelitian diajukan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian beberapa butir pertanyaan



tersebut diperdalam untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Dengan demikian diperoleh jawaban yang lengkap dan mendalam. Hasil yang diperoleh dari wawancara ini merupakan data primer yang mendukung data sekunder.

#### 6. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode analisis normatif-kualitatif untuk hasil penelitian hukum normatif. Untuk hasil penelitian empiris dilakukan dengan analisis domain untuk memperoleh gambaran atau pengertian yang bersifat umum dan relatif menyeluruh, analisis taksonomis untuk menelaah lebih rinci dan mendalam di mana fokus penelitian ditetapkan terbatas pada domain tertentu, misalnya aspek-aspek hukum penerapan prinsip bagi hasil dalam pembiayaan terhadap nasabah, analisis tema dipergunakan untuk mencari "benang merah" dalam penelitian.<sup>12</sup> Data yang telah terkumpul baik data kepustakaan maupun data lapangan, dilakukan editing untuk memeriksa kelengkapan dan kebaikan data-data yang dibutuhkan.

---

<sup>12</sup> Ibid, hal. 91

Kemudian diklasifikasikan menurut katagori masing-masing untuk memudahkan menganalisis.

Selanjutnya data yang telah diklasifikasikan dengan sistematis dan konsisten dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian.

#### 7. Teknik Pengecekan Validitas Data

Pengecekan data dilakukan dengan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda <sup>13</sup> dengan cara :

- a. Membandingkan data hasil penelitian, kuisisioner dengan hasil wawancara;
- b. Membandingkan apa yang dikatakan di depan umum dan secara pribadi;
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan orang sepanjang waktu;
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang;

---

<sup>13</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, 1997), hal. 178

- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

#### 8. Teknik Penyajian Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini diolah dan selanjutnya dianalisis dengan cara sebagaimana diuraikan di atas. Kemudian ditarik kesimpulan-kesimpulan dan disajikan dalam bentuk uraian-uraian.

#### F. Kerangka Pemikiran

Sistem hukum perbankan nasional Indonesia menerapkan *dual banking system* atau sistem perbankan berganda yaitu adanya sistem perbankan konvensional yang mendasarkan pada sistem bunga dan perbankan yang mendasarkan pada prinsip syariah yaitu prinsip bagi hasil.

Terbentuknya bank yang berdasar pada prinsip syariah merupakan suatu perubahan yang mendasar pada masyarakat yang menghendaki perubahan suatu sistem hukum di mana fungsi hukum sebagai pengintegrasi terhadap kepentingan yang berbeda dapat menjamin stabilitas dan kepastian hukum.

Kegiatan usaha Bank Syariah berdasarkan prinsip bagi hasil pada dasarnya merupakan bagian dalam sistem

perbankan nasional Indonesia setelah mendapatkan legalitas institusional dengan diundangkannya Undang-undang No.7 Tahun 1992 (Pasal 6 huruf m) yang selanjutnya diikuti dengan ditetapkannya ketentuan pelaksanaan dalam Peraturan Pemerintah No.72 tahun 1992 tentang Bank Bagi Hasil, kemudian diberlakukannya UU No.10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 72 tahun 1992 dan UU No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang memberikan landasan operasional berlakunya Bank Syariah.

Bank Syariah melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau sesuai dengan aturan atau kaidah dalam Hukum Islam berdasarkan pada Al Qur'an, Al-Hadits, Ijma'para sahabat, dan qiyas ulama.

a. Sebagaimana firman Allah:

*"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik....." (Al Baqarah ayat 267).*

*".....dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT....." (Al-Muzzammil:20).*

b. Al-Hadits :

*"Sesungguhnya Allah mencintai hamba-Nya yang bekerja. Barang siapa yang bekerja keras mencari nafkah yang halal untuk keluarganya maka sama seperti mujahid di jalan Allah (HR.Ahmad)*

Islam sebagai agama merupakan konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal baik dalam hubungan dengan Sang Pencipta (*HabluminAllah*) maupun dalam hubungan sesama manusia (*Hablumminannas*). Ada tiga pilar pokok dalam ajaran Islam yaitu :<sup>14</sup>

#### 1. Aqidah :

Komponen ajaran Islam yang mengatur tentang keyakinan atas keberadaan dan kekuasaan Allah, sehingga harus menjadi keimanan seorang muslim manakala melakukan berbagai aktivitas di muka bumi semata-mata untuk mendapatkan keridlaan Allah dan sebagai khalifah yang mendapat amanah dari Allah.

#### 2. Syariah:

Komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim baik dalam bidang ibadah (*habluminAllah*) maupun dalam bidang muamalah (*hablumminnas*) yang merupakan aktualisasi dari aqidah yang menjadi keyakinannya. Muamalah meliputi berbagai bidang kehidupan, antara lain yang menyangkut ekonomi atau harta dan perniagaan disebut *muamalah maliyah*.

#### 3. Akhlaq:

Landasan perilaku dan kepribadian yang akan mencirikan dirinya sebagai seorang muslim yang taat berdasarkan syariah dan aqidah yang menjadi pedoman hidupnya, sehingga memiliki akhlaqul karimah sebagaimana hadits nabi menyatakan "Tidaklah sekiranya Aku diutus kecuali untuk menjadikan akhlaqul karimah".

---

<sup>14</sup> Achmad Baraba, *Prinsip Dasar Operasional Perbankan Syariah*, (Majalah Buletin Ekonomi, Bank Indonesia: Jakarta), hal.2

Islam mempunyai pandangan yang jelas mengenai harta dan kegiatan ekonomi. Pandangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :<sup>15</sup>

- 1) Pemilik mutlak terhadap segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, termasuk harta benda, adalah Allah SWT. Kepemilikan oleh manusia hanya bersifat relatif, sebatas untuk melaksanakan amanah mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuan-Nya.

"Berimanlah kamu, kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka, orang-orang yang beriman diantara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya mendapatkan pahala yang besar". (Al-Hadiid:7)

".....dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepada kalian....." (an-Nuur:33).

2. Status harta yang dimiliki manusia adalah sebagai berikut:
  - a) Harta sebagai amanah (titipan) dari Allah SWT;
  - b) Harta sebagai perhiasan hidup;
  - c) Harta sebagai ujian keimanan;
  - d) Harta sebagai bekal ibadah, yakni untuk melaksanakan perintah-Nya dan melaksanakan muamalah diantara sesama manusia, melalui kegiatan, zakat, infaq, dan sedekah.
3. Pemilikan harta antara lain melalui usaha (a'mal) atau mata pencaharian (ma'isyah) yang halal sesuai dengan aturan-Nya.
4. Dilarang mencari harta, berusaha, atau bekerja yang dapat melupakan kematian, melupakan dzikrullah (tidak ingat kepada Allah SWT), melupakan shalat dan zakat, dan memusatkan kekayaan hanya pada sekelompok orang kaya saja.

---

<sup>15</sup> Didin Hafidhuddin, *Pelatihan Perbankan Syariah*, Tazkia Institute, dalam M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, (Gema Insani: Jakarta, 2001), hal. 8-9.

5. Dilarang menempuh usaha yang haram, seperti melalui kegiatan riba, perjudian, menjual beli barang yang dilarang atau haram, mencuri, merampok, penggasaban, curang dalam takaran dan timbangan melalui cara-cara yang bathil dan merugikan, melalui suap-menyuap.

Di dalam pandangan Islam, membungakan uang adalah kegiatan usaha yang kurang mengandung risiko, karena perolehan kembaliannya berupa bunga yang relatif pasti dan tetap. Membungakan uang adalah kegiatan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, umat Islam dilarang mengambil apapun jenis riba. Menurut istilah teknis, riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok (modal) secara bathil.<sup>16</sup> Secara umum riba adalah penambahan pada hutang baik kualitas maupun kuantitas, baik banyak ataupun sedikit adalah riba yang diharamkan.

Landasannya dalam Al Qur'an Surah An-Nisa (4)/29:

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan bathil.*

Jalan yang bathil dalam hal ini adalah pengambilan tambahan modal pokok tanpa ada imbalan pengganti (kompensasi) yang dapat dibenarkan oleh syar'i.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Tazkia Institute, *Riba dan Permasalahannya*, (Jakarta, 1999), hal.1

<sup>17</sup> Ibid, hal.2

Larangan umat Islam supaya tidak melibatkan diri dengan riba tidak hanya bersumber dari berbagai surat dalam Al Qur'an, tetapi juga dari berbagai Hadist (merupakan sumber rujukan, selain Al Qur'an, bagi umat Islam untuk mengesahkan atau mendapatkan keterangan lebih lanjut peraturan yang telah digariskan Al Qur'an).

Firman Allah SWT :

"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia. Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)" (Qs. Arrum:39)

"Maka disebabkan kezhaliman orang-orang Yahudi. Kami haramkan atas mereka yang (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang bathil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih" (Qs. An Nisa:160-161).

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertagwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan" (Qs. Ali Imran :130).

"Hai orang-orang yang beriman, bertagwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa



riba)maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu.Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riab)maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya"(Qs.Al Baqoroh;278-279).

Larangan riba dalam Hadist sebagaimana isi surat Rasulullah SAW kepada Itab bin Usaïd, Gubernur Mekkah, agar kaum Tahif tidak menuntut hutangnya (riba yang telah terjadi sebelum kedatangan Islam) dari Bani Mughirah.

"Ingatlah kamu akan menghadap Tuhanmu dan Dia pasti akan menghitung amalanmu. Allah telah melarang kamu mengambil riba, oleh karena itu hutang akibat riba harus dihapuskan. Modal (uang pokok) kamu adalah hak kamu. Kamu tidak akan menderita ataupun mengalami ketidakadilan".

Hadits ini merupakan amanat terakhir Rasulullah saw pada 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah.

Diriwayatkan oleh Aun bin Abi Juhaifa, Ayahku membeli seorang budak yang pekerjaannya membekam, ayahku kemudian memusnahkan peralatan bekam si budak tersebut. Aku bertanya pada ayah mengapa beliau melakukannya ? Ayahku menjawab "Rasulullah saw melarang untuk menerima harga anjing dan darah, dan Beliau juga melarang pekerjaan membekam, menerima dan memberi riba serta Beliau mencela para pembuat gambar (HR.Bukhari).

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda,

"Tuhan sesungguhnya berlaku adil karena tidak membenarkan empat golongan memasuki surga atau tidak mendapat petunjuk dari-Nya (Mereka itu adalah) Peminum arak, pemakan riba, pemakan harta anak yatim, dan mereka yang tidak bertanggung jawab/menelantarkan ibu bapaknya".

Di dalam penelitian ini, yang dimaksud bank berdasar prinsip bagi hasil adalah Bank Umum yang melakukan kegiatan usaha semata-mata berdasar prinsip bagi hasil sebagaimana di atur di dalam Pasal 1 huruf (1) PP No.72 tahun 1992 tentang Bank berdasar prinsip bagi hasil.

Pengertian prinsip bagi hasil sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 PP No.72 tahun 1992 adalah prinsip bagi hasil berdasar Syariat yang digunakan oleh bank berdasar prinsip bagi hasil dalam:

1. menetapkan imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan penggunaan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya;
2. menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik untuk keperluan investasi maupun modal kerja;
3. menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan usaha lainnya yang lazim dilakukan oleh bank dengan prinsip bagi hasil.

Di dalam Pasal 1 ayat 13, Pasal 13 huruf (c) Undang-undang No.10 tahun 1998, Pasal 1 ayat 13 menjelaskan bahwa prinsip bagi hasil adalah :

Aturan perjanjian berdasarkan Hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah.

Penetapan besarnya bagi hasil antara bank berdasarkan prinsip bagi hasil dengan nasabahnya

didasarkan pada kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian tertulis antara kedua pihak (Pasal 3 PP No.72 tahun 1992).

Dalam penelitian ini yang dimaksud, pembiayaan terhadap nasabah dalam bank Syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 (angka 12) UU No.10 tahun 1998 adalah :

Penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Bank syariah tidak mengenal kredit atau pinjaman, melainkan pembiayaan. Kegiatan bank Syariah dalam hal modal kerja bukan dengan meminjamkan uang, melainkan dengan menjalin hubungan kerjasama dengan nasabah, di mana pihak bank bertindak sebagai penyandang dana (shahibul maal), sedangkan nasabah sebagai pengusaha (mudharib).

Pembiayaan dalam bank Syariah, menurut sifat penggunaannya dapat terbagi atas pembiayaan produktif, dan konsumtif. Sedang menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal yaitu pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Op.cit, Muhammad Syafi'I Antonio, hal. 160

Bank Syariah yang menerapkan prinsip bagi hasil dalam menjalankan kegiatannya tidak menggunakan sistem bunga sebagai dasar untuk menentukan imbalan yang akan diterima atas jasa pembiayaan yang diberikan nasabah. Demikian pula imbalan yang akan diberikan kepada nasabah atas dana yang dititipkan kepada bank. Penentuan imbalan didasarkan pada prinsip bagi hasil.

Sebagaimana dikemukakan oleh Achmad Baraba<sup>19</sup> antara lain menjelaskan bahwa dalam menjalankan operasinya, bank syariah tidak mengenal konsep bunga uang dan tidak mengenal peminjaman uang tetapi yang ada adalah kemitraan atau kerjasama (mudharabah dan musyarakah) dengan prinsip bagi hasil, sementara peminjaman uang hanya dimungkinkan untuk tujuan sosial tanpa adanya imbalan apapun, sehingga dalam operasinya dikenal beberapa produk bank syariah antara lain produk dengan prinsip mudharabah (perjanjian antara pihak pertama atau pemilik dana dan pihak kedua atau pengelola) dengan menyepakati nisbah bagi hasil atas keuntungan yang akan diperoleh sedangkan kerugian yang timbul menjadi risiko pemilik dana sepanjang tidak ada

---

<sup>19</sup> Achmad Baraba, dalam Nasser Atorf, *Prinsip Dasar Operasional Perbankan Syariah Produk-Produk dan Tantangannya*, (Majalah Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan: Bank Indonesia), Vol.2 No.3 Desember 1999, hal 4

bukti bahwa pihak pengelola tidak melakukan kecurangan. Di samping itu juga dikenal produk dengan prinsip musyarakah yaitu perjanjian antar pihak untuk menyertakan modal dalam suatu kegiatan ekonomi dengan pembagian keuntungan atau kerugian sesuai nisbah yang disepakati.

Berbeda dengan bank konvensional (bank umum yang selama ini kita kenal), imbalan selalu dihitung dalam bentuk bunga (dengan suatu prosentase tertentu per tahun). Tingkat bunga yang dinyatakan dalam prosentase tersebut merupakan aspek penting dalam kegiatan usaha bank konvensional.

Menurut Mochtar Kusumaatmaja, hukum merupakan keseluruhan asas-asas atau kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, juga mencakup lembaga (*institutions*) dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan.<sup>20</sup>

Ronny Hanitijo Soemitro mengemukakan bahwa dalam mempelajari hukum, hendaknya dipahami sekurang-kurangnya tiga konsep mengenai hukum, yaitu :<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Lili Rasyidi.IB Wyasa, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung, 1993), hal.16

<sup>21</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Perspektif Sosial Dalam Pemahaman Masalah-masalah Hukum*, (Semarang, 1999), hal.1

- 1) Hukum sebagai ide, cita-cita, nilai moral keadilan;
- 2) Hukum sebagai suatu normakaidah, peraturan, Undang-undang yang berlaku pada suatu waktu tempat tertentu sebagai produk dari suatu kekuasaan negara tertentu yang berdaulat;
- 3) Hukum sebagai suatu institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan bermasyarakat yang berbentuk pola-pola tingkah laku yang melembaga.

Hukum perbankan syariah merupakan alternatif di mana mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam untuk melakukan suatu kegiatan ekonomi sesuai ketentuan-Nya. Sehingga dipandang perlunya mengembangkan instrumen-instrumen sebagai pelengkap maupun produk-produk yang ditawarkan di dalam bekerjanya sistem hukum perbankan syariah.

Prinsip bagi hasil merupakan suatu ketentuan dalam suatu pembiayaan yang telah disepakati bersama antara bank (shahibul maal) dengan pihak pengelola dana (mudharib) yang berdasar syariah. Jika terjadi kerugian dalam usaha, maka hal tersebut sebagai reduksi atas modal dan ditanggung oleh pemilik modal itu sendiri (mudharabah).<sup>22</sup> Berbeda dengan *musyarakah*, keuntungan dan kerugian akan dibagi diantara kedua pihak sesuai dengan proporsi pada modal yang diinvestasikan.

---

<sup>22</sup> M.Nejatullah Siddiqi, terjemah Fakhriyah Muntihani, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam*, (Dana Bhakti Prima Yasa: Yogyakarta, 1996), hal.15

Aspek-aspek hukum yang terkait dengan hubungan hukum antara pihak bank dan nasabah ini baik berdasar perjanjian *mudharabah* maupun *musyarakah* akan menimbulkan akibat hukum yaitu adanya hak dan kewajiban maupun tanggung jawab pada masing-masing pihak yang didahului adanya suatu perjanjian kontraktuil.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Tesis ini terdiri dari empat bab, yang tersusun secara berurutan, dari Bab I sampai Bab IV.

Bab I dalam tulisan ini meupakan pendahuluan yang berisikan uraian tentang latar belakang penelitian, perumusan permasalahan, manfaat dan kontribusi dari hasil penelitian yang diperoleh, metode yag digunakan dalam pelaksanaan penelitian, serta kerangka pemikiran.

Bab II dalam tulisan ini berisi tiga sub bab yang terdiri dari sub pertama uraian mengenai tinjauan terhadap bank konvensional, ruang lingkup perbankan, dasar hukum perbankan, jenis-jenis perbankan, sistem bunga dalam bank konvensional; sub bab kedua berisi tinjauan terhadap bank syariah yang membahas ruang lingkup bank syariah, ketentuan yang mengatur, kegiatan usaha bank syariah, pengertian dan landasan hukum

prinsip bagi hasil, sistem pembiayaan bank syariah; sub bab ketiga, membahas aspek-aspek hukum prinsip bagi hasil dalam pembiayaan terhadap nasabah di mana akan membahas hubungan hukum antara bank (shahibul maal) dengan nasabah (mudharib) pengelola dana baik berdasar prinsip bagi hasil secara al-mudharabah maupun al-musyarakah.

Bab III dalam tulisan ini berisi uraian tentang hasil penelitian dan pembahasan yang menyangkut profil Bank Muamalat Cabang Semarang, penerapan prinsip bagi hasil dalam pembiayaan terhadap nasabah, aspek-aspek hukum penerapan prinsip bagi hasil dalam pembiayaan terhadap nasabah, dan hambatan-hambatan yang dihadapi bank Muamalat Semarang dalam menerapkan prinsip bagi hasil dalam pembiayaan maupun usaha mengatasinya.

Bab IV dalam tulisan ini berisi uraian mengenai penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang berdasar dari hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. TINJAUAN TERHADAP PERBANKAN KONVENSIONAL

##### 1. Ruang Lingkup Perbankan

###### 1.1. Pengertian bank

Pengertian bank sebagaimana di atur di dalam Pasal 1 angka (2) UU No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, adalah:

Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dalam perkembangan dewasa ini, istilah bank yang dimaksudkan sebagai suatu jenis *pranata finansial* yang melaksanakan jasa-jasa keuangan yang cukup beraneka ragam, seperti pinjaman, memberi pinjaman, mengedarkan mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan untuk benda-benda berharga, membiayai usaha-usaha perusahaan<sup>23</sup>.

Noah Webster<sup>24</sup> menyatakan bahwa dalam suatu kamus, kata "bank" diartikan sebagai berikut:

---

<sup>23</sup> M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, Tazkia Institute dengan Bank Indonesia, (Jakarta, 1999), hal.95-96

<sup>24</sup> Noah Webster, dalam Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, (Bandung, 1999) hal.13

1. Menerima deposito uang, custody, menerbitkan uang, untuk memberikan pinjaman dan diskonto, memudahkan penukaran fund-fund tertentu dengan cek, notes, dan lain-lain, dan juga bank memperoleh keuntungan dengan meminjamkan uangnya dengan memungut bunga.
2. Perusahaan yang melaksanakan bisnis bank tersebut.
3. Gedung atau kantor tempat dilakukannya transaksi bank atau tempat beroperasinya perusahaan perbankan

Disamping itu, ada juga yang memberikan arti kepada bank sebagai suatu institusi yang mempunyai peran yang besar dalam dunia komersil, yang mempunyai wewenang untuk menerima deposito, memberikan pinjaman, dan menerbitkan promissory notes yang disebut dengan *bank bills* atau *bank notes*. Namun demikian fungsi bank yang orisinal adalah hanya menerima deposito berupa uang, logam, plate, emas dan lain-lain<sup>25</sup>.

Menurut kamus istilah hukum Fockema Adreae<sup>26</sup> yang dimaksud dengan bank adalah

Suatu lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak ketiga. Berhubung dengan adanya cek yang hanya dapat diberikan kepada bankier sebagai tertarik, maka bank dalam arti luas adalah orang atau lembaga yang dalam

---

<sup>25</sup> Black, Hendry Campbell, 1968:184, sebagaimana dikutip oleh Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern (berdasarkan UU Tahun 1998)* Buku Kesatu, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999), *OP. Cit*, hal 14.

<sup>26</sup> Fockema Adreae, sebagaimana dikutip oleh, Zainal Asikin, *Pokok-Pokok Hukum Perbankan di Indonesia*, (Radja Grafindo, Jakarta, 1995) hal 4.

pekerjaannya secara teratur menyediakan uang untuk pihak ketiga.

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang No.10 tahun 1998, menjelaskan pengertian perbankan adalah sebagai berikut:

"Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya."

Menurut Abdurrahman Perbankan<sup>27</sup> (*banking*) ialah kegiatan dalam menjual belikan mata uang, serta efek dan instrumen-instrumen yang dapat diperdagangkan. Sedangkan Sentosa Sembiring menyatakan<sup>28</sup> bahwa bank adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum yang bergerak di bidang jasa keuangan.

Bank sebagai Badan Hukum secara yuridis adalah merupakan subyek hukum yang berarti dapat mengikatkan diri dengan pihak ketiga.

Menurut O.P. Simorangkir<sup>29</sup> pengertian Bank diartikan sebagai :

"Salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa. Adapun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal

---

<sup>27</sup> Abdurrahman, dalam Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, (Mandar Maju, Bandung, 2000,) hal.1.

<sup>28</sup> Abdurrahman, A. dalam Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern (Berdasarkan UU Tahun 1998)* Buku Kesatu. (Citra Aditya Bakti,Bandung 1999),hal 13.

<sup>29</sup> O.P. Simorangkir, dalam Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, (Mandar Maju, Bandung, 2000), hal.1.

sendiri atau dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral".

Hart sebagaimana dikutip oleh Sentosa Sembiring dalam J. Milnes Holden menyatakan :<sup>30</sup>

*"a banker or bank as a person or company carrying on the business of receiving moneys, and collecting drafts, for customers subject to the obligation of honouring cheques drawn upon them from time to time by the customers to extent of the amount available on their current accounts".*

Sentosa Sembiring sendiri memberi pengertian tentang bank dengan menyatakan bahwa :

"bank adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum yang bergerak dibidang jasa keuangan. Bank sebagai badan hukum berarti secara yuridis adalah merupakan subyek hukum yang berarti dapat mengikatkan diri dengan pihak ketiga. Dengan demikian hukum perbankan dapat dirumuskan adalah serangkaian kaidah-kaidah yang mengatur tentang badan usaha perbankan. Kaidah-kaidah yang dimaksudkan disini adalah baik yang terdapat dalam hukum positif maupun dalam praktek perbankan".

## **1.2.Aspek Hukum Perbankan**

Munir Fuady <sup>31</sup>, mengatakan bahwa hukum yang mengatur masalah perbankan disebut dengan hukum perbankan (**banking law**), yakni merupakan :

"seperangkat kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, **yurisprudensi, doktrin,**

---

<sup>30</sup> Ibid, hal.2

<sup>31</sup> Munir Fuady, Op, Cit hal. 5.

dan lain-lain sumber hukum, yang mengatur masalah-masalah perbankan sebagai lembaga, dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petugas-petugasnya, hak dan kewajiban, tugas dan tanggung jawab para pihak yang tersangkut dengan bisnis perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank, eksistensi perbankan dan lain-lain yang berkenaan dengan dunia perbankan tersebut".

Muhammad Djumhana<sup>32</sup> menyatakan bahwa ruang lingkup hukum perbankan di Indonesia merupakan hukum yang mengatur masalah-masalah perbankan yang berlaku sekarang di Indonesia.

Dengan kata lain bahwa **Hukum Perbankan**, adalah sebagai kumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek, dilihat dari segi esensi, dan eksistensinya, serta hubungannya dengan bidang kehidupan yang lain.

Rumusan tersebut di atas, bahwa pengaturan dibidang perbankan akan menyangkut diantaranya :

1. Dasar-dasar perbankan, yaitu menyangkut asas-asas kegiatan perbankan seperti; norma efisiensi, keefektifan, kesehatan bank, profesionalisme pelaku perbankan, maksud dan

---

<sup>32</sup> Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal 1.

tujuan lembaga perbankan, serta hubungan hak dan kewajibannya;

2. Kedudukan hukum pelaku dibidang perbankan seperti; kaidah-kaidah mengenai pengelolaan seperti dewan komisaris, direksi, karyawan maupun pihak yang terafiliasi. Juga mengenai bentuk badan hukum pengelolanya, serta mengenai kepemilikannya.
3. Kaidah-kaidah perbankan yang secara khusus yang memperhatikan kepentingan umum seperti kaidah yang mencegah persaingan yang tidak wajar, anti trust, perlindungan terhadap konsumen (nasabah), dan lain-lainnya. Di Indonesia bahkan mempunyai kekhususan tersendiri, yaitu bahwa perbankan nasional harus memperhatikan keserasian, keselarasan dan keseimbangan unsur-unsur pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas Nasional.
4. Kaidah-kaidah yang menyangkut struktur organisasi, yang mendukung kebijakan ekonomi dan moneter pemerintah, seperti Dewan Moneter dan Bank Sentral.

5. Kaidah-kaidah yang mengarahkan kehidupan perekonomian yang berupa dasar-dasar untuk perwujudan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya melalui penetapan sanksi, insentif, dan sebagainya.

6. Keterkaitan satu sama lainnya dari ketentuan dan kaidah-kaidah hukum tersebut sehingga tidak mungkin berdiri sendiri, malahan keterkaitannya merupakan hubungan logis dari bagian-bagian lain-lainnya.

### **1.3. Kegiatan Usaha Perbankan**

Menurut Djumhana,<sup>33</sup> bahwa kegiatan usaha bank secara umum adalah sebagai berikut :

Kegiatan usaha bank di Indonesia harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana kegiatan usaha perbankan harus sesuai dengan jenis banknya.

Menurut Undang-undang Perbankan, kegiatan bank dibedakan dalam dua bentuk yaitu :

a) Kegiatan Bank Umum, yang terdiri dari kegiatan utama dan kegiatan tambahan.

b) Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat.

---

<sup>33</sup> Ibid, hal.5

Kegiatan pokok dari suatu bank umum dapat dilihat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang bunyinya adalah sebagai berikut :

1. Menarik dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan /atau bentuk-bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
2. Memberikan kredit;
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
4. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
  - a) surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat yang dimaksud;
  - b) Surat pengakuan hutang atau kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat yang dimaksud;
  - c) Kertas pembendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
  - d) Sertifikat Bank Indonesia (SBI),
  - e) Obligasi,
  - f) Surat dagang berjangka waktu maksimum 1 (satu) tahun,
  - g) Surat-surat berharga lain dengan jangka waktu maksimum 1 tahun
5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan bank sendiri ataupun untuk kepentingan nasabah.
6. Menempatkan dana pada peminjam dana dari atau meminjamkan dana kepada bank lain, dengan menggunakan instrumen berupa surat, sarana telekomunikasi, maupun dengan wesel atas tunjuk, cek atau sarana lainnya.
7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.



8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
10. Melakukan penempatan dana dari nasabah yang satu kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
11. Membeli barang agunan debiturnya melalui pelelangan dengan syarat agar agunan yang dibeli tersebut secepatnya dicairkan.
12. Melakukan kegiatan anjak piutang, uang kartu kredit dan kegiatan wali amanat.
13. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasar Prinsip Syari'ah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
14. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh suatu bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dan perundang-undangan yang berlaku.

Disamping kegiatan utama tersebut, menurut Undang-Undang Perbankan memiliki kegiatan tambahan antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan kegiatan dalam valuta asing.
2. Melakukan penyertaan modal pada bank, perusahaan lain dalam **bidang keuangan** (seperti perusahaan leasing, modal ventura, perusahaan efek, asuransi) atau lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan.
3. Melakukan kegiatan penyertaan sementara untuk mengatasi kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari'ah.
4. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun.

Kesemua kegiatan bank sebagaimana disebutkan diatas, pada prinsipnya merupakan kegiatan usaha suatu

bank (baik Bank Umum maupun BPR) yang terdiri dari tiga golongan sebagai berikut:

- a. Kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat.
- b. Kegiatan penarikan dana kepada masyarakat.
- c. Kegiatan pemberian jasa tertentu yang dapat menghasilkan *fee based income*.

Kegiatan usaha yang dilarang kepada Bank Umum adalah melakukan penyertaan modal kecuali penyertaan modal untuk sementara dan penyertaan pada bank dan perusahaan lain dibidang perdagangan; melakukan usaha perasuransian; dan melakukan usaha lain liluar kegiatan yang menjadi usaha utama dibidang perbankan sebagaimana jenis-jenis kegiatan usaha diatas.

Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank Perkreditan Rakyat, sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, meliputi:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit.
3. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan Prinsip Syari'ah.
4. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka,

sertifikat deposito dan atau tabungan pada bank lain.

Kegiatan usaha yang dilarang bagi Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana di atur dalam Pasal 14 UU No.7 Tahun 1992, adalah sebagai berikut meliputi :

- a. Menerima simpanan giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
- b. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
- c. Melakukan penyertaan modal;
- d. Melakukan kegiatan perasuransian;
- e. Melakukan kegiatan usaha lain diluar kegiatan usaha seperti diatas.

#### **1.4.Bentuk hukum bank**

Bentuk hukum diperlukan dalam mendirikan suatu jenis usaha. Dengan adanya suatu bentuk hukum tertentu, maka akan mempermudah bagi para pendiri untuk merumuskan maksud dan tujuan dalam kegiatan usaha yang dilakukan secara jelas, sehingga mudah dalam pengelolaannya.

Pengaturan bentuk hukum bank diatur dalam Pasal 21 UU No.7 Tahun 1992 adalah sebagai berikut :

1. Bentuk hukum Bank Umum dapat berupa :

- Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Daerah, Koperasi dan Perseroan Terbatas (PT);
2. Bentuk hukum suatu Bank Perkreditan Rakyat, dapat berupa :  
Perusahaan Daerah, Koperasi, Perseroan Terbatas (PT), dan bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
  3. Bentuk hukum dari kantor Perwakilan, dan kantor cabang yang berkedudukan di luar negeri mengikuti bentuk hukum kantor pusatnya.

## **2. Jenis-jenis Bank**

Sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 jenis bank dibagi menjadi 2 jenis yaitu; <sup>34</sup>

1. Bank Umum yaitu bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
2. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang hanya menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

---

<sup>34</sup> Baca, Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang *Perbankan*.

Lembaga Perbankan di Indonesia, dapat dibagi dan digolongkan menjadi sebagai berikut: <sup>35</sup>

### 2.1. Dilihat dari Bidang Usahanya

Bank ditinjau dari jenisnya ada 2 macam yaitu :

#### a. Bank Umum

Bank Umum mempunyai 2 bentuk yaitu Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syari'ah.

**Bank Umum** adalah bank yang melaksanakan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syari'ah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Pasal 1 ayat (3)).

#### b. Bank Perkreditan Rakyat ( BPR )

BPR mempunyai 2 bentuk yaitu BPR dan BPR Syari'ah.

**Bank Perkreditan Rakyat** adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syari'ah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran (Pasal 1 ayat (4)).

---

<sup>35</sup> Sentosa Sembiring, Op.cit, hal. 3-7

## 2.2. Dilihat dari Kepemilikannya

Dilihat dari kepemilikannya bank dapat dibagi dalam 2 golongan yakni :<sup>36</sup>

1. Bank Milik Pemerintah (Negara) artinya modal bank yang bersangkutan berasal dari pemerintah. Seperti BNI, BRI, BPD dan lain-lain.
2. Bank milik Swasta:
  - a. Swasta Nasional, artinya modal bank ini dimiliki oleh orang ataupun badan hukum Indonesia;
  - b. Swasta Asing, artinya modal tersebut dimiliki oleh Warga Negara Asing (WNA) Badan Hukum Asing. Dalam hal ini ada kemungkinan bank ini merupakan kantor cabang dari negara asal bank yang bersangkutan;
  - c. Disamping kedua jenis bank ini, dalam dunia perbankanpun dikenal pula apa yang disebut dengan Bank Campuran. Bank Campuran adalah bank umum yang didirikan

---

<sup>36</sup> Sentosa Sembiring,, Ibid, hal 7.

bersama oleh satu atau lebih bank umum yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan oleh Warga Negara Indonesia(WNI) Dan /atau Badan Hukum yang dimiliki sepenuhnya oleh WNI, dengan satu atau lebih bank yang berkedudukan di luar negeri.

3. Bank Milik Pemerintah Daerah, adalah bank yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

### **2.3. Dilihat dari fungsi dan tujuan usahanya**

Dilihat dari segi dan Fungsi dan tujuan usahanya dikenal empat bentuk jenis bank, yaitu : <sup>37</sup>

1. Bank Sentral (Central Bank), adalah bank yang dapat bertindak sebagai bankers bank pimpinan, penguasa moneter, mendorong dan mengarahkan semua jenis bank yang ada;
2. Bank Umum (Commercial Bank), yaitu bank baik milik negara, swasta maupun koperasi, yang dalam pengumpulan dananya, terutama menerima simpanan dalam bentuk giro, deposito, serta tabungan dan dalam usahanya terutama memberikan kredit

---

<sup>37</sup> Muhammad Djumhana, *Op. Cit* hal 83 – 84.

jangka pendek. Dikatakan bank umum karena bank tersebut mendapatkan keuntungannya dari selisih bunga yang diterima dari peminjam dengan yang dibayarkan oleh bank kepada depositor (disebut spread).

3. Bank Tabungan (*Saving Bank*), yaitu bank baik milik negara, swasta, koperasi, yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk tabungan sedangkan usahanya terutama memperbungakan dananya dalam kertas berharga.

4. Bank Pembangunan (*Development Bank*), yaitu bank baik negara, swasta maupun koperasi baik pusat ataupun daerah, yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk deposito, dan dengan atau mengeluarkan kertas berharga jangka menengah, dan panjang sedangkan usahanya terutama memberikan kredit jangka menengah dan panjang di bidang pembangunan.



## **2.4. Dilihat dari operasionalnya**

Dilihat dari ruang lingkup operasional bidang usahanya, maka bank dapat dibagi dalam 2 golongan, yakni:<sup>38</sup>

1. Bank Devisa adalah bank yang memperoleh surat penunjukkan dari Bank Indonesia untuk melakukan usaha perbankan dalam valuta asing.
2. Bank Non Devisa, artinya bank tidak dapat melakukan usaha dibidang transaksi valuta asing.

## **3.Sistem Bunga dalam bank konvensional**

### **3.1.Pengertian bunga**

Pengertian bunga sebagaimana dinyatakan oleh Eri Sudewo<sup>39</sup> bahwa bunga adalah pertumbuhan atau penambahan nilai. Bunga merupakan perbuatan mengambil sejumlah uang yang berasal dari seseorang yang berutang, secara berlebihan. Laba berbeda dengan bunga. Perbedaan laba dengan bunga menurut Eri Sudewo adalah sebagai berikut:<sup>40</sup>

- a. Bunga mengkondisikan pemilik tak memiliki risiko. Setelah akad pinjaman disepakati, pemilik uang tak memiliki kepentingan lagi dengan peminjam. Mustahil pemilik uang rugi karena bunga telah ditentukan.

---

<sup>38</sup> Sentosa Sembiring, *Op.Cit.* hal 7.

<sup>39</sup> Eri Sudewo, *Ekonomi Bebas Bunga*, dalam kata pengantar Buku PAS (Pedoman Akuntansi Syariah) Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil, (Bandung, 1999), hal.20

<sup>40</sup> Ibid, hal.24

Karena seluruh risiko ditanggung peminjam, maka si kaya bakal menjadi kaya, si miskin akan lebih miskin.

- b. Dalam setiap perdagangan, risiko merupakan hal normal. Laba merupakan hasil usaha, inisiatif dan efisiensi. Berbeda dengan bunga yang tak kenal risiko, juga tak pernah peduli pada dinamika usaha yang dijalankan peminjam.
- c. Dalam perdagangan, saat barang bertukar dengan uang, transaksi otomatis selesai, sedang dalam bunga saat pinjaman diberikan itu merupakan awal masalah. Pemilik uang tidak pernah berhenti menagih bunga dan peminjam menanggung risiko.
- d. Perdagangan adalah proses produksi karena ada kondisi penciptaan lapangan kerja. Dengan bekerja, manfaatnya bukan hanya imbalan yang diterima pekerja, sebaliknya bunga mengenalkan pada kondisi krisis, bunga telah menjadi beban karena telah menjadi biaya produksi.
- e. Bunga menjadi pemicu inflasi, untuk membayar utang, peminjam harus menaikkan harga barang dan kadang memangkas upah buruh.

Sebagai misal bunga deposito dalam sistem bank konvensional akan berbeda pada bank syariah yang berdasar prinsip bagi hasil. Pada bank konvensional, besar kecilnya bunga diperoleh deposan tergantung pada tingkat suku bunga yang berlaku; nominal deposito; jangka waktu deposito. Sedang pada bank syariah, besar kecilnya bagi hasil yang diperoleh deposan tergantung pada pendapatan bank; nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank; nominal deposito nasabah; rata-rata saldo deposito untuk jangka waktu

tertentu yang ada pada bank; dan jangka waktu deposito karena berpengaruh pada lamanya investasi.

Dalam pandangan bank konvensional, imbalan selalu dihitung dalam bentuk bunga (dengan suatu prosentase tertentu per tahun). Tingkat bunga yang dinyatakan dalam prosentase tertentu tersebut merupakan aspek penting dalam kegiatan usaha bank konvensional.

Bunga bank dalam bahasa Fiqh diidentikkan dengan riba, sedang menurut bahasa (etimologis) bermakna *ziyadah* (tambahan).<sup>41</sup>

### **3.2.Hukum Bunga Bank**

Didalam Pasal 1 ayat (11) UU No.10 Tahun 1998 bahwa

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Pengertian pasal tersebut di atas, bahwa dasar hukum adanya bunga karena suatu jasa imbalan dari pihak peminjam atas kesepakatan kedua pihak dalam perjanjian kredit. Dengan kata lain bunga merupakan kewajiban bagi

---

<sup>41</sup> Setiawan Budi Utomo, "*Jawaban Tuntas Masalah Bunga*," Kolom Fiqh Kontemporer Majalah Saksi Bunga, No.10 Tahun III,2001, hal.37

peminjam setelah menerima modal atau dana yang telah diberikan pihak kreditur.

Hukum bunga bank konvensional, menurut pandangan ajaran Islam, sebagaimana ditetapkan dalam sidang di Bandar Lampung tahun 1982 yang dikenal dengan Keputusan Lajnah Bahsul Masail, antara lain :<sup>42</sup>

Terdapat tiga pendapat ulama yaitu :

1. Haram, sebab termasuk hutang yang dipungut rente;
2. Halal, sebab tidak ada syarat pada waktu akad, sementara adat yang berlaku, tidak dapat begitu saja dijadikan syarat;
3. Syubhat (tidak tentu halal-haramnya), sebab para ahli hukum berselisih pendapat.

Pendapat-pendapat tersebut adalah :

- a. Ada pendapat yang mempersamakan antara bunga bank dengan riba secara mutlak, sehingga hukumnya haram;
- b. Ada pendapat yang tidak mempersamakan bunga bank dengan riba, sehingga hukumnya boleh;  
Bunga konsumsi sama dengan riba, hukumnya haram, bunga produktif tidak sama dengan riba hukumnya halal;

---

<sup>42</sup> M.Syafi'i Antonio sebagaimana dikutip Setiawan Budi utomo, ibid, hal.90-91

Bunga yang diterima dari deposito yang disimpan di bank, hukumnya boleh;

Bunga bank itu tidak haram kalau bank itu menetapkan tarif bunganya terlebih dahulu secara umum.

- c. Ada pendapat yang menyatakan hukumnya subhat (tidak identik dengan haram).

Berdasarkan beberapa ayat dalam Al-Qur'an, terdapat konsensus diantara para ahli hukum dan para ahli teologi muslim bahwa riba dilarang oleh Islam.<sup>43</sup> Istilah riba disebutkan dalam (empat) Surat dalam Al-Qur'an, yaitu Surat Al-Baqarah ayat 275-280, Surat Ali Imron ayat 130, Surat An-Nisa' ayat 29, 161, dan surat Ar-Ruum ayat 39. Ayat-ayat tersebut diatas masing-masing menentukan mengenai larangan riba yang bunyinya sebagai berikut :

a. Surat Al-Baqarah:

1. "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari

---

<sup>43</sup> Elias, G. Kazarian, *Islamic Versus Traditional Banking, Financial Inovation in Egypt. Boulder*, dalam Sutan Remy Sjahdeini (Westview Press, 1993. hal. 48), Op. Cit. hal 6

Tuhannya, lalu berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang-orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang-orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal didalamnya. (ayat 275).

2. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. (ayat 276).
3. Sesungguhnya, orang - orang yang beriman mengerjakan amal sholeh, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala dari sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (Pula) mereka bersedih hati (Ayat 277).
4. Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman (Ayat 278).
5. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rosul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (Ayat 279).
6. Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan sebagian atau semua utang itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (Ayat 280).

b. Surat Ali Imron ayat 130:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

c. Surat An-Nisa' ayat 29 dan 161 :

1. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan bathil (QS. An- Nisa':29).
2. Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang bathil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang diantara kafir diantara mereka itu siksa yang pedih (Ayat 161).

d. Surat Ar-Ruum ayat 39 :

Dalam sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)).

Adapun larangan riba dalam Hadits tersurat dalam amanat terakhir Rasulullah pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriyah, beliau menekankan pelarangan riba. Beberapa Hadits Rasulullah Muhammad SAW. Sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an juga menjelaskan tentang pelarangan riba diantaranya adalah <sup>44</sup>

"Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Tuhanmu, dan Dia pasti akan menghitung amalanmu. Allah telah melarang kamu mengambil riba, oleh karena itu hutang akibat riba harus dihapuskan. Modal (uang pokok) kamu adalah hak kamu. Kamu tidak akan menderita ataupun mengalami ketidakadilan".

---

<sup>44</sup> Kesemua Hadits tersebut dikutip dari Terjemahan Subulussalam Bab Riba Hal 125 - 152

Dalam hadits yang lain sebagaimana diriwayatkan oleh Samuran bin Jundub Bahwa Rasulullah SAW bersabda "

- a) "Malam tadi Aku bermimpi,telah datang dua orang dan membawaku ketanah suci. Dalam perjalanan,sampailah kami kesuatu sungai darah, di mana didalamnya berdiri seorang laki-laki yang ditengah itu berusaha untuk keluar,tetapi laki-laki yang dipinggir sungai tadi melempar mulutnya,"siapakah itu? Aku diberitahu,bahwa laki-laki yang ditengah sungai itu ialah orang yang memakan riba". (HR. Bukhari).
- b) Rasulullah berkata, "pada malam perjalanan mi'raj,aku melihat orang-orang yang perut mereka seperti rumah,didalamnya dipenuhi oleh ular-ular yang kelihatan dari luar.Aku bertanya kepada Jibril siapakah mereka itu. Jibril menjawab bahwa mereka adalah orang-orang yang memakan riba".
- c) Hakim meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa Nabi SAW bersabda: " Riba itu mempunyai 73 pintu (tingkatan),yang paling rendah (dosanya) sama dengan seseorang yang melakukan zina dengan ibunya." Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda : "Tuhan sesungguhnya berlaku adil karena tidak membenarkan empat golongan memasuki surga atau tidak mendapat petunjuk dari-Nya. (mereka itu adalah) Peminum arak, Pemakan riba, Pemakan harta orang Yatim, dan mereka yang tidak bertanggungjawab/menelantarkan ibu bapaknya." Rasul bersabda" Apabila zina dan riba telah merajalela disuatu negeri,berarti mereka telah menyediakan diri mereka sendiri untuk disiksa oleh Allah." (HR.Hakim).
- d) Dari Jabir r.a. beliau berkata; Rasulullah SAW,mengutuk pemakan riba, wakilnya dan penulisnya,serta dua orang saksinya. Dan beliau mengatakan Mereka sama-sama dikutuk



(Diriwayatkan oleh Muslim, Al-Bukhari dari Abu Hujaiifah).

- e) Hadits lain adalah sebagaimana diriwayatkan oleh Umar bin Khattab yang menyatakan; Rasulullah SAW. Pernah bersabda, "Emas dilunasi dengan emas itu riba, kecuali bila seimbang, gandum dengan gandum juga riba, kecuali bila seimbang pula."

### 3.3. Alasan Pembena Pengambilan Bunga

Walaupun secara jelas ayat-ayat dalam Al Qur'an maupun Hadits, melarang adanya riba (bunga bank), namun masih saja ada cendekiawan yang berusaha mencari alasan untuk membenarkan pengambilan bunga. Diantara alasan yang sering digunakan untuk menghalalkan bunga adalah seperti:<sup>45</sup>

1. Dalam keadaan darurat, bunga halal hukumnya.

Dalam arti belum beroperasinya bank tanpa bunga (bank Syariah).

Sebagaimana firman Allah SWT, dalam keadaan darurat Allah menghalalkan daging babi dengan dua batasan.

".....Barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya), sedang ia (1) tidak menginginkan dan (2) tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Al Baqarah:173)

---

<sup>45</sup> M.Syafii Antonio, Op.cit, hal.40

2. Hanya bunga yang berlipat ganda saja yang dilarang, sedangkan suku bunga yang 'wajar' dan tidak mendzalimi, diperkenankan.<sup>46</sup>

Pendapat ini berasal dari pemahaman yang keliru atas surah Ali Imran ayat 130 :

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan berlipat ganda dan bertagwalah kalian kepada Allah supaya kalian mendapat keberuntungan."*

#### **B. TINJAUAN TERHADAP BANK SYARIAH**

Kelahiran Bank Syariah (Bank Islam) dilandasi bahwa segala sesuatu aktivitas seorang muslim harus didasarkan kepada syariat Islam. Islam tidak hanya mengatur mengenai hubungan antara manusia dengan Tuhan (ibadat), tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia (muamalat).

Allah memberikan petunjuk melalui para Rasul-Nya yaitu mengenai segala sesuatu yang dibutuhkan manusia baik akidah, akhlak, maupun syariah. Firman Allah SWT:

*"..... Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang....." (Al-Maa'idah:48).*

---

<sup>46</sup> Kahar Masyhur, *Beberapa Pendapat tentang Riba*, (Kalam Mulia, Jakarta:1999), hal.56

Dengan demikian hubungan dalam keseharian termasuk dalam bidang keuangan dan perbankan haruslah dilandasi dengan prinsip-prinsip yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Al Qur'an sebagai syariat utama melarang mengenai riba. Firman Allah SWT,:

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba yang berlipat ganda dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu beruntung" (QS. Ali Imron: 130).*

## **2.1. Ruang Lingkup Bank Syariah**

### **1.1. Pengertian Bank Syariah**

Di dalam Pasal 1 ayat ( 2 dan 3) UU No.10 Tahun 1998, bahwa Bank Syari'ah adalah bank umum maupun bank perkreditan rakyat di dalam melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syari'ah atau sesuai aturan dalam hukum Islam yang berdasarkan pada Al QUR'AN, Hadits, Ijma para sahabat dan Qiyas Ulama.

Di dalam Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menjelaskan pengertian prinsip syariah :

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syari'ah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau

pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).  
(Pasal 1 ayat 13).

### **1.2. Pengaturan hukum positif Bank Umum Syariah**

Sejak tahun 1992 dengan dikeluarkannya Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan menjadi tonggak lahirnya bank berdasarkan syariah. Sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 6 huruf (m) UU No.7 Tahun 1992 juncto Pasal 13 huruf (c) UU No.10 Tahun 1998 dengan tegas membuka kemungkinan bagi bank untuk melakukan kegiatan berdasarkan prinsip bagi hasil dengan nasabahnya baik untuk Bank Umum maupun BPR (Bank Perkreditan Rakyat).

Kegiatan pembiayaan bagi hasil tersebut kemudian oleh Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992, diperluas menjadi kegiatan apapun dari bank berdasarkan prinsip syariah yang ditetapkan oleh bank Indonesia. Kemudian di dalam UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia telah memberikan landasan hukum kepada Bank Indonesia untuk menerapkan kebijakan moneter berdasar prinsip Syariah; melakukan pengaturan

serta pengawasan terhadap perbankan berdasar prinsip syariah.

Peraturan Pemerintah No.70 Tahun 1992 tentang Bank Umum sebagaimana tertuang di dalam Pasal 5 ayat (3) bahwa :

Bank Umum yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil, dalam rancangan anggaran dasar dan rencana kerja harus secara tegas mencantumkan kegiatan usaha bank yang semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil.

Kemudian di dalam Peraturan Pemerintah No.72 tahun 1992 tentang Bank berdasarkan Prinsip Bagi Hasil di dalam Pasal 6 ayat (1), bahwa:

Bank Umum atau BPR yang kegiatan usahanya semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip Bagi Hasil.

Selanjutnya di dalam Keputusan Menteri Keuangan No.220/KMK.017/1993, tanggal 26 Pebruari 1993 tentang Bank Umum, Pasal 4 ayat (3) menyatakan :

Bagi Bank Umum berdasarkan prinsip Bagi Hasil dalam rancangan anggaran dasar dan rencana kerja harus mencantumkan secara jelas mengenai kegiatan usaha yang semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil.

### **1.3. Landasan Hukum Syariah**

Landasan hukum syariah sebagaimana tersirat didalam Al Qur'an, adalah sebagai berikut :

1. Surat Luqman :34 :

"Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok."

2. Surat Ali Imran : 130

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keuntungan".

3. Surat Ar-Ruum :39

"Dan suatu riba yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah....."

4. Al Baqarah :275-279

Orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan,..... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah.....

Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan RasulNya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

#### **1.4. Kegiatan Usaha Bank Syariah**

Bank Syariah ditinjau dari jenisnya ada 2 macam yaitu Bank Umum Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat

(BPR) syariah. Sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 28 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.32/34/Kep/DIR/tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum berdasarkan prinsip syariah, bahwa bank wajib menerapkan prinsip syariah dalam melakukan kegiatan usahanya meliputi :

a. Menghimpun dana dari masyarakat dengan bentuk simpanan, meliputi :

1. Giro berdasar prinsip wadi'ah

Sesuai dengan prinsip Al Wadiah, bank dapat menggunakan dana yang berasal dari giro dengan atau tanpa ijin dari nasabah untuk membiayai kegiatan operasi bank. Seluruh keuntungan atau manfaat yang diperoleh dari penggunaan giro tersebut menjadi hak milik bank, atas dasar kebijaksanaan bank dapat memberikan pembagian keuntungan kepada pemilik giro yang besarnya diserahkan kepada bank.

2. Tabungan berdasar prinsip wadiah atau mudharabah.

1. Deposito berjangka berdasar prinsip mudharabah

Simpanan yang penarikannya dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian, kepada deposan diberikan imbalan atas dasar pembagian keuntungan yang telah ditetapkan dan disetujui sebelumnya.

## 2. Penerimaan dana lainnya

Bank bagi hasil juga bisa menerima dana dari bank serta pihak lain atas dasar al Wadiah, Al Mudharabah atau Al Qard ul Hasan, yang berupa zakat, infaq, dan sodaqah (ZIS), yaitu:

- a. ZIS yang harus segera disalurkan, dalam hal ini Bank Bagi Hasil hanya bertindak sebagai penyalur;
- b. ZIS merupakan titipan dan Bank Bagi Hasil hanya bertindak sebagai pengelola dana tersebut, sedang waktu penyaluran terserah Bank Syariah.

## b. Melakukan penyaluran dana melalui :

### 1. Transaksi jual beli berdasar prinsip :

- a. Murabahah
- b. Istishna
- c. Ijarah
- d. Salam
- e. Jual beli lainnya



2. Pembiayaan Bagi Hasil berdasar ;

- a. Mudharabah
- b. Musyarakah
- c. Bagi hasil lainnya

3. Pembiayaan lainnya berdasar prinsip :

- a. hiwalah
  - b. Rahn
  - c. Qard
- c. Membeli, menjual dan atau menjamin risiko sendiri surat-surat berharga atas pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (*underlying transaction*) berdasarkan prinsip jual beli hiwalah.
- d. Membeli surat-surat berharga pemerintah dan atau Bank Indonesia yang diterbitkan atas dasar prinsip syariah.
- e. Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri dan atau nasabah berdasarkan prinsip wakalah.
- f. Menerima pembayaran tagihan atas surat-surat tagihan yang diterbitkan dengan melakukan perhitungan dengan atau pihak ketiga berdasarkan prinsip wakalah.
- g. Menyediakan tempat untuk penyimpanan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip wadi'ah yad amanah.
- h. Melakukan kegiatan penitipan, termasuk penata usahaannya untuk kepentingan pihak lain, berdasarkan suatu kontrak dengan prinsip wakalah.
- i. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lain dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek berdasarkan prinsip ujrah.
- j. Memberikan fasilitas Letter of credit (L/C) berdasarkan prinsip wakalah, murabahah, mudharabah, musyarakah, dan wadi'ah serta memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan prinsip kafalah.

- k. Melakukan kegiatan usaha kartu debit berdasarkan prinsip ujhr.
- l. Melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan prinsip wakalah.
- m. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan bank, sepanjang disetujui oleh Dewan Syariah Nasional.

Sedang untuk Bank Perkreditan Rakyat Syariah, sebagaimana tersebut dalam Pasal 27 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.32/36/KEP/DIR/tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat Syariah, menetapkan bahwa BPR Syariah wajib menerapkan prinsip syariah dalam melakukan kegiatan usahanya, meliputi :

- 1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, meliputi :
  - a. Tabungan berdasarkan prinsip wadiah atau mudharabah;
  - b. Deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah atau
  - c. Bentuk lain yang menggunakan prinsip wadiah atau mudharabah.
- 2. Melakukan penyaluran dana melalui :
  - a. transaksi jual beli berdasarkan prinsip:
    - 1. Murabahah,
    - 2. Istishna
    - 3. Ijarah
    - 4. Salam
    - 5. Jual Beli lainnya
  - b. Pembiayaan Bagi hasil berdasarkan prinsip:
    - 1. Mudharabah
    - 2. Musyarakah
    - 3. Bagi hasil lainnya

- c. Pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip:
1. Rahn
  2. Qardh
  3. Melakukan kegiatan lain sepanjang disetujui Dewan Syariah Nasional.

### **1.5. Prinsip-prinsip dalam kegiatan operasional Bank Syariah**

Kegiatan operasional Bank Syariah menurut Pedoman Bank Indonesia, didasarkan pada:<sup>47</sup>

#### **1. Prinsip Al Wadi'ah (simpanan)**

Al Wadi'ah merupakan perjanjian antara pemilik barang (termasuk uang) dengan penyimpanan (termasuk bank) di mana pihak penyimpan bersedia untuk menyimpan dan menjaga keselamatan barang yang dititipkan kepadanya. Sementara Muhammad<sup>48</sup> menyatakan bahwa al wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendaki.

Dalam hal ini terdapat 2 jenis al wadi'ah yaitu:

##### **1.1. Al Wadi'ah Amanah (titipan murni)**

Pihak penyimpan tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan atau kehilangan barang yang disimpan yang tidak diakibatkan oleh perbuatan atau kelalaian penyimpan.

##### **1.2. Al Wadi'ah Dhamanah (akad titipan)**

Pihak penyimpan dengan tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang yang dititipkan dan bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang yang disimpan.

---

<sup>47</sup> Dahlan Siarnat, *Manajemen Bank Bagi Hasil*, (Intermedia: Jakarta, 1995), hal. 124

<sup>48</sup> Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Islam*, (UII Press, Yogyakarta, 2000), hal. 7

Keberadaan prinsip wadi'ah ini didasarkan pada :

- (1) Al Qur'an Surat An Nisa (4) ayat 58, artinya:

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah (titipan) kepada yang berhak menerimanya.*

- (2) Surat Al Baqarah (2) ayat 283, yang artinya:

*.....Jika kedua belah pihak telah percaya mempercayai, maka hendaklah yang dipercayai (yang berhutang) itu menunaikan amanatnya, dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya.....*

- (3) Hadits Rasulullah saw, yang menyatakan:

*Tunaikanlah amanah kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat terhadap orang yang telah mengkhianatimu. (Abu Daud dan Tarmizi)*

Dari Ibnu Umar berkata, bahwasanya Rasulullah saw, telah bersabda :

*Tiada kesempurnaan iman bagi yang tidak beramanah, tiada sholat bagi yang tidak bersuci. (HR.Tabrani)*

- (4) Ijma'<sup>49</sup>

Para tokoh ulama Islam sepanjang zaman telah beijma' (konsensus) akan legitimasi al wadi'ah, karena kebutuhan manusia terhadapnya sebagaimana dikutip oleh Azzuhaily dalam Al-Figh Al Islami wa Adillatuhu dari Mughni wa syarh Kabir li Ibni Qudamah dan Al Mabsuth Li Imam Sarakhsy.

## 2. Prinsip Al-Mudharabah

Mudharabah diartikan sebagai suatu bentuk kemitraan (hubungan berserikat antara dua pihak, di mana di

---

<sup>49</sup> bid, hal.7-8

satu pihak akan menyediakan dana saja (shahibul maal), sedangkan di pihak lain memiliki keahlian akan melakukan pengelolaan usaha (mudharib). Dalam perjanjian ini pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu proyek usaha dan pengusaha untuk mengelola proyek tersebut dengan pembagian hasil sesuai dengan perjanjian. Pemilik modal tidak dibenarkan ikut dalam pengelolaan usaha, tetapi diperbolehkan membuat usulan dan melakukan pengawasan. Apabila usaha yang dibiayai mengalami kerugian, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal, kecuali apabila kerugian tersebut terjadi karena penyelewengan atau penyalahgunaan oleh pengusaha.

Keberadaan al-mudharabah didasarkan pada :

- (1) Al Qur'an Surat Al-Muzammil (73) ayat 20, artinya:

*.....Dan sebahagian dari mereka orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebahagian karunia Allah SWT.*

- (2) Hadits Rasulullah saw, yang berbunyi:

*Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahwasanya Sayyidan Abbas, jikalau memberikan dana kepada mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak yang berparu-paru basah. Jikalau menyalahi peraturan, maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah saw dan Beliau pun memperkenankannya.*

Dalam Hadits lain Rasulullah SAW menyatakan:

*Dari Suhaib r.a, bahwa Rasulullah bersabda : tiga perkara di dalamnya terdapat keberkatan (1) menjual dengan pembayaran kredit; (2) Muqaradnah (Mudharabah); (3) mencampur gandum*

dengan tepung untuk keperluan rumah dan bukan untuk dijual (HR. Ibnu Majah).

### 3. Prinsip Al- Musyarakah

Perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih pemilik modal (uang atau barang) untuk membiayai suatu usaha dimana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan persetujuan antara pihak-pihak tersebut sesuai dengan porsi penyertaan modal masing-masing dan berhak untuk ikut serta, mewakilkan dalam pelaksanaan atau manajemen usaha tersebut. Dalam hal terjadi kerugian, maka pembagian kerugian dilakukan sesuai dengan pangsa modal masing-masing.

Dasar hukum prinsip Musyarakah dapat dilihat dalam :

- (1) Al Qur'an Surat A-Shad (38) ayat 24 yang artinya:  
".....Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berkongsi itu sebagian mereka berbuat dzalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh ....."
- (2) Dalam Hadist Rasulullah SAW yang berbunyi :  
" Bahwa Rasulullah SAW telah berkata, saya menyertai dua pihak yang berkongsi selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati yang lainnya, seandainya berkhianat maka saya keluar dari pernyataan itu" (HR. Abu Daud).

### 4. Prinsip Al-Murabahah dan Al-Bai'bitsaman'ajil

Prinsip Murabahah (prinsip pengambilan keuntungan dengan pembayarna sekaligus atau tangguh) diartikan sebagai suatu jenis pembiayaan penuh yang merupakan talangan dana untuk pengadaan barang ditambah keuntungan yang disepakati dengan sistem pembayaran tangguh. Sedangkan prinsip Al-Bai'bitsaman'ajil (prinsip pengambilan keuntungan dengan pembayaran diangsur), diartikan sebagai suatu pembiayaan penuh yang merupakan talangan dana untuk pengadaan barang

ditambah keuntungan yang disepakati dengan sistem pembayaran diangsur.

Kedua prinsip ini dinyatakan dalam:

- (1) Al Qur'an Surat An-Nisa (4) ayat 29 yang artinya :

" Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta (hak) sesama dengan jalan curang (bathil), kecuali dengan cara perdagangan yang berlaku dengan sukarela (suka sama suka) diantara kamu ".

- (2) Hadits Rasulullah SAW, menyatakan:

Dari Suhaib r.a, bahwa Rasulullah bersabda: "tiga perkara di dalamnya terdapat keberkatan (1) menjual dengan pembayaran kredit; (2) Muqaradah (mudharabah); (3) mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan bukan untuk dijual". (HR. Ibnu Majah)

## 5. Prinsip Al Ijarah dan Al Bai'Takjiri

Prinsip al ijarah merupakan perjanjian antara pemilik barang dengan penyewa yang membolehkan penyewa untuk memanfaatkan barang tersebut dengan membayar sewa sesuai dengan persetujuan kedua pihak. Setelah masa sewa berakhir, maka barang akan dikembalikan kepada pemilik.

Sedangkan Al Bai'Takjiri merupakan perjanjian antara pemilik barang dengan penyewa yang membolehkan penyewa untuk memanfaatkan barang tersebut dengan membayar sewa sesuai dengan persetujuan kedua pihak. Setelah berakhir masa sewa, maka pemilik barang menjual barang tersebut kepada penyewa dengan harga yang disetujui kedua belah pihak.

Dasar hukum yang melandasinya :

- (1) Al Qur'an Surat Al Qashas (28) ayat 26 yang artinya :

"Salah seorang dari kedua gadis itu berkata: "Wahai bapakku ambillah ia sebagai

orang yang bekerja dengan kita, karena sesungguhnya orang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".

(2) Surat At-Thalaq (65) ayat 6, artinya:

"Selanjutnya jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya".

(3) Dalam Sunah Nabi Muhammad SAW, dari Ibnu Umar r.a, bahwa Rasulullah saw bersabda:

Berikanlah upah (sewa) buruh itu sebelum kering keringatnya (HR. Ibnu Majah)

Dalam Hadits yang lain dinyatakan bahwa Abi Sais Al Hudri r.a, Rasulullah saw, telah bersabda:

"Barang siapa memperkerjakan pekerja hendaklah menjelaskan upahnya " (HR. Baihaqi).

#### 6. Prinsip Al Qardh ul Hasan

Prinsip ini merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang atau barang dengan tujuan untuk membantu penerima pinjaman. Penerima pinjaman wajib mengembalikan hutangnya dalam jumlah yang sama dan apabila peminjam tidak mampu mengembalikan pada waktunya, maka peminjam tidak boleh dikenai sanksi. Atas kerelaannya, peminjam diperbolehkan memberikan imbalan kepada pemilik uang atau barang.

Keberadaan lembaga ini mendasarkan pada :

(1) Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 245, artinya:

"Siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah SWT pinjaman yang baik, maka Allah SWT akan melipatgandakan pembayarannya kepadanya dengan lipat ganda yang banyak".

(2) Hadits Rasulullah SAW, sebagai berikut:



"Dari Ibnu Mas'ud r.a, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Tidaklah seorang muslim meminjamkan dua kali, kecuali sama baginya dengan memberi sekali". Kemudian dalam Hadits lain Rasulullah SAW bersabda: "barang siapa telah melepaskan saudaranya yang muslim satu dari kesusahan dunia, maka Allah SWT akan melepaskan satu kesusahan di yaumul kiamat. Barang siapa telah membantu saudaranya yang sulit atau lemah di dunia, maka Allah SWT akan membantu seorang hamba, selama hamba tersebut membantu saudaranya". (HR.Muslim)

## 7. Prinsip Al Kafalah

Al-kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lainnya dimana pihak pemberi jaminan bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu hutang atau pelaksanaan prestasi tertentu yang menjadi hak penerima jaminan. Al-Kafalah dapat dikatakan merupakan lembaga jaminan perorangan didalam syariah, keberadaannya didasarkan pada:

- (1) Al Qur'an surat Yusuf (12) ayat 72, artinya:

Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makan (seberat) beban unta, dan aku akan menjamin terhadapnya".

- (2) Sunnah Nabi Muhammad SAW, menceritakan:

Rasulullah telah dihadapkan kepadanya mayat seorang laki-laki untuk disembahyangkan. Rasulullah SAW bertanya, apakah ia mempunyai warisan, sahabat menjawab tidak, Rasulullah bertanya lagi, apakah ia mempunyai hutang ?, sahabat menjawab ya, dua dinar. Rasulullahpun menyuruh para sahabat untuk mensholatkannya (tetapi Beliau sendiri tidak). Dalam pada itu Abu Qatadah berkata:

Saya menjamin hutangnya ya Rasulullah, maka Rasulullahpun mensholatkannya. (HR.Bukhari)

## 8. Prinsip Al Hiwalah

Prinsip ini adalah pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Prinsip ini merupakan lembaga pemberi fasilitas dalam bentuk pengalihan tagihan dalam syariah, yang keberadaannya didasarkan pada:

(1) Hadits Rasulullah SAW, berbunyi:

Dari Abu Hurairah r.a, bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: "Menunda-nunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah suatu bentuk kezaliman, apabila salah seorang diantaranya diminta untuk dialihkan pembayaran hutangnya kepada yang berkemampuan, maka terimalah". (hR. Bukhari dan Muslim).

(2) Berdasarkan metodologi usul fiqh, hiwalah dapat diqiyaskan dengan al Kafalah, karena kafalah berarti merupakan jaminan yang diberikan penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.

## 9. Prinsip Al Rahn<sup>50</sup>

Prinsip ini merupakan suatu lembaga jaminan dalam syariah, yang muncul berdasarkan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan dari fasilitas pembiayaan yang diberikan.

Keberadaan lembaga ini didasarkan pada:

(1) Al Qur'an surat Al Baqarah (2) ayat 283, artinya:

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai), sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang.

---

<sup>50</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Pustaka Utama, Grafiti: Jakarta, 1999), hal.76

- (2) Sunnah Nabi Muhammad SAW, yang menceritakan bahwa "Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menjadikan baju besinya sebagai barang jaminan". (HR. Bukhari dan Muslim)

#### 10 Prinsip Al Wakalah

Prinsip ini merupakan suatu lembaga pemberian kuasa kepada pihak lain yang ditunjuk untuk mewakilinya dalam melaksanakan suatu tugas atau kerja atas nama pemberi kuasa.

Keberadaan lembaga ini didasarkan pada :

- (1) Al Qur'an Surat Al Khafi (18) ayat (19) , artinya:

*"Maka suruhlah salah seorang diantara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini"*

- (2) Al Qur'an surat An-Nisa (4) ayat 35, artinya:

*Maka jikalau kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan.*

- (3) Dalam sunnah Nabi Muhammad SAW:

*"Dikabarkan bahwa Rasulullah SAW telah membantu assah untuk mengumpulkan zakat, Urwah bin Umayyah untuk menjadi wali dalam pernikahan Beliau dengan Umu Habibah binti Maimunah binti Haris, Hakim bin Hajam dikala membeli ternak kurban" (HR. Bukhari dan Muslim).*

#### 11. Prinsip Sharf

Prinsip ini merupakan suatu lembaga perjanjian jual beli uang dengan uang yang sejenis. Apabila yang diperjualbelikan adalah mata uang yang sama, maka nilai mata uang tersebut haruslah sama, dan penyerahan juga dilakukan pada waktu yang sama.

Keberadaan lembaga ini didasarkan pada :

(1) Hadits Rasulullah SAW, menyatakan:

*Jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, anggur dengan anggur, apabila suatu jenis (harus) sama (kualitas dan kuantitasnya) dan dilakukan secara tunai. (HR. Jamaah)*

(2) Dalam riwayat Abu Sai'id Al Khuduri, dinyatakan, bahwa apabila nilai tukar yang diperjual belikan itu dalam jenis yang sama. Maka tidak boleh ada penambahan pada satu jenisnya. (HR. Bukhari dan Muslim).

## **2. Prinsip Bagi Hasil Dalam Kegiatan Bank Syariah**

Bank Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya, menetapkan imbalan jasa yang diterima nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil, dikenal dengan istilah bank tanpa bunga. Berbeda dengan bank konvensional yang kita kenal selama ini, imbalan jasa yang diterima berupa bunga.

Perbedaan bagi hasil dengan bunga, adalah sebagai berikut :

1. Pada bank konvensional dengan sistem bunga:

- a) Penentuan bunga pada saat akad, dengan asumsi selalu untung;
- b) Prosentase bunga berdasarkan jumlah pinjaman;
- c) Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat;
- d) Eksistensi bunga diragukan semua agama termasuk Islam.

2. Pada Bank syariah dengan prinsip bagi hasil :

- a) Penentuan rasio/nisbah bagi hasil pada saat akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung/rugi;
  - b) Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan keuntungan;
  - c) Bagi hasil tergantung keuntungan proyek yang dijalankan;
  - d) Pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan pendapatan;
- Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

### **2.1. Pengertian Bagi Hasil**

Pengertian bagi hasil sebagaimana tersirat dalam syari'at adalah suatu sistem bagi hasil (*profit sharing/mudharabah*), di mana kedua belah pihak, akan berbagi keuntungan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, jika terjadi kerugian, maka ditanggung oleh pemilik modal.<sup>51</sup>

Terminologi Bank Islam atau *Islamic Banking* secara yuridis tidak dikenal dalam konstelasi hukum formal Indonesia, Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 menggunakan terminologi bank berdasarkan prinsip bagi hasil.

### **2.2. Pengaturan Hukum Positif Prinsip Bagi Hasil**

Pengaturan hukum positif prinsip bagi hasil dalam

---

<sup>51</sup> Yusuf Qurdhow, penerjemah Daud Rasyid, *Bank Tanpa Bunga*, (Usamah Press, UNAS Jakarta, 2001), hal.26

pembiayaan terhadap nasabah sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 6 huruf (m) UU No.7

Tahun 1992, bahwa :

Bank menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah.

Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, dibutuhkan peraturan pelaksanaannya yaitu sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 1992 tentang Bank Bagi Hasil, Pasal 1 ayat (1) :

Bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah bank umum atau bank perkreditan rakyat yang melakukan kegiatan usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil.

Apa yang dimaksud dengan prinsip bagi hasil dalam Pasal di atas, dijelaskan di dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan pemerintah tersebut menjelaskan bahwa :

prinsip bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 adalah prinsip bagi hasil berdasarkan syariat yang digunakan oleh bank berdasarkan prinsip bagi hasil dalam :

- a. menetapkan imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan penggunaan /pemanfaatan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya;
- b. menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik untuk keperluan investasi maupun modal kerja;

- c. menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan usaha lainnya yang lazim dilakukan oleh bank dengan prinsip bagi hasil.

### **2.3. Prinsip-prinsip bank bagi hasil**

Secara umum, prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama,<sup>52</sup> yaitu *al-musyarakah*, *al-mudharabah*, *al-muzara'ah* dan *al-musaqah*. Namun prinsip bagi hasil yang sering dipakai adalah *al-musyarakah*, dan *al-mudharabah*, sedang *al-muzara'ah* dan *al-musaqah* dipergunakan secara khusus untuk *plantation financing* atau pembiayaan pertanian oleh beberapa bank Islam.

#### **1. Prinsip Al-Mudharabah**

##### **1.1. Pengertian Al-Mudharabah**

*Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.<sup>53</sup>

Pengertian *al-mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul*

---

<sup>52</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, (Gema Insani: Jakarta, 2001), hal.9

<sup>53</sup> Muhammad Rawas Qal'aji, dalam M.Syafi'I Antonio, *ibid*, hal. 95

*maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Apabila kerugian tersebut akibat dari kelalaian atau kecurangan pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>54</sup>

*Mudharabah* dapat juga diartikan sebagai suatu bentuk kemitraan (hubungan berseikat) antara dua pihak, di mana di satu pihak akan menyediakan dana saja (*shahibul-mal*), sedangkan di pihak lain yang memiliki keahlian akan melakukan pengelolaan usaha (*Mudharib*). Dalam perjanjian ini pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu proyek atau usaha dan pengusaha untuk mengelola proyek tersebut dengan pembagian hasil sesuai dengan perjanjian. Pemilik modal tidak dibenarkan ikut dalam pengelolaan usaha, tetapi diperbolehkan membuat usulan dan melakukan pengawasan. Apabila usaha yang dibiayai mengalami kerugian, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal, kecuali

---

<sup>54</sup> Ibid, hal 9



apabila kerugian tersebut terjadi karena penyelewengan atau penyalahgunaan oleh pengusaha.

## 1.2. Landasan Syariah

Landasan dasar syariah *Al-Mudharabah* mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat Al Qur'an dan Al-Hadits, berikut ini:

### a. Al Qur'an :

- (1) Al Qur'an Surat Al-Muzammil (73) ayat 20 yang artinya :

"... Dan sebahagian dari mereka orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebahagian karunia Allah SWT"

- (2) Al Qur'an Surat al-Jumu'ah:10) yang artinya :

"Apabila telah ditunaikan sholat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT....."

### b. Hadits Rasulullah SAW, :

- (1) Hadits Rasulullah SAW :

'Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahwasanya Sayyidina Abbas, jikalau memberikan dana kepada mitra usahanya secara *mudharabah* ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak yang berparu-paru basah. Jikalau menyalahi peraturan, maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Beliaupun memperkenankannya".

(2) Dalam Hadits lain Rasulullah SAW menyatakan:

"Dari Suhaib r.a, bahwa Rasulullah bersabda: "tiga perkara didalamnya terdapat keberkatan (1) menjual dengan pembayaran kredit; (2) *Muqaradhah* (*Mudharabah*); (3) mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan bukan untuk dijual" (HR. Ibnu Majah No. 2280, Kitab at-Tijarah).

#### c. Ijma

Imam Zailai<sup>55</sup> telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara *mudharabah*.

### 1.3. Jenis-jenis Al-Mudharabah

Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

#### a. *Mudharabah muthlaqah* :

Transaksi *mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqh ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if al ma syi'ta* (lakukanlah

---

<sup>55</sup> Nasbu ar-Rayah IV, dalam M. Safi'i Antonio, Ibid, hal 96

sesukamu) dari *shahibul maal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar.<sup>56</sup>

b. *Mudharabah Muqayyadah* :

*Mudharabah muqayyadah* atau disebut istilah *restricted mudharabah / specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Dalam hal ini *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha.

Mahmoud al-Anshari, membedakan prinsip *mudharabah* ini dalam beberapa jenis, yaitu :<sup>57</sup>

- a. *Mudharabah khusus* yaitu pemberian dana oleh seseorang, sementara itu usaha *mudharabah* dilakukan oleh seorang, sebagai individu atau badan hukum;
- b. *Mudharabah bersekat*, yaitu dalam hal ini bank-bank menerima dana dari berbagai sumber untuk kemudian dipergunakan dalam bentuk *mudharabah*.
- c. *Mudharabah mutlak*, yaitu penerima dana (*mudharib*) memiliki kebebasan untuk mempergunakan dana yang diterimanya tanpa ada persyaratan-persyaratan tertentu dari pemilik dana, misalnya bentuk

---

<sup>56</sup> Ibid, hal.97

<sup>57</sup> Mahmoud al Anshari, *Perbankan Islam, terjemahan* Minaret 1993, hal.96

perdagangan atau usaha lainnya, waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan. Mudharib dalam hal ini menjamin pemeliharaan dan keamanan dana yang dikelolanya disamping mendapat keuntungan.

- d. *Mudharabah bersyarat*, yaitu kebalikan dari mudharabah mutlak di mana pemilik dana menentukan syarat-syarat yang harus dipatuhi oleh mudharib dalam pengelolaan dana yang diterimanya.

#### **1.4. Manfaat dan Risiko Al-Mudharabah**

Manfaat al- Mudharabah :

- (a) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat;
- (b) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*;
- (c) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak
- (d) memberatkan nasabah;
- (e) Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan

menguntungkan karena keuntungan yang benar-benar terjadi itu yang akan dibagikan;

- (f) Prinsip bagi hasil mudharabah maupun musyarakah berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

Risiko yang terdapat dalam al-mudharabah, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi, yaitu:

- (a). *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang tersebut dalam kontrak;
- (b). Lalai dan kesalahan yang disengaja;
- (c). Penyembuyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.

## **2. Prinsip Al-Musyarakah**

### **2.1. Pengertian Al-Musyarakah**

*Al-musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan

dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>58</sup>

Sistem *musyarakah* ini merupakan konsep dasar bank syariah, dalam hal ini hubungan yang terjadi antara bank dan nasabah merupakan hubungan kerjasama bukan hubungan sebagai kreditur dan debitur sebagaimana halnya dalam praktek bank-bank konvensional.

## 2.2. Landasan Syariah

Dasar hukum prinsip *Musyarakah* dapat dilihat dalam:

- (1) Al Qur'an Surat A-Shad (38) ayat 24 yang artinya :

".....Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berkongsi itu sebagian mereka berbuat dzalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh..."

- (2) Dalam Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

"Bahwa Rasulullah SAW telah berkata, saya menyertai dua pihak yang berkongsi selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati yang lainnya, seandainya berkhianat maka saya keluar dari pernyataan itu " (HR. Abu Daud).

- (3) Ijma :

Ibnu Qudamah dalam kitabnya, *al-Mughni*,<sup>59</sup> telah berkata, "Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi *musyarakah*

---

<sup>58</sup> Bidayatul Mujtahid II dalam M. Syafi'i Antonio, ibid, hal.90

<sup>59</sup> Abdullah Ibn Qudamah, *Mughni wa Syarh Kabir*, dalam M. Syafi'i Antonio, ibid, hal.91

secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen.

### 2.3. Jenis-jenis Al-Musyarakah

Pembiayaan bagi hasil secara musyarakah, ada dua jenis, yaitu *musyarakah pemilikan* dan *musyarakah akad* (kontrak). Musyarakah pemilikan tercipta karena warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan aset oleh dua orang atau lebih dengan berbagi keuntungan dari hasil aset tersebut. Sedang musyarakah akad tercipta dengan cara kesepakatan di mana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah, sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.

*Musyarakah akad* terbagi menjadi :

(a) Syirkah al-*'Inan*

Syirkah al-*'Inan* adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua belah pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati bersama;

(b) Syirkah Mufawadhah

Syirkah mufawadhah adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih dimana setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama.

(c) Syirkah A'maal

Al-musyarakah jenis ini adalah kontrak kerjasama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan tersebut.

(d) Syirkah Wujuh

Syirkah wujuh adalah suatu kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis. Dalam usaha tersebut, mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Dalam kesepakatan tersebut mereka berbagi keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Abu Bakar Ibn Mas'ud al-Kasani dalam M.Syafi'i Antonio, ibid, hal.93



#### 2.4. Manfaat dan Risiko Al-Musyarakah

Manfaat dari pembiayaan secara Musyarakah diantaranya adalah sebagai berikut :

- (a) Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- (b) Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan /hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami negative spread;
- (c) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow/ arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah;
- (d) Bank akan lebih selektif dan hati-hati (prudent) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang benar-benar terjadi itu yang akan dibagikan;
- (e) Prinsip bagi hasil mudharabah maupun musyarakah berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang

dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

Risiko yang terdapat dalam al-musyarakah, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi, yaitu:

- (a). *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang tersebut dalam kontrak;
- (b). Lalai dan kesalahan yang disengaja;
- (c). Penyembuyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.

### **3. Sistem Pembiayaan Bank Syariah**

Pengaturan hukum positif terkait dengan pembiayaan terhadap nasabah berdasar prinsip bagi hasil sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 ayat(12) UU No.10 Tahun 1998, bahwa :

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil keuntungan.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk

memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*.<sup>61</sup>

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal, :

1. Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
2. Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dibagi sebagai berikut :

- a. Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan yaitu baik untuk peningkatan produksi maupun untuk keperluan perdagangan.
- b. Pembiayaan investasi yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal serta fasilitas.

Bank syariah dapat membantu memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja tersebut bukan dengan meminjamkan uang, melainkan dengan menjalin hubungan *partnership*

---

<sup>61</sup> Rifaat Ahmad Abdul Karim dalam Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dalam Teori dan Praktek*, (Gema Insani, Jakarta:2001), hal.160

dengan nasabah, di mana bank bertindak sebagai pihak penyandang dana (*shahibul maal*), sedangkan nasabah sebagai pengusaha (*mudharib*). Fasilitas ini dapat diberikan untuk jangka waktu tertentu, sedangkan bagi hasil dibagi secara periodik dengan nisbah yang disepakati. Setelah jatuh tempo, nasabah mengembalikan jumlah dana tersebut beserta porsi bagi hasil (yang belum dibagikan) yang menjadi bagian bank.

#### **C.HUBUNGAN HUKUM ANTARA PIHAK BANK DENGAN NASABAH DALAM PENERAPAN PEMBIAYAAN BERDASAR PRINSIP BAGI HASIL**

Prinsip bagi hasil menurut syariah yang sering dipakai adalah *al-mudharabah* dan *al-musyarakah*. Perjanjian *al-mudharabah* maupun *al-musyarakah* ini keberadaannya di atur di dalam hukum positif sebagaimana tertuang didalam di dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.72 tahun 1992 menjelaskan bahwa:

prinsip bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 PP No.72 tahun 1992 adalah prinsip bagi hasil berdasarkan syariat yang digunakan oleh bank berdasarkan prinsip bagi hasil dalam :

- a. menetapkan imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan penggunaan /pemanfaatan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya;

- b. menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik untuk keperluan investasi maupun modal kerja;
- c. menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan usaha lainnya yang lazim dilakukan oleh bank dengan prinsip bagi hasil.

Kemudian diatur lebih lanjut di dalam Pasal 3 PP

No.72 Tahun 1992, bahwa :

Penetapan besarnya bagi hasil antara bank berdasarkan prinsip bagi hasil dengan nasabahnya didasarkan pada kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian tertulis antara kedua belah pihak.

Di dalam suatu hubungan hukum akan menimbulkan aspek-aspek hukum yang merupakan unsur esensiil dalam memecahkan suatu permasalahan. Demikian juga hubungan hukum yang terjadi antara Bank Syariah dan nasabahnya, maka muncul pertanyaan hukum apakah yang akan diberlakukan dalam hal terjadi sengketa antara Bank Syariah yang bersangkutan dengan nasabah pengguna jasa Bank Syariah.

Sutan Remy Sjahdeini mengemukakan<sup>62</sup> bahwa hubungan hukum antara Bank Syariah dengan nasabah dalam hal terjadi sengketa, diberlakukan hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam KUHPerdara, karena KUHPerdara merupakan hukum positif.

---

<sup>62</sup> Sutan Remy Sjahdeini dalam Neni Sri Imaniati, *Kesiapan Hukum Ekonomi Indonesia Dalam Mengantisipasi Perbankan Syariah*, (Seminar Nasional, UNISBA, Bandung, 2000), hal.10

Ditinjau dari aspek hukum perdata, ada beberapa unsur-unsur pokok yang melandasi pembiayaan terhadap nasabah dengan penerapan prinsip bagi hasil, yaitu Pasal 1320 KUHPERdata mengatur tentang syarat sahnya perjanjian. Disamping itu, hukum perjanjian menentukan bahwa isi perjanjian adalah sah, apabila tidak bertentangan dengan undang-undang, kepatutan, dan ketertiban umum, serta dibuat dan dilaksanakan dengan itikad baik oleh para pihak yang membuatnya.

Dalam hukum perjanjian berlaku asas kebebasan berkontrak (pasal 1338 KUHPERDATA). Berdasarkan asas kebebasan berkontrak para pihak bebas memperjanjikan apa saja yang dikehendaki oleh mereka sebagai isi perjanjian, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang kepatutan dan ketertiban umum.

#### **1. Hubungan hukum antara Bank (*shahibul maal*) dengan nasabah berdasar perjanjian *al mudharabah***

Perjanjian *Mudharabah*, adalah suatu kegiatan perbankan Islam yang merupakan *trust finance* atau pembiayaan berdasarkan kepercayaan.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Adi Bastian Salam, *Kedudukan Perbankan Islam Dalam Tata Hukum Perbankan*

*Indonesia*, (Jurnal Penelitian Hukum, Edisi X Januari, 2000, Bangkulu), hal.18

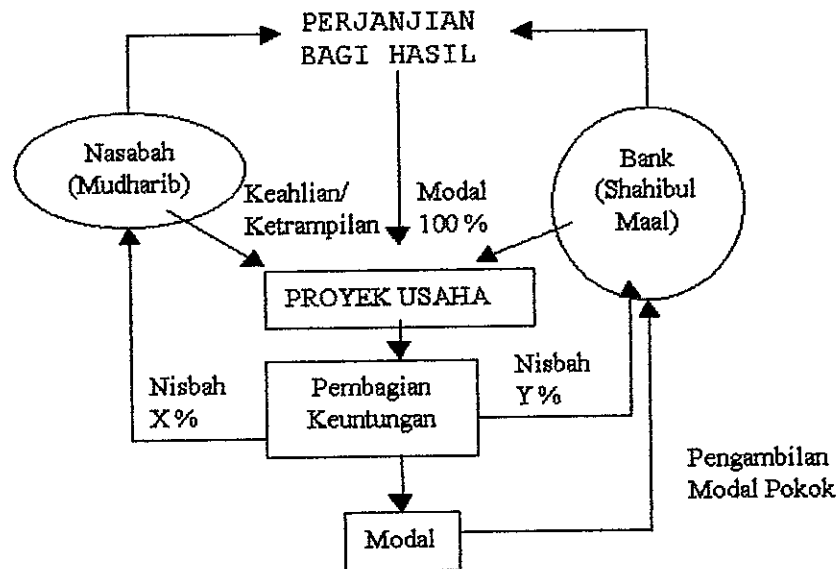
Dalam terminologi hukum, *mudharabah* adalah suatu kontrak, di mana suatu kekayaan atau persediaan stok tertentu ditawarkan oleh pemiliknya atau pengurusnya kepada pihak lain, untuk membentuk suatu kemitraan, di mana kedua pihak akan berbagi keuntungan. Dengan kata lain *Al-mudharabah* adalah suatu bentuk kontrak kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100 %) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*).

Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedang apabila rugi ditanggung pemilik modal selama kerugian bukan akibat kelalaian pengelola, sebaliknya apabila pengelola lalai harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Secara umum perjanjian *al-mudharabah* dapat digambarkan dalam skema berikut ini :

Gambar 1.

Skema al-mudharabah



Prinsip bagi hasil berdasar perjanjian al-mudharabah sebagaimana tersebut dalam skema di atas, menunjukkan suatu hubungan hukum antara dua pihak yaitu pihak bank (*shahibul maal*) sebagai penyedia dana dengan nasabah (*mudharib*) sebagai pihak pengelola dana. Hubungan hukum tersebut akan menimbulkan akibat hukum yaitu adanya hak dan kewajiban maupun tanggung jawab pada masing-masing pihak.

Aspek-aspek hukum prinsip bagi hasil berdasar perjanjian al-mudharabah, terkait dengan pembiayaan terhadap nasabah yaitu dapat tercermin dari hak dan kewajiban masing-masing pihak yaitu pihak bank



(shahibul maal) dengan pihak nasabah pengelola dana (mudharib), adalah sebagai berikut :

1) Hak dan kewajiban Bank (*Shahibul maal*) yaitu:

- (a) berkewajiban menyediakan seluruh dana yang diperlukan mudharib (pengelola usaha);
- (b) berkewajiban menanggung kerugian sebesar pembiayaan yang disediakan;
- (c) berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan nisbah yang disepakati;
- (d) berhak untuk membuat usulan dan pengawasan.

2). Hak dan kewajiban Mudharib, yaitu :

- (a) berkewajiban untuk melakukan pengelolaan usaha;
- (b) berkewajiban menanggung kerugian managerial skill, dan waktu, serta kehilangan nisbah keuntungan bagi hasil yang akan diperolehnya;
- (c) berhak mengelola usaha tanpa campur tangan pihak bank;
- (d) berhak mendapatkan keuntungan berdasarkan pembagian hasil sesuai yang disepakati.

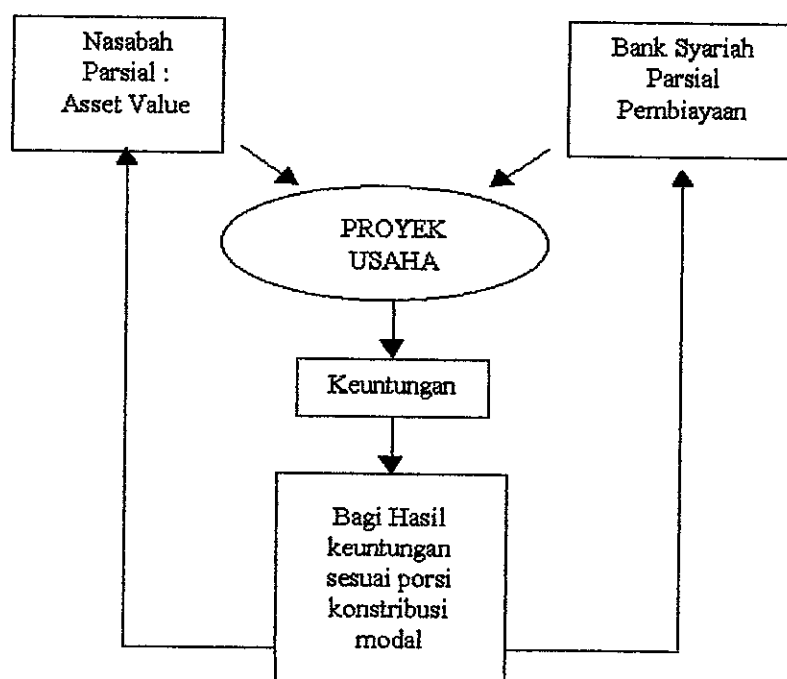
**2. Hubungan hukum antara bank dengan nasabah dengan berdasar perjanjian al-musyarakah**

Perjanjian *musyarakah* yaitu pembiayaan dengan penyertaan modal, di mana dua atau lebih mitra berkontribusi untuk memberikan modal suatu investasi.

Dengan kata lain *al-musyarakah* merupakan perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih pemilik modal (uang atau barang) untuk membiayai suatu usaha di mana masing-masing pihak berhak atas segala sesuatu keuntungan dari usaha tersebut dibagi berdasar persetujuan sesuai porsi masing-masing.

Secara umum, perjanjian *al-musyarakah* dapat digambarkan dalam skema berikut ini :

**Gambar 2. Skema al-musyarakah**



Prinsip bagi hasil berdasar perjanjian *al-musyarakah* sebagaimana tersebut di atas, menunjukkan suatu hubungan hukum antara dua pihak yaitu pihak bank (*shahibul maal*) sebagai penyedia dana dengan nasabah (*mudharib*) sebagai pihak pengelola dana. Hubungan hukum tersebut akan menimbulkan akibat hukum yaitu adanya hak dan kewajiban maupun tanggung jawab pada masing-masing pihak.

Aspek-aspek hukum prinsip bagi hasil berdasar perjanjian *al-musyarakah*, terkait dengan pembiayaan terhadap nasabah yaitu dapat tercermin dari hak dan kewajiban masing-masing pihak yaitu pihak bank (*shahibul maal*) dengan pihak nasabah pengelola dana (*mudharib*), adalah sebagai berikut :

1. Hak dan kewajiban bank (*shahibul maal*):

- a) berkewajiban membiayai suatu usaha ;
- b) berkewajiban menanggung kerugian hanya terbatas sampai batas modal yang disetorkan;
- c) berhak ikut serta, mewakilkan atau menggugurkan haknya dalam manajemen proyek;
- d) berhak mendapatkan keuntungan dari hasil usaha bersama menurut porsi penyertaan modal masing-masing sesuai kesepakatan;

e) berhak untuk berpartisipasi dalam manajemen perusahaan.

2. Hak dan kewajiban mudharib, yaitu :

a) berkewajiban memberikan kontribusi dana atau menyertakan modalnya pada suatu usaha;

b) berkewajiban menanggung kerugian hanya terbatas sampai batas modal yang disetorkan;

c) berhak untuk ikut serta, mewakilkan atau menggugurkan haknya dalam manajemen proyek;

d) berhak untuk mendapatkan keuntungan dari hasil usaha bersama menurut porsi penyertaan modal masing-masing sesuai kesepakatan;

e) berhak untuk berpartisipasi dalam manajemen perusahaan.

Sekalipun prinsip atau ketentuan syariah bukan merupakan hukum positif, tetapi prinsip atau ketentuan syariah berkedudukan sebagai hukum kebiasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1347 KUHPerdata. Oleh karena itu berlaku terhadap hubungan hukum antara bank dan nasabahnya sepanjang belum diatur dalam perjanjian

dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang memaksa dalam hukum perjanjian (asas kebiasaan).<sup>64</sup>

Menurut Pasal 1347 KUHPerdara, hal-hal yang menurut kebiasaan yang selamanya diperjanjikan secara diam-diam, dianggap telah dimasukkan pula ke dalam perjanjian itu, meskipun hal yang demikian itu tidak secara tegas dinyatakan dalam perjanjian.

Mengkaji dari aspek hukum jaminan, Pembiayaan terhadap nasabah dengan penerapan prinsip bagi hasil, sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (23) UU No.10 Tahun 1998 yang menyebutkan bahwa:

Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasar prinsip syariah.

Ketentuan tersebut di atas, menunjukkan bahwa agunan atau jaminan di berlakukan dalam penerapan prinsip bagi hasil dalam pembiayaan terhadap nasabah.

Secara umum Undang-undang sudah mengatur tentang jaminan yang dikenal dengan asas umum hukum jaminan, sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1131 Dalam KUHPerdara, bahwa:

Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun

---

<sup>64</sup> Sutan Remy Sjahdeini dalam Neni Sri Imaniati, op.cit, hal.11

yang akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan.

Pembiayaan berdasar prinsip bagi hasil, mengandung risiko, sehingga perlunya bank syariah menambahkan adanya agunan sebagai jaminan. Sebagaimana tersirat di dalam Al Qur'an surat Al-Baqarah ayat 283 :

*"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang".*

Disamping harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasar prinsip syariah, dalam arti keyakinan atau kesanggupan nasabah untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Profil Bank Muamalat Semarang**

1. Sejarah berdirinya Bank Muamalat Indonesia (cabang Semarang)

Bank Muamalat Semarang merupakan cabang dari Bank Muamalat Indonesia yang berkantor pusat di Jakarta. Bank Muamalat cabang Semarang berdiri sejak tahun 1995, sampai saat ini tahun 2003 bank Muamalat Semarang, memiliki kantor kas di Semarang sebanyak tiga buah yaitu kantor kas yang berada di Kampus Unisulla, Kauman, dan Banyumanik.

Bank Muamalat Semarang merupakan cabang dari Bank Muamalat Indonesia, lahir sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI dengan Akte pendirian PT.Bank Muamalat Indonesia yang ditandatangani tanggal 1 Nopember 1991, dan mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992. Pada saat penandatangan akte pendirian ini, terkumpul komitmen pembelian saham sebanyak Rp.84 milyar. Sampai saat ini Bank Muamalat Indonesia telah memiliki lebih dari 45

outlet yang tersebar di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Balikpapan dan Makasar.<sup>65</sup>

Bank Muamalat Indonesia (cabang Semarang) mendapatkan legalitas institusional sejalan dengan diberlakukannya UU No.7 Tahun 1992 (Pasal 6 huruf m), yang selanjutnya diikuti dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah No.72 tahun 1992, kemudian dilanjutkan dengan diberlakukannya UU No.10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No.7 Tahun 1992, kemudian berlaku UU No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

## 2. Kegiatan Bank Muamalat Semarang

Secara umum operasional Bank Muamalat Cabang Semarang dapat dikategorikan ke dalam beberapa bagian:<sup>66</sup>

1. Tabungan, Giro dan deposito
2. Pembiayaan
3. Pembiayaan perdagangan
4. Pelayanan lain

Keempat jenis operasional ini dilaksanakan mengikuti prinsip dan kontrak-kontrak syariah Islam. Apabila diperhatikan setiap jenis operasional ini, maka boleh saja melahirkan berbagai produk, dan yang paling

---

<sup>65</sup> Bank Muamalat, *Annual Report*, (Jakarta, 1999).

<sup>66</sup> Wawancara dengan Marsudi Sapto Cahyono, Ass. Account Manager, tanggal 6-1-2003



penting masing-masing jenis pengoperasian dan produknya

tidak boleh keluar dari prinsip syariah.

1. Tabungan, giro, deposito

Bank Muamalat Indonesia cabang Semarang menerima deposit dari nasabah melalui beberapa jenis rekening,

diantaranya :

a. Rekening giro

b. Rekening tabungan mudharabah;

c. Deposito mudharabah mutlagah;

d. Deposito mudharabah muqayyadah.

Rekening tersebut di atas, dioperasikan dengan kontrak wadiah dan mudharabah.

Dalam pengoperasiannya memakai instrumen kontrak wadiah, yang dimaksud dengan wadiah adalah mewakilkan kepada orang lain untuk memelihara hak milik. Simpanan giro ini pada dasarnya adalah titipan dana yang tiap waktu dapat ditarik pemiliknya dengan cara mengeluarkan cek, pemindahbukuan atau transfer dan perintah membayar lainnya. Pada simpanan giro ini dikenakan biaya administrasi. Namun karena dana yang tersimpan di bank dizinkan untuk diputar oleh bank, maka kepada penyimpan dana dapat diberikan semacam bonus atau jasa

giro, sesuai dengan jumlah dana yang ikut berperan dalam pembentukan laba bank.

Selanjutnya, Bank Muamalat dalam pengoperasiannya juga memakai instrumen kontrak *Mudharabah*. *Mudharabah* merupakan simpanan pemilik dana bank yang hanya dapat ditarik dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian. Dalam pengoperasiannya ada dua bentuk, pertama bank diberi kebebasan untuk menginvestasikan di mana saja yang dapat memberi keuntungan. Dalam hal ini bank sebenarnya berfungsi sebagai perantara antara pemodal dan perusahaan. Sebagai perantara bank berhak mendapat persentase khusus dari *Mudharabah* yang dilaksanakan. Pada dasarnya pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan antara perusahaan dan pemodal, yang penting persentasenya ditetapkan dari awal.

Sistem pembagian keuntungan dalam *Mudharabah* ini mengikuti etika dan prinsip perdagangan Islam. Jadi, patokannya bukanlah keadaan bunga yang berlaku pada waktu itu. Di sini Dewan Pengawas Syariah berfungsi secara penuh, agar tidak terjadi penyalahgunaan dalam pelaksanaan *Mudharabah*. Adanya pengawasan yang ketat dari Dewan Pengawas Syariah akan memberikan kepercayaan kepada nasabah, sehingga mereka tidak ragu tentang

penyimpan dana sebanding dengan besarnya bagian laba menentukan besarnya pembagian laba yang akan diperoleh pembentukkan laba bank. Dengan demikian variabel yang perhitungan yang sesuai dengan peranan dananya dalam penyimpanan dana, dan 25 % untuk bank), berdasarkan mendapatkan bagian laba yang diperoleh bank (75 % untuk melainkan kepada penyimpanan dana diberikan hak untuk jasa atas deposito ini, tidak diberikan bunga, bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Muamalat tidak melaksanakan perdagangan yang seperti yang pertama. Dalam pengoperasiannya Bank murabahah, dan musyarakah. Nisbah keuntungan juga sama berbagai bentuk transaksi perdagangan seperti bertindak langsung sebagai pengusaha dengan melakukan adalah penyimpanan uang nasabah di bank, kemudian bank Bentuk kedua sistem Mudharabah pada Bank Muamalat prinsip *revenue sharing*.

menghitung pembagian keuntungan dengan menggunakan tentang bolehnya perhitungan dengan *accrual basis* dan yang dikeluarkan perlu kehati-hatian, terutama fatwa bertungsi secara benar, sehingga dengan fatwa-fatwa Oleh karena itu Dewan Pengawas Syariah ini harus kehalalan transaksi yang berlaku pada Bank Muamalat.

masing-masing, lamanya jangka waktu penyimpanan,

besarnya keuntungan bank selama periode tertentu, laba  
deposan bisa lebih besar atau lebih kecil dari suku  
bunga yang berlaku pada bank konvensional dan dapat  
dihitung hingga tiap hari.

sebagai contoh, misalnya :

Sdr. A mempunyai deposito berjangka dengan waktu  
satu tahun sebesar Rp.10.000.000,- dengan  
perjanjian bagi hasil yang disepakati adalah  
sebesar 75 % untuk penyimpanan dana dan 25 % untuk  
pihak bank. Apabila dana bank yang diputar  
seluruhnya adalah Rp. 100.000.000,- dan pada  
akhir tahun menghasilkan laba Rp.30.000.000,-,  
maka bagian laba yang akan dibagi dengan Sdr. A  
adalah  $10/100 \times 30.000.000,- = \text{Rp.}3.000.000.$   
Dengan demikian pembagian laba yang menjadi hak  
sdr A adalah 75 %  $\times \text{Rp.}3.000.000,- =$   
Rp.2.250.000,-.

Kiranya dapat dipahami bahwa laba yang diterima

oleh Sdr. A tergantung kepada variabel-variabel tersebut  
di atas, sehingga dalam hal tertentu bisa lebih besar  
dari tingkat bunga bank konvensional yang berlaku dan  
dapat pula lebih kecil. Inilah kewajiban dan keadilan  
yang dituntut oleh Bank Tanpa Bunga.

Dengan menggunakannya variabel-variabel penentu  
besarnya bagian bank yang dibagikan, maka bank dapat  
menghitung labanya yang akan dibagikan kepada penyimpan

Sdr. B mempunyai tabungan dengan saldo rata-rata dalam waktu satu tahun sebesar Rp.10.000.000,- dengan perjanjian bagi hasil yang disepakati adalah sebesar 80 % untuk penyiapan dana dan 20 % untuk bank. Andaikata dana bank yang diputar seluruhnya sebesar 100.000.000,- dan pada akhir tahun menghasilkan laba Rp.30.000.000,-, maka

Sebagai contoh, misalnya :

diperhitungkan menurut saldo rata-ratanya.

maka variabel besarnya dana yang disimpan dimungkinkan adanya mutasi atau pemindahan tabungan, bank selama periode tertentu. Namun demikian, karena besarnya dana yang disimpan dan besarnya keuntungan laba masing-masing, lamanya jangka waktu penyimpanan, akan diperoleh penyiapan dana adalah besarnya bagian variabel yang menentukan besarnya pembagian laba yang pembentukan laba bank. Seperti deposito di atas, diperhitungkan sesuai dengan peranan dananya dalam untuk penyiapan dana dan 20 % untuk bank) yang diberikan hak untuk memperoleh bagian laba bank (80 % yang diberikan bunga, tapi kepada penyiapan dana dapat dilakukan sesuai dengan syarat-syarat tertentu simpanan pemilik dana pada bank yang penarikannya hanya Tabungan Mudharabah, tabungan ini merupakan minggu bahkan tiap hari.

dana untuk tiap satu tahun, tiap enam bulan, tiap

bagian laba yang akan dibagi antara sdr B dengan bank adalah  $10/100 \times Rp.30.000.000,- = Rp.3.000.000.$

Dengan demikian bagian laba yang menjadi hak B adalah  $80\% \times Rp.3.000.000,- = Rp.2.400.000,-$  sama dengan deposito bagianlaba yang diterima sdr.B tergantung kepada variabel-variabel tersebut di atas, sehingga dalam hal tertentu bisa lebih besar dari suku bunga bank konvensional dan dapat pula lebih kecil. Bank Muamalat sebagai bank nirbunga menerapkan prinsip kewajiban dan keadilan. Dengan penggunaan variabel-variabel tersebut, maka bank juga dapat menghitung laba yang akan dibagikan kepada penyimpan dana untuk satu tahun, tiap enam bulan, tiga bulan, tiap minggu bahkan tiap hari.

## 2. Pembayaan

Bank Muamalat dalam kegiatannya selalu terlibat dengan berbagai jenis kontrak-kontrak perdagangan syariah. Semua elemen kontrak sudah pasti mempunyai asas dan prinsip yang jelas secara syariah. Diantara jenis kontrak yang dioperasikan dalam pembayaan

adalah:

- a. Al-Mudharabah
- b. Al-Musyarakah
- Ad.a. Al-Mudharabah

Dari segi konsep dasar, Mudharabah dalam pembayaan ini sama dengan Mudharabah yang telah dijelaskan di atas, namun ada yang membedakannya. Al Mudharabah pada pelaksanaan deposito nasabah, merekalah

yang bertindak sebagai pengelola dana (mudharib),

sedangkan pada sist pembiayaan, bank bertindak sebagai

sahibulmaal dan pengelola usaha bertindak sebagai

mudharib. Apabila sistem ini dioperasikan secara

meluas, maka masyarakat sebagai pengguna jasa perbankan

syariah akan mampu mendapatkan penghasilan yang lebih

banyak, karena bank tidak memberikan sesuatu yang berat

kepada nasabah dalam mengelola suatu proyek. Mereka

tidak terhalu direpotkan dengan modal.

Dalam Al-Mudharabah ini disebut juga qirad atau

kredit, yaitu suatu perjanjian kredit yang disepakati

bersama antara bank Muamalat dengan pengusaha atas

dasar bagi hasil, di mana bank menyediakan proyek atau

usaha beserta profesional managernya (jangka waktu

pendek atau menengah). Penerima kredit Mudharabah ini

diwajibkan melunasi utang-utangnya setelah jangka waktu

tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati

bank akan mengembangkan kredit untuk investasi baru

nasabah dibidang pertanian, industri kecil dan industri

rumah tangga.

b. Al-Musyarakah

Yang dimaksud dengan musyarakah adalah akad antara

dua orang atau lebih dengan menyertakan modal dan

dengan keuntungan dibagi sama mereka menurut porsi

yang disepakati. Penyerahan musyarakah atau syirkah

ini yaitu suatu perjanjian bersama antara bank

dengan beberapa pemilik modal untuk menyertakan

modalnya pada suatu proyek atau usaha (biasanya

berjangka waktu panjang), di mana risiko dan laba

dibagi secara berimbang dengan penyetaraannya. Karena

penyerahan Musyarakah merupakan salah satu perangkat

penting untuk meningkatkan peran serta masyarakat

dalam investasi, maka tujuan penyerahan Musyarakah

adalah agar dari sumber dana yang lain dapat

disalurkan dana umat ke proyek-proyek investasi

untuk menunjang program pembangunan, melalui anak-

anak perusahaan yang terbentuk lembaga keuangan

bukan bank dan lembaga pembiayaan.

### 3. Pembiayaan Perdagangan

Bank Muamalat sebagai salah satu lembaga keuangan

modern, menawarkan berbagai produk yang menarik untuk

dimanfaatkan oleh para nasabah. Pelayanan yang

diberikan komprehensif, baik untuk pembiayaan jangka

panjang maupun untuk pembiayaan jangka pendek yang

digunakan untuk putaran modal bagi para pelaku bisnis.



Antara Pembayaan perdagangan yang telah dibuatkan produknya adalah sebagai berikut :

1. Surat kredit (letter of credit) dibawah prinsip al-wakalah, al-musarakah, dan al-murabahah.
2. Surat jaminan.
3. Pembayaan modal kerja dibawah prinsip al-murabahah.

Ad. 3.1. Surat Kredit

Apabila para pedagang melakukan transaksi ekspor atau impor memerlukan surat kredit, agar transaksi mereka berjalan lancar, atau masing-masing pelaku bisnis dapat melayani transaksi yang mereka lakukan, hingga kewawajiban tidak muncul antara sesama mereka. Dalam hal ini bank Muamalat menyediakan beberapa bentuk fasilitas kontrak.

3.1.1. Surat kredit dibawah Prinsip Al-Wakalah.

Al-Wakalah adalah menyerahkan wewenang kepada seseorang untuk menjalankan tugas yang akan dilakukan oleh seorang yang punya wewenang untuk itu. Contoh dalam hal ini adalah Sdr.C mewakilkan kepada Sdr.D untuk membeli sekilo emas, Sdr.D membeli dan kemudian menyerahkan emas yang dibeli kepada Sdr.C dalam hal telah terjadi sesuatu yang disebut Al-Wakalah. Al-wakalah ini dibenarkan oleh Islam sepanjang dipenuhi rukun dan syariatnya.

Dalam praktek surat kredit dengan prinsip Al-Wakalah ini dapat dilakukan oleh nasabah dengan bank Muamalat, apabila nasabah mohon untuk dibuahkan surat kredit, maka bank akan membuatkan dan meminta nasabah menyediakan deposit sepenuhnya menurut harga barang yang akan diimpor. Deposit itu dapat diterima dalam bentuk Wadi'ah, bank hanya akan menggunakan komisi kepada nasabah di bawah elemen kontrak al ujr wa al-umlah.

Apabila diperhatikan, sebenarnya al-wakalah ini merupakan keperluan yang sangat penting dalam bertransaksi, karena ia akan membantu masyarakat dalam menyelesaikan kesukaran yang dihadapinya dalam melaksanakan transaksi dan bermuamalah sehari-hari.

3.1.2. Surat kredit di bawah prinsip Al-Musyarakah Dalam perdagangan impor dan ekspor, para pelaku bisnis selalu menggunakan Surat Kredit (LC). Bank Muamalat menawarkan kontrak perdagangan seperti ini kepada nasabah dibawah elemen kontrak Al-Musyarakah.

Caranya adalah dalam pembayaran barang yang akan dibeli oleh nasabah, ia berkongsi dengan bank. Untuk menjualnya diserahkan kepada nasabah dan keuntungan yang diperoleh dibagi antara pihak bank dan nasabah

menurut porsi yang disepakati bersama. Untuk keperluan

ini nasabah tidak perlu diberatkan dengan kolateral,

karena suatu kontrak yang menggunakan elemen Musyarakah

tidak memerlukan kolateral.

### 3.1.3. Surat Kredit dibawah Prinsip Al-Murabahah.

Bagi nasabah yang tidak memiliki modal yang cukup

dapat menggunakan elemen kontrak Al-Murabahah dalam

melaksanakan transaksinya. Kontrak ini akan memberikan

peluang kepada seseorang untuk memperoleh sesuatu

barang dengan pembayaran secara bertangguh.

Dalam prakteknya, Bank Muamalat dapat membelikan

dan mengimpor barang sebagaimana yang dikehendaki oleh

nasabah. Setelah barang itu dibeli oleh bank, nasabah

akan membelinya dengan kontrak Al-Murabahah dan

pembayarannya akan dilakukan oleh nasabah di kemudian

hari.

Kontrak seperti ini oleh Bank Muamalat

diplikasikan dalam berbagai produk pembiayaan

perdagangan. Nasabah meminta bank menyediakan

pembayaan untuk keperluan putaran modal bagi pembelian

suatu barang, barang-barang mentah atau alat ganti.

Semua pembayaran akan dilakukan oleh bank, nasabah

boleh membayarnya kepada bank dengan pembayaran ditanggguhkan, setelah sampai masa jatuh temponya, nasabah akan membayar kepada bank sebesar harga yang telah disetujui.

### 3.2. Surat Jaminan

Syariat Islam mengajarkan bahwa setiap masyarakat muslim itu hendaklah membantu sesamanya. Oleh karena itu apabila seseorang memerlukan orang lain untuk menjamin dirinya agar dapat dipercaya dalam memegang suatu amanah atau urusan, maka ia memerlukan penjamin atau disebut Al-kafalah.

Jaminan artinya mau bertanggung jawab terhadap sesuatu yang menajdi tanggung jawab orang lain secara hukum. Jaminan ini terbagi atas dua, yaitu :

Pertama, jaminan ke atas diri(kafalah bi a-nafs), seperti menjamin untuk menghadirkan orang yang tertuduh dihadapan Mahkamah; kedua, jaminan atas harta (al-kafalah bi al-dar), seperti pejaminan atas utang seseorang, keselamatan barang, penyerahan barang, pembayaran harga barang yang dijual. Jenis inilah yang dipakai oleh Bank Muamalat.

Dalam pelaksanaannya Bank Muamalat dapat mengeluarkan surat jaminan untuk mengusahakan sesuatu proyek dan melunasi pinjaman. Untuk itu bank boleh meminta nasabah meletakkan sejumlah uang deposit di bawah kontrak al-waidah. Keuntungan bank dengan menggunakan elemen kontrak seperti ini adalah mendapatkan bayaran dari nasabah berupa fee atau upah melalui kontrak ujir.

### 3.3. Pembayaan Modal Kerja di bawah kontrak Murabahah.

Biasanya masyarakat kalau membuka suatu usaha atau aktivitas bisnis memerlukan modal. Bank Muamalat bisa membayai modal kerjanya dengan menggunakan kontrak Al-Murabahah. Contohnya Sdr. E adalah dokter gigi. Ia ingin membuka tempat praktek, sehingga ia memerlukan modal. Bank dapat membantunya untuk mendapatkan tempat dan peralatan yang ia perlukan, kemudian bank menjualnya kepada sdr. E dengan harga dasar ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama.

Produk Al Murabahah yang dijual oleh bank Muamalat kepada nasabah, pada dasarnya tidak memerlukan kolateral atau agunan, sebab ia telah dicatat dan

ditulis secara jelas, dan nasabah yang diberi fasilitas seperti ini bukanlah nasabah lain, melainkan nasabah yang sudah dapat dipercaya kredibilitasnya.

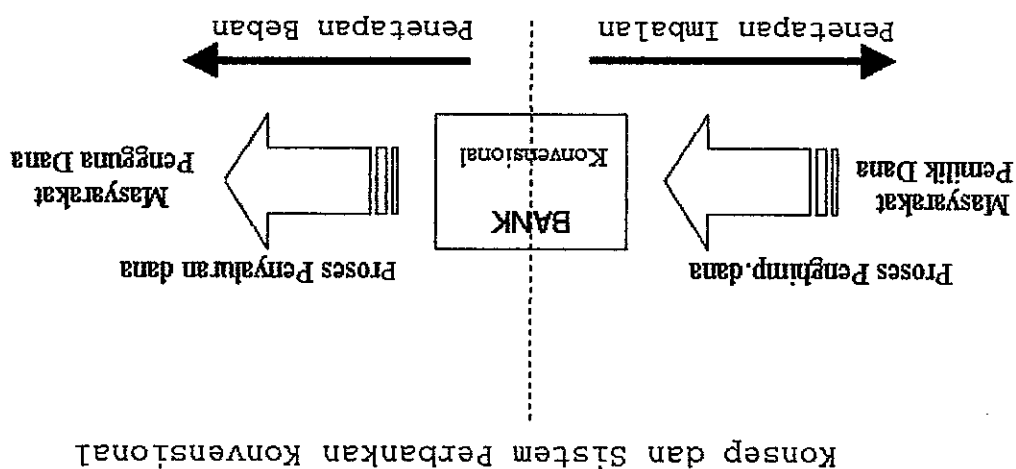
#### 3.4. Pelayanan lain

Pada hakekatnya Bank Muamalat dapat melayani berbagai keperluan yang diinginkan oleh masyarakat selagi ada unsur komersialnya dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Umpamanya pelayanan pengiriman uang, pelayanan penukaran uang asing (jual beli valuta asing), pelayanan pembayaran telepon, listrik, air, jual beli traveller cheque, jasa penyewaan save keeping/deposit box dan lain-lain.

Pelayanan tersebut di atas beroperasi dalam elemen kontrak *al-ijarah*. Bank hanya mengenakan upah atau *service charge* kepada nasabah karena hanya elemen inilah yang sesuai diterapkan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas untuk lebih jelasnya di bawah ini akan memperlihatkan perbedaan antara konsep dan sistem perbankan konvensional dengan sistem bunga dan syariah yang mendasarkan pada prinsip bagi hasil.

Gambar (3) di atas, menunjukkan bahwa bank konvensional berposisi di tengah, dalam arti bank akan menanggung beban dalam proses penyaluran dana kepada masyarakat pengguna dana, juga di sisi lain, bank di dalam proses penghimpunan dana juga akan menanggung bunga yang akan dibayarkan kepada pemilik dana. Hal inilah yang membedakan dengan bank syariah. Dalam masa krisis seperti pada masa lalu, maka bank konvensional akan menanggung beban yang berat, tidak adanya keadilan bank yang akan mengalami kehancuran (kolaps).

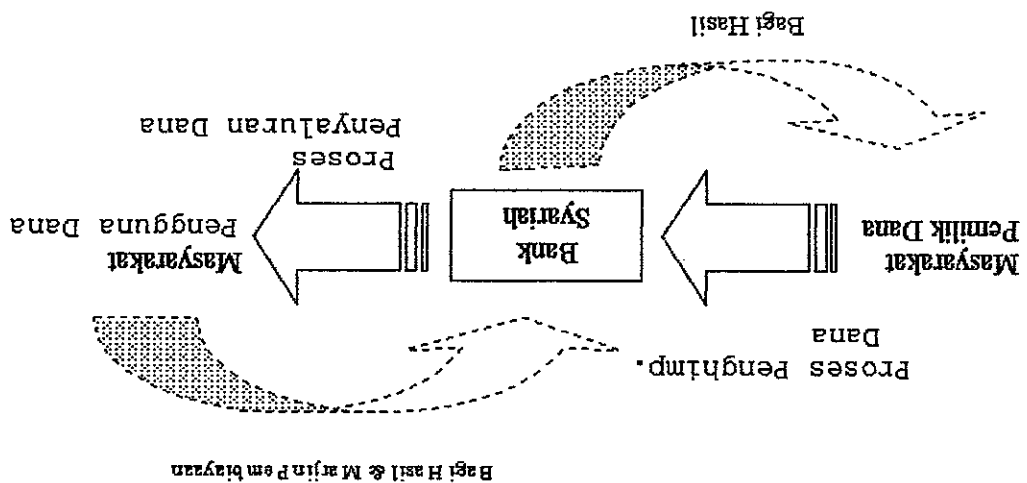


Gambar 3.

Konsep dan Sistem Perbankan Konvensional

Gambar 4.

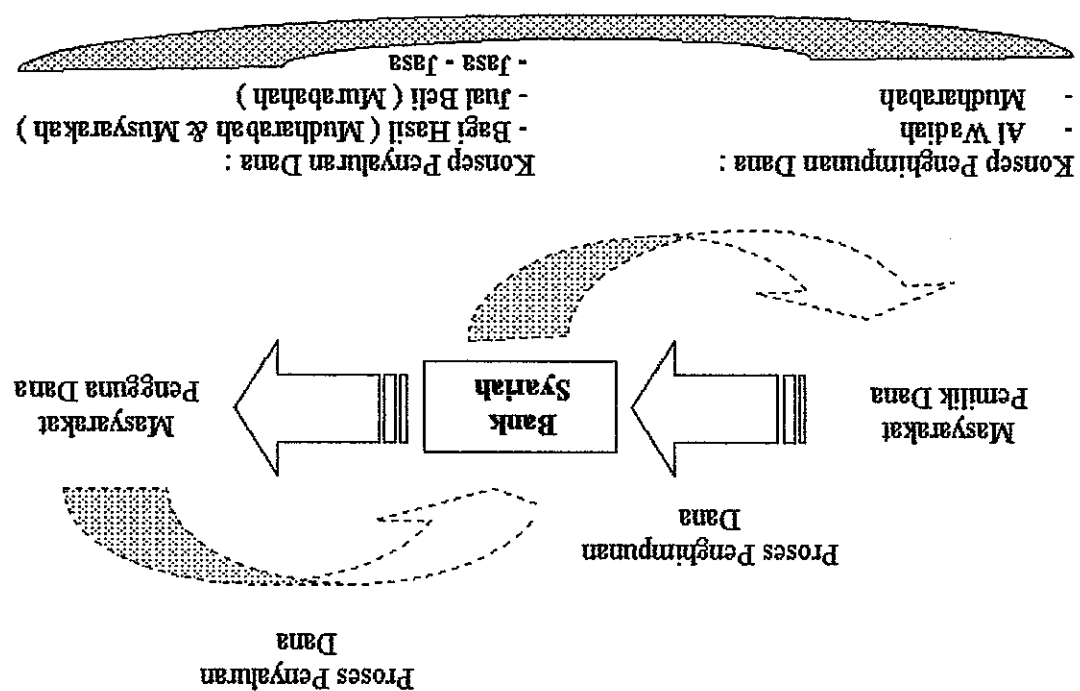
Konsep dan Sistem Perbankan Syariah



Gambar (4) di atas, menunjukkan bahwa dalam sistem perbankan syariah, di dalam proses penghimpunan dana maupun proses penyaluran dana berdasarkan pada prinsip bagi hasil, sesuai nisbah yang telah disepakati kedua belah pihak. Dalam hal ini bank syariah tidak akan menanggung beban yang begitu berat, disiniilah tercermin asas keadilan.



Gambar (5) tersebut di atas, bahwa produk bank syariah yaitu di dalam proses penghimpunan dana berdasarkan pada prinsip al-wadiah dan al-mudharabah dan di dalam proses penyaluran dana berdasarkan pada prinsip bagi hasil (mudharabah dan musyarakah); jual beli (murabahah) serta jasa-jasa.



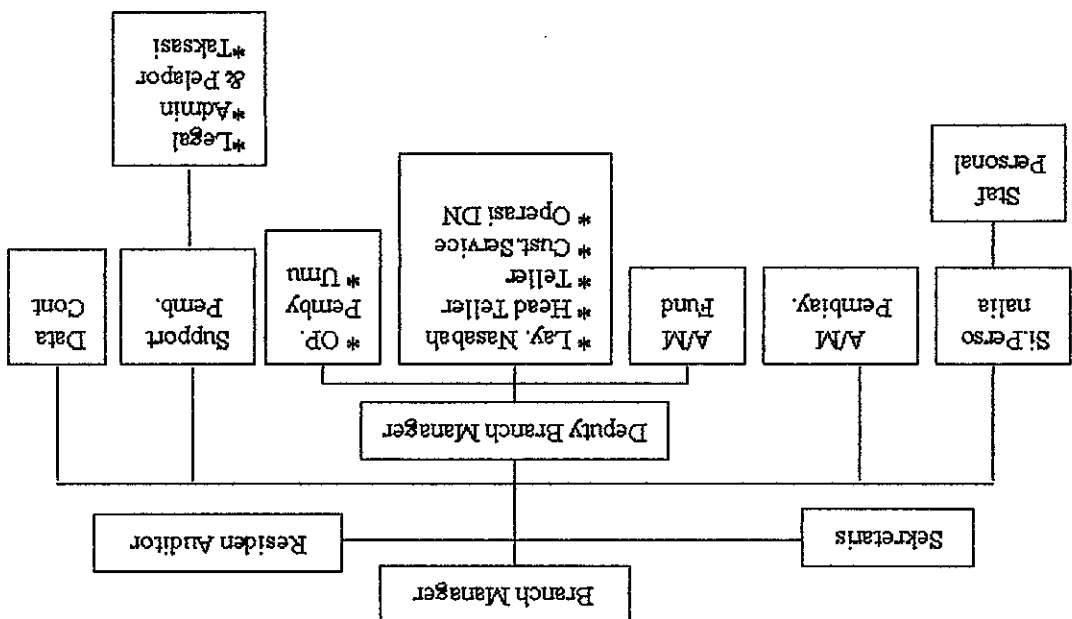
Konsep Produk Perbankan Syariah

Gambar 5.

#### 4. Struktur Organisasi BMI (Bank Muamalat Indonesia)

Semarang.

Gambar 6.



#### B. Penerapan Prinsip Bagi Hasil Dalam Pembiayaan Terhadap Nasabah Bank Muamalat Semarang

Di bidang penyaluran dana kepada masyarakat, Bank Muamalat Semarang memberikan jasa-jasa kegiatan pembiayaan sebagai berikut:

##### 1. Pembiayaan Al-Mudharabah

Pembiayaan Al-Mudharabah yaitu suatu perjanjian pembiayaan antara Bank Muamalat dengan nasabah, di mana bank menyediakan 100 % pembiayaan bagi usaha tertentu (meliputi bidang pertanian, perikanan, industri kecil dan industri rumah tangga) dari nasabah. Nasabah

mengelola usaha tersebut tanpa campur tangan dari Bank Muamalat. Bank mempunyai hak untuk mengajukan usul dan melakukan pengawasan. Atas penyediaan dana pembiayaan tersebut Bank Muamalat mendapat imbalan atau keuntungan yang besarnya ditetapkan atas dasar persetujuan kedua belah pihak. Apabila terjadi kerugian atas usaha yang dibiayai tersebut, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh Bank Muamalat, kecuali apabila kerugian akibat dari kelatitan nasabah pengelola usaha.

Keberadaan perjanjian pembiayaan al-mudharabah didasarkan pada :

(1) Al Qur'an Surat Al-Muzammil (73) ayat 20, artinya:  
.....Dan sebahagian dari mereka orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebahagian karunia Allah SWT.

(2) Hadits Rasulullah saw, yang berbunyi:  
Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahwasanya Sayyidan Abbas, jikalau memberikan dana kepada mitra usahanya secara mudah-mudahan ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengangkut lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak yang berpaku-paru basah. Jikalau menyalahi peraturan, maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikan syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah saw dan Beliau pun memperkenankannya.

Dalam Hadits lain Rasulullah SAW menyatakan:  
Dari Suhail r.a, bahwa Rasulullah bersabda :  
tiga perkara di dalamnya terdapat keberkatan

(1) menjual dengan pembayaran kredit; (2) Mugaradnah (Mudharabah); (3) mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan bukan untuk dijual (HR. Ibnu Majah).

Pada skem perjanjian Mudharabah (yang selanjutnya disebut sebagai perjanjian) yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang menjalankan usaha untuk (selanjutnya disebut mudharib) dengan PT. Bank Muamalat Indonesia Semarang sebagai pihak yang menyediakan dana (untuk selanjutnya disebut shahibul maal), bahwa Mudharib dalam rangka menjalankan kegiatan dan memperluas usahanya memerlukan sejumlah dana dan untuk memenuhi hal ini telah meminta bank Muamalat untuk memberikan pembiayaan yang keuntungannya akan dibagi secara bagi hasil (mudharabah) dan Bank Muamalat menyetujui untuk menyediakan pembiayaan tersebut kepada Mudharib sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian Mudharabah. Sebagaimana dinyatakan oleh Marham Darusbadruzaman<sup>67</sup> bahwa perjanjian bagi hasil diterapkan antara bank dengan nasabah tanpa memperhitungkan bunga, perjanjian ini dalam sistem

---

<sup>67</sup> Marham Darus Badruzaman, *Kerangka Dasar Hukum Perjanjian (Kontrak)* (Elips, Jakarta, 1998), hal. 28

hukum perdata termasuk lingkup perjanjian pembiayaan yang merupakan perjanjian bersama di luar KUHPerdata.

Kedua belah pihak (Bank Muamalat dan Mudharib) telah sepakat bahwa untuk maksud tersebut kedua belah pihak menandatangani dan melaksanakan suatu perjanjian berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan bagi hasil.

#### **1.1. Syarat-syarat dan ketentuan bagi hasil**

Syarat-syarat dan ketentuan bagi hasil sebagai berikut :

a) Bagi hasil adalah pembagian pendapatan yang disepakati antara bank Muamalat dan Mudharib yang dibagikan sesuai dengan nisbah yang disepakati bersama, yakni pendapatan dari hasil penjualan sebelum dikurangi biaya.

b) Pendapatan, yang dimaksud adalah bahwa Bank Muamalat dan Mudharib setuju mengenai pembiayaan secara bagi hasil bahwa pendapatan yang didapat dari usaha Mudharib tersebut akan dibagi dengan nisbah 25 % untuk Bank Muamalat dan 75 % untuk Mudharib, sebelum dipotong pajak dan ongkos-ongkos.

Pendapatan yang dibagi tersebut dapat dihitung sebagai pengembalian pembiayaan

pokok dan pendapatan bank Muamalat yang telah tercantum dalam daftar pembayaran. Namun apabila dalam masa berlakunya perjanjian ini terjadi fluktuasi atau perubahan yang mengakibatkan pada akhir masa perjanjian, Mudharib mengalami kerugian, sehingga proyeksi keuntungan sebagaimana telah ditetapkan (25 % untuk Bank Muamalat dan 75 % untuk Mudharib) di atas menjadi tidak terpenuhi bagi salah satu pihak, maka pembagian pendapatan yang telah diperhitungkan/diterima Bank Muamalat akan dihitung kembali pada setiap kuartal setelah diterimanya laporan akuntan publik, yang disebut pada setiap bulan.

Dalam hal tidak ada pendapatan atau bahkan rugi, maka penutupan kerugian tersebut diambil dari jumlah pokok pembiayaan yang diatur sebagai berikut sebagaimana tersebut dibawah ini.

c) Dalam hal terjadi kerugian :<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan bapak Baharuddin, bagian hukum, tanggal 6-Januari 2003

Ketentuan ini memberikan kelonggaran kepada Mudharib untuk tidak melakukan pengantian biaya, kerugian dan bunga kepada Shahibul Maal (Bank Muamalat), oleh karena suatu keadaan yang berada di luar kekuasaannya. Ada tiga hal yang menyebabkan Mudharib untuk tidak melakukan pengantian biaya, kerugian dan bunga kepada Shahibul Maal (Bank Muamalat), oleh karena suatu keadaan yang berada di luar kekuasaannya. Ada tiga hal yang menyebabkan Mudharib untuk tidak melakukan pengantian biaya, kerugian dan bunga kepada Shahibul Maal (Bank Muamalat), oleh karena suatu keadaan yang berada di luar kekuasaannya.

Tidak ada pengantian biaya, kerugian, dan bunga, bila keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebutuhan, debitur berhutang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan atau melakukan sesuatu perbuatan yang terlarang olehnya.

Selanjutnya Pasal 1245 KUHPerdata :

Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya kerugian dan bunga, bila tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakan perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh suatu hal yang tidak terduga yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk padanya.

Pasal 1244 KUHPerdata :

1244 KUHPerdata dan Pasal 1245 KUHPerdata.

Dengan tidak mengurangi dalam ketentuan Pasal batas kemampuan Mudharib (*force majeure*). Yang timbul disebabkan karena hal-hal di luar Bank Muamalat hanya akan menanggung kerugian

kontrakturnya. Dalam hal terjadi force majeure sebagaimana tersebut di atas, maka Bank Muamalat akan menerima dan mengakui kerugian tersebut setelah menerima, menilai kembali dan menyampaikan hasil penilaiannya secara tertulis kepada Mudharib yang berisi laporan keuangan dari konsultan yang telah diaudit oleh akuntan publik, pernyataan dari pengurus perusahaan-perusahaan secara tertulis yang disampaikan kepada Bank Muamalat mengenai kerugian tersebut, dan dokumen-dokumen yang sah yang berkaitan dengan usaha yang dibayar

- a) Perang, pengambil-alihan (baik yang diumumkan atau tidak), pendudukan, tindakan negara atas musuh, kerusuhan masal dan sabotase;
- b) Bencana alam, termasuk tapi tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, halilintar, pergerakan tanah, dan keadaan cuaca yang sangat buruk.
- c) Pemogokan buruh yang menyebabkan terganggunya usaha yang timbul bukan karena kesalahan Mudharib atau kontrakturnya atau sub



oleh Bank Muamalat. Bank Muamalat hanya akan

menanggung kerugian maksimum sebesar

pembayaan yang diberikan pada Mudharib.

Menurut para ahli fiqh pengikut Hanafi, dalam

syirkah keuntungan yang dibagikan kepada setiap rekanan

harus ditetapkan sesuai total keuntungan, bukan

berdasarkan jumlah yang tertentu. Juga wajib membagi

keuntungan kepada pihak yang memperoleh modal melalui

*mudharabah* dan kepada pemilik modal ditetapkan dengan

suatu ukuran keuntungan yang sederhana, misalnya

seperdua, sepertiga, atau seperempat.<sup>69</sup>

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam

perjanjian, Bank Muamalat baru berkewajiban memberikan

pembayaan kepada Mudharib, jika telah dipenuhi semua

prasyarat sebagai berikut:<sup>70</sup>

a) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum

tanggal penggunaan pembiayaan, bank Muamalat

telah menerima semua dokumen yang diserahkan

dalam lampiran yang dilampirkan (dilampirkan)

pada mintak akta perjanjian (semua dalam bentuk

dan isi yang disetujui Bank Muamalat).

---

<sup>69</sup> M. Nejatullah Siddiqi, *terjemah, Fakhririyah, Kemiskinan Usaha Dan Bagi Hasil Dalam*

*Hukum Islam*, (Dana Bhakti Persada Yasa, Yogyakarta, 1996), hal. 19  
<sup>70</sup> Wawancara dengan Bapak Baharudin, tanggal 6 Januari 2003

a) Status Mudharib :  
 harus menyatakan dan menjamin hal-hal sebagai berikut :  
 sebagaimana telah disebutkan di atas, maka Mudharib  
 Sehubungan dengan penyediaan pembiayaan  
 Muamalat.

d) Bank Muamalat telah menerima dokumen,  
 pernyataan, pendapat dari segi hukum atau akta  
 lain yang secara wajar diminta oleh Bank  
 Muamalat.  
 diserahkan kepada Bank Muamalat.

c) Surat pernyataan dan kesanggupan telah dibuat  
 dan ditandatangani dengan sebagaimana mestinya  
 dan asli atau salinan resminya telah  
 diserahkan kepada Bank Muamalat.

(a) Pemberian jaminan pribadi (termasuk  
 jaminan dari para pemegang sahamnya atau  
 lainnya);  
 (b) Pemberian jaminan Mudharib (termasuk  
 jaminan dari afiliasinya);  
 (c) Fidusia atas barang-barang bergerak  
 milik mudharib;  
 (d) Hak Tanggungan atas tanah-tanah  
 Mudharib;  
 (e) Cessie atas piutang-piutang Mudharib.

Bank Muamalat, yaitu :  
 atau salinan resminya telah diserahkan kepada  
 tandatangani sebagaimana mestinya baik asli  
 b) Telah dibuat perjanjian jaminan dan telah di

Mudharib adalah suatu Perseroan Terbatas (PT) yang berdiri secara sah dan tunduk pada Undang-undang dan Peraturan-peraturan Negara Republik Indonesia.

b) Keberadaan Mudharib, pada saat di tandatangannya

perjanjian, Mudharib adalah tidak dalam keadaan dibubarkan atau dalam keadaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 47 KUHD, bahwa:

Apabila bagi para pengurus ternyata bahwa perseroan menderita kerugian sebesar lima puluh persen dari modalnya, maka hal ini harus merekam dalam register yang diselenggarakan untuk itu di kepaniteraan Pengadilan Negeri dan dalam Berita Negara.

c) Kuasa dan kewenangan,

Direksi Mudharib adalah berkuasa dan berwenang untuk menandatangani melaksanakan perjanjian pembelian dan perjanjian lainnya sehubungan dengan perjanjian pembelian. Direksi Mudharib telah mengambil segala tindakan yang diperlukan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar (AD) Mudharib atau aturan lainnya yang memberikan kuasa kepada direksi untuk menandatangani, menyampaikan, menerbitkan dan menjalankan perjanjian pembelian, surat sanggup dan perjanjian lainnya.

d) Perjanjian mengikat,

Perjanjian pembiayaan (termasuk berikut perubahan-perubahannya, penambahan atau pengurangan ataupun dokumen-dokumen yang terpisah maupun yang tidak dari perjanjian pembiayaan) berlaku dan mengikat Mudharib.

e) Peraturan-peraturan yang berlaku, penandatanganan, penyampaian penerbitan dan pelaksanaan perjanjian pembiayaan dan surat sanggup tidak atau tidak akan menyimpan dari setiap ketentuan dari peraturan-peraturan yang berlaku di Negara R.I atau Anggaran Dasar Mudharib atau perjanjian jaminan atau dokumen-dokumen atau perjanjian-perjanjian lain yang mengikat Mudharib atau mengikat aset Mudharib. f) Persetujuan,

Semua persetujuan, lisensi atau perjanjian dari pihak yang berwenang yang dimintakan sehubungan dengan perjanjian pembiayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menandatangani, menyampaikan, menerbitkan, melaksanakan, untuk sah dan berlakunya perjanjian pembiayaan adalah telah diperoleh oleh Mudharib. g) Litigasi,

Tidak terdapat proses litigasi, arbitrase atau administratif terhadap Mudharib oleh pihak yang berwajib atau oleh pengadilan saat ini atau yang sedang ditunda yang mempengaruhi aset, usaha dan keadaan keuangan Mudharib.

h) Perijinan,

Mudharib memiliki semua perijinan yang berlaku untuk menjalankan usahanya.

i) Keterangan Mudharib,

Keterangan mengenai akta pendirian Mudharib, Anggaran Dasar, Direksi, Dewan Komisaris, dan para pemegang saham sebagaimana yang digambarkan dalam lembar keterangan Mudharib adalah benar dan tepat.

j) Penandatanganan perjanjian, adalah orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama Mudharib serta mendapat kuasa dari Mudharib adalah sah dan berwenang.

k) Perubahan Anggaran Dasar dan Pengurus Mudharib,

Mudharib tidak boleh merubah Anggaran Dasarnya dan pengurusnya tanpa persetujuan tertulis dari Bank Muamalat.

l) Bank Muamalat berhak memasuki kantor dan pabrik atau tempat lainnya, untuk mengadakan pemeriksaan

terhadap pembukuan, catatan, transaksi Mudharib yang berhubungan dengan Perjanjian Pembayaan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

m) Aktiva yang tercatat dalam neraca Mudharib itu bebas dari silang sengketa dengan pihak ketiga.

n) Tidak akan terjadi klaim (tuntutan) baik dari pihak lain selain yang tercatat dalam neraca tersebut. Namun demikian apabila di kemudian hari terjadi tuntutan seperti itu, maka menjadi kewajiban dan tanggung jawab pribadi-pribadi Mudharib untuk menyelesaikannya, tetapi tidak terbatas pada utang-utang pajak yang terjadi sebelum perubahan perjanjian pembayaan ditandatangani.

o) Kegiatan perusahaan akan tetap dijalankan sesuai dengan Anggaran Dasar berikut perubahan-perubahan, walaupun perubahan Anggaran Dasar Perseroan, karena adanya kerjasama yang belum disetujui oleh pihak yang berwenang.

Syarat pembayaan bagi hasil (Al-Mudharabah) yang menjadi pertimbangan bagi operasionalisasi Bank

Muallamat dalam memberikan pembiayaan Mudharabah

adalah:<sup>71</sup>

a. Modal Mudharabah harus merupakan mata uang penuh yang ditentukan sewaktu akad dan diserahkan kepada pihak penguasa setelah selesai ijab qabul, sesuai dengan cara-cara yang telah disepakati.

b. Persentase pembagian keuntungan yang ditentukan hanya untuk satu pihak saja atau menetapkan sejumlah uang dari keuntungan yang akan didapat bagi salah satu pihak adalah tidak sah.

c. Dasar bagi pembiayaan mudharabah ialah modal berasal dari pihak permodal (BMI) sedang kerja dilakukan oleh pihak pengusaha. Oleh karena itu adalah tidak sah apabila penetapan kerja dilakukan oleh pihak pemodal.

d. Bila pembiayaan mudharabah mengalami kerugian maka kerugian tersebut ditanggung sepenuhnya oleh pemodal, pihak pengusaha menanggung kerugian karena tidak mendapatkan manfaat dari jerih payahnya. Jika usaha tersebut hanya kembali modal, maka modal tersebut sepenuhnya untuk pihak

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan Bapak Marsudi, tanggal 6 Januari 2003

- melanggar perjanjian yang telah disepakati, maka
- j. Apabila pihak pengusaha dalam menjalankan proyek pengeluaran tersebut berada dalam batas kewajaran. dahulu dari pemilik modal, dengan syarat diwajibkan untuk mendapatkan persetujuan terlebih pihak ketiga tersebut, maka pihak pengusaha berperan sebagai pemilik modal pada akad dengan dengan pihak ketiga, di mana pengusaha disini
- i. Apabila pengusaha hendak menjalankan mudharabah kebisaan setempat.
- pribadi kecuali hal sudah menjadi adat mudharabah dengan harta lain atau harta milik
- h. Pengusaha tidak boleh mencampurkan harta melakukan perikatan.
- haruslah cakap dan sah secara hukum untuk
- g. Kedua belah pihak yang akan mengadakan mudharabah yang halal.
- f. Proyek atau usaha yang dilakukan haruslah usaha oleh pihak pengusaha.
- e. Mudharabah dapat dibubarkan oleh pemilik modal pada waktu kapanpun sebelum usaha tersebut dimulai mendapatkan bagian.
- pemodal, sedangkan pihak pengusaha tidak



terjadi karena kesengajaan atau kelalaiannya.  
 kerusakan atau kerugian ini kecuali hal tersebut  
 pihak pengusaha tidak diwajibkan mengganti  
 ada, kalau tidak mencukupi baru diambil dari modal.  
 tersebut haruslah diambil dari keuntungan bila  
 dalam mudaharabah, maka penggantian kerusakan  
 n. Apabila terjadi suatu kerusakan atau kerugian  
 dijatulkannya.

setimpal dengan perhitungan kerja yang telah  
 pemodal, dan pengusaha berhak menuntut upah yang  
 semua modal dan untung adalah menjadi hak  
 m. Apabila terjadi aksi pembatalan mudaharabah maka  
 diberikan peringatan terlebih dahulu.

1. Pihak pemodal, karena sesuatu hal yang  
 membahayakan, berhak memecat pengusaha dengan  
 perjanjian.

k. Perjanjian mudaharabah selesai dengan habisnya  
 jangka waktu yang telah ditentukan dalam  
 yang telah diberikan oleh pihak pemodal.

dijatulkannya dan wajib membayar sepenuhnya modal  
 risiko kerugian dari proyek atau usaha yang tengah  
 pihak pengusaha bertanggung jawab terhadap semua

Tidak seperti halnya yang dilakukan bank-bank konvensional umumnya dalam memberikan kredit, pembiayaan Mudharabah di BMI dilakukan dengan menjembatani kepentingan masing-masing pihak terutama debitur yang seringkali dirugikan dalam perjanjian kredit di bank-bank konvensional yang umumnya menerapkan perjanjian standar. Perjanjian pembiayaan mudharabah dilakukan dengan mengurangi hambatan-hambatan yang seringkali melanda usaha mudharib.

## 1.2. Pihak-pihak yang terlibat dalam Perjanjian Pembiayaan Al-Mudharabah.

- yang telah disepakati.
- harus tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian
- r. Pembiayaan dalam mencicil pinjaman dan bagi hasil oleh pihak bank.
- ditekannya sehingga unsur kejujuran dapat terbaca tentang pengelolaan tentang usaha yang sedang
- g. Pembiayaan perlu mempelajari administrasi praktis dan jumlah biaya yang dibutuhkan.
- secara matang tentang usaha, tempat lokasi, pasar
- p. Pembiayaan hendaknya merencanakan terlebih dahulu salah satu pihak.
- o. Perjanjian mudharabah berakhir dengan matinya

Pembayaran Mudharabah lebih diprioritaskan pada

pengusaha kecil dan menengah. Biasanya hambatan yang paling besar bagi pengusaha kecil dan menengah adalah kurangnya modal, minimnya penguasaan teknologi dan terbatasnya jangkauan pemasaran. Melalui pola pembayaran mudharabah ini, hambatan-hambatan tersebut diusahakan dapat dikurangi bahkan mungkin dapat dihilangkan sama sekali. Oleh karena itu dalam pembayaran mudharabah, pihak-pihak yang terlibat adalah:

1. Bank Muallamat Indonesia (BMI) sebagai pihak penyedia dana (Shahibul Maal) yang menyediakan pembayaran.

2. Pengusaha atau para pengelola (mudharib) yaitu orang-orang yang menerima pembayaran. Mudharib dapat berupa perorangan dan kelompok orang. Mudharib perorangan bertanggung jawab penuh terhadap pembayaran yang diterimanya. Sedangkan Mudharib kelompok orang bertanggung jawabnya dilakukan secara tanggung renteng artinya semua mudharib mempunyai tanggung jawab yang sama. Salah satu dapat membebankan peruntungan secara keseluruhan.

### 3. Pihak terafiliasi, yaitu pihak yang

memberikan jasa kepada bank, termasuk konsultan, konsultan hukum, akuntan publik dan jasa penilai. (Pasal 1 butir 15 huruf c UU No 7 Tahun 1992).

Peran pihak terafiliasi (konsultan) yang keberadaannya disebutkan dalam perjanjian pembiayaan mudharabah adalah membantu mudharib dalam mengelola usahanya secara lebih baik dan ahli teknologi. Sehingga diharapkan tingkat produksi akan meningkat tanpa mengesampingkan aspek analisis dan evaluasi secara perbankan. Adanya penyebutan pihak terafiliasi dalam perjanjian Mudharabah karena antara bank Muamalat dengan konsultan telah terjadi perjanjian kerja sama sebelumnya. Sedangkan bagi mudharib, keberadaan konsultan dalam perjanjian pembiayaan mudharabah adalah sangat menguntungkan, karena mudharib dapat belajar untuk mengelola usahanya secara profesional dengan mendapatkan bimbingan orang yang ahli

dan menguasai dibidang usaha yang di tekuni  
mudharib.

### 1.3. Berakhirnya Perjanjian Pembayaran Al-Mudharabah

Berakhirnya perjanjian Pembayaran Al-Mudharabah dalam praktek Bank Muamalat Semarang, adalah sebagai berikut :

1. Mudharib telah membayar lunas pembayaran yang telah diterimanya:

2. Bank (Shahibul Maal) membatalkan perjanjian pembayaran Mudharabah, karena mudharib terbukti melakukan wanprestasi yang diikuti dengan adanya tuntutan dari Bank terhadap pembayaran mudharabah yang telah diterima dari bank (shahibul maal) .

3. Obyek dari pembayaran musnah yang bukan disebabkan oleh kesalahan mudharib atau disebabkan oleh keadaan memaksa (force majeure), seperti obyek pembayarannya musnah karena bencana alam;

4. Proyek usaha mudharib yang dibayar bank (shahibul maal) mengalami kerugian total (total loss), sehingga mudharib tidak

kepada nasabah pendanaan secara tetap,  
 (b) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil  
 meningkat;

pada saat keuntungan usaha nasabah  
 (a) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil

#### 1. 4. Manfaat pembiayaan al-Mudharabah :

masyarakat.  
 menjadi tinggi tidak sesuai dengan daya beli  
 usaha mudharib atau menyebabkan biaya produksi  
 pemerintah yang menghambat pemasaran dari  
 produk lain., adanya deregulasi atau peraturan  
 marketplace dan sulit untuk dikembangkan untuk  
 produk yang dihasilkan mudharib tidak  
 adanya kesalahan dalam analisis pembiayaan,  
 kerugian. Hal ini bisa terjadi disebabkan oleh  
 apabila usaha mudharib terus-menerus mengalami  
 5. Bank (shahibul maal) mengakhiri pembiayaan  
 proyek usaha mudharib tertimpa bencana alam;

keadaan memaksa (force majeure), seperti  
 (shahibul maal). Hal ini terjadi karena  
 mengembalikan pembiayaannya kepada bank  
 mempunyai kemampuan dan kesanggupan untuk

tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*;

(c) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah;

(d) Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang benar-benar terjadi itu yang akan dibagikan;

(e) Prinsip bagi hasil mudaharabah berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun rugi dan terjadi krisis ekonomi.

### 1.5. Risiko yang terdapat dalam al-mudaharabah,

Risiko yang terdapat dalam al-mudaharabah terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi, yaitu:

Pembayaan Al-Musyarakah yaitu satu perjanjian pembiayaan antara Bank Muamalat dengan nasabah di mana Bank Muamalat menyediakan sebagian dari pembiayaan bagi usaha atau kegiatan tertentu, sebagian lainnya disediakan oleh mitra usaha (mudharib). Dalam hal ini, Bank Muamalat dapat ikut serta dalam manajemen usaha tersebut. Bank bersama mitra usaha mengadakan kesepakatan tentang pembagian keuntungan tersebut tidak harus sebanding dengan pangsa pembiayaan masing-masing melainkan atas dasar perjanjian kedua belah pihak. Apabila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut akan ditanggung bersama sesuai dengan pangsa pembiayaan masing-masing.

Dasar hukum prinsip Musyarakah dapat dilihat dalam :

- (a). *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang tersebut dalam kontrak;
- (b). *Lalai dan kesalahan yang disengaja*;
- (c). *Penyembuyan keuntungan oleh nasabah bila nasabah tidak jujur*.



- (1) Al Qur'an Surat A-Shad (38) ayat 24 yang artinya:  
 ".....Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berkongsi itu sebagian mereka berbuat dzalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh ....."  
 (2) Dalam Hadist Rasulullah SAW yang berbunyi :  
 " Bahwa Rasulullah SAW telah berkata, saya menyertai dua pihak yang berkongsi selama salah satu dari keduanya tidak menghinai yang lainnya, seandainya berkhianat maka saya keluar dari pernyataan itu" (HR. Abu Daud).

Dalam skim perjanjian pembiayaan al-musyarakah (yang selanjutnya disebut perjanjian) yang dibuat dan ditanda tangani oleh pihak bank Muamalat dan nasabah (Mudharib), bahwa mereka masing-masing telah setuju untuk membuat perjanjian pembiayaan musyarakah dengan memaknai syarat dan ketentuan bagi hasil.

## 2.1. Syarat dan ketentuan bagi hasil sebagai berikut:

1. Bank Muamalat bersepakat kepada mudharib bahwa bank akan :

- (a) Menyediakan seluruh pembiayaan modal aset dan pembiayaan modal kerja berdasarkan perjanjian pembiayaan al-musyarakah ke rekening giro mudharib pada tanggal pencatran.

(b) Mudharib akan menyediakan jasa operasi dan pengeluaran seperti yang tertera pada lampiran, khususnya dalam perubahan kompensasi yang tertera pada lampiran sebagai pengeluaran proyek dan diberikan telah disebutkan.

(a) Mudharib akan menyediakan pelayanan teknis manajemen dan pengeluaran seperti yang tertera pada lampiran khususnya dalam perubahan partisipasi pembagian pendapatan dan diberikan hak kepadanya selain yang berkaitan pada pelayanan manajemen atau jumlah pengeluaran yang

## 2. Kompensasi bagi Mudharib, adalah :

(b) Setiap hal yang berkaitan dengan penetapan kebijaksanaan yang menyangkut proyek akan dikonsultasikan kepada nasabah pada setiap kondisi yang dibutuhkan, agar menjamin penerapan dari perjanjian pembiayaan al-musyarakah adalah benar, tetapi tidak ada keharusan bagi bank Muamalat untuk bermusyawarah bagi sesuatu yang menyangkut hak bank.

(b) Selanjutnya alokasi pembiayaan modal kerja dan modal asset akan dikredit pada akhir kwartal secara terpisah rekening mudharib dan rekening bank dalam proporsi seperti kontribusi yang dijanjikan pada masing-masing pembiayaan modal kerja dan pembiayaan modal asset sebagai mana yang telah disepakati.

(a) Pendapatan yang dapat dibagi yang diridlohi Allah SWT, jika ada pertama kali akan dialokasikan secara kuwartalan, ketika pendapatan yang dapat dibagi positif sebagai mana tertera pada buku proyek. (alokasi untuk pembiayaan modal kerja 65% dan alokasi untuk pembiayaan modal asset 35% ).

adalah :

3. Partisipasi masing-masing pihak (Bank Muamalat dan Mudharib) dalam pembagian pendapatan atau pengeluaran yang telah disebutkan.

hak kepadanya selain jumlah yang berkaitan dengan pelayanan jasa operasi

Sebagai jaminan atas tanggung jawab dan performan dari seluruh tanggung jawab mudharib yang tertera, maka mudharib harus tempo.

jumlah yang tersedia akan dibutuhkan untuk membayar kewajiban mudharib pada saat jatuh akan mentransfer dari besarnya deposito, mudharib sebagai pendapatan. Bank Mualamat ditransfer dari rekening deposito kepada pendapatan dari jaminan deposito akan sebagai jaminan rekening deposito. pencairan mudharib akan menyimpan dana melaksanakan pembayaran pada saat tanggal mudharib untuk membayar dan untuk Sebagai pengaman terhadap kewajiban menjadi tidak cukup.

4. Partisipasi kerugian, jika ada, akan dipikul pembagian pendapatan dari proyek akan ditetapkan tersebut diatas yang berakibat kerja dan pembiayaan modal asset yang telah kontribusi untuk setiap pembiayaan modal perbandingan jumlah yang sebanding dengan oleh mudharib dan bank mualamat dengan

melengkapi dengan jaminan tambahan kepada bank garansi dan bank tidak berkewajiban untuk melengkapi setiap dan sebagaimana yang tertera pada perjanjian pembiayaan Al-Musyarakah, sampai dokumentasinya dilengkapi dan bahan-bahan yang dimasukkan bank yang telah diserahkan sebagai akibat dari transaksi.

Sebagaimana tertera di dalam Al Qur'an surat Al-Baqarah ayat 283 :

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang".

2.2. Manfaat dan Risiko pembiayaan secara Musyarakah diantaranya adalah sebagai berikut :

(a) Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.

(b) Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan /hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami negative spread;

(c) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow/ arus kas usaha nasabah, sehingga tidak membebankan nasabah;

(d) Bank akan lebih selektif dan hati-hati (prudent) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang benar-benar terjadi itu yang akan dibagikan;

(e) Prinsip bagi hasil mudaharabah maupun musyarakah berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun rugi dan terjadi krisis ekonomi.

Risiko yang terdapat dalam al-musyarakah, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi, yaitu:

(a) *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang tersebut dalam kontrak;

(b) *Lalai* dan kesalahan yang disengaja;

(c) *Penyembunyan* keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.

Dari kedua bentuk pembiayaan tersebut diatas

(perjanjian pembiayaan Al-Musyarakah dan perjanjian pembiayaan Al-Musyarakah) dalam klausulnya ditentukan bahwa "perjanjian ini akan diatur dan tunduk pada hukum positif yang berlaku di negara RI yang tidak bertentangan dengan hukum syariah.

**C. Aspek hukum yang terkait dengan Penerapan Prinsip Bagi Hasil dalam pembiayaan Terhadap Nasabah oleh Bank Muallamat Semarang.**

Seperti telah diuraikan dimuka, bahwa bank

Muallamat Semarang dalam beroperasinya menggunakan atau berdasarkan pada konsep alat atau perjanjian perniagaan, khususnya adalah perjanjian pembiayaan yang berdasarkan pada prinsip bagi hasil yang diwujudkan dalam perjanjian pembiayaan Al-Mudharabah dan perjanjian pembiayaan Al-Musyarakah.

Apabila kita perhatikan perjanjian pembiayaan Al-

Mudharabah dan perjanjian Al-Musyarakah dengan perjanjian kredit bank terdapat perbedaan yang substansial. Sebagai suatu jenis usaha penyaluran dana perbankan yang beroperasi berdasarkan Undang-Undang perbankan, perjanjian pembiayaan Al-Mudharabah dan Al-

Musyarakah tentu saja memiliki persamaan dengan perjanjian kredit bank pada bank konvensional, oleh karena itu sebelum mengkaji atau melihat perbedaan substansial antara perjanjian pembiayaan al-mudharabah dan perjanjian pembiayaan al-musyarakah dengan perjanjian kredit bank akan dikaji terlebih dahulu persamaannya.

#### 1. Persamaan antara Perjanjian kredit dengan perjanjian pembiayaan al-mudharabah dan al-musyarakah

Perjanjian kredit bank dan perjanjian pembiayaan al-mudharabah dan al-musyarakah memiliki kesamaan dalam sifat perjanjian, yaitu bersifat konsensual ril. Bentuk perjanjiannya tertulis dan menggunakan standar kontrak. Obyeknya berupa uang, disyaratkan adanya jaminan dan memiliki unsur kepercayaan tentang waktu, risiko, prestasi dan kontra prestasi. Persamaan lainya antara perjanjian kredit bank dengan perjanjian pembiayaan al-mudharabah dan al-musyarakah dapat dilihat dari isi perjanjiannya yaitu : jumlah uang, besarnya bunga/porsi bagi hasil, cara pembayaran, waktu pelunasan dan kolateral (jaminan).



## 2. Perbedaan konstruksi hukum antara Perjanjian kredit dengan perjanjian pembiayaan al-mudharabah dan al-musyarakah

Setelah melihat persamaan-persamaan antara kredit bank dengan perjanjian pembiayaan al-mudharabah dan al-musyarakah, maka kita telah lihat perbedaan konstruksi hukum yang menimbulkan konsekuensi terhadap perbedaan kontra prestasi. Untuk melihat konstruksi hukum perjanjian kredit bank, kita harus melihat pada Undang-undang Perbankan atau pada kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Namun, keduanya tidak mengatur secara khusus mengenai hal ini. Undang-undang No. 18 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, tidak memberikan definisi tentang perjanjian kredit. Namun memberikan pengertian kredit, yaitu :

"Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan perjanjian atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga".

Sebagaimana dikemukakan oleh Molenaar<sup>72</sup> yang dikutip oleh Henri P. Pangabean bahwa eksistensi perjanjian kredit pada bank konvensional sebagai

<sup>72</sup> Henry P. Pangabean, *Penyalahgunaan keadaan sebagai alasan untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum Di Belanda)*, (Yogyakarta, 1992), hal. 9

Uraian tersebut di atas tampaknya bahwa, dalam hal mengenal konstruksi hukum perjanjian pembiayaan al-mudharabah dan al-musyarakah dimasukkan sebagai

dan cara pengembalian uang. tersebut antara lain dalam hal tujuan penggunaan uang XIII Buku III KUHPerdata. Karakteristik yang berbeda perjanjian-perjanjian khusus yang di atur dalam Bab karakteristik tertentu yang tidak sama dengan terutama karena perjanjian kredit bank memiliki secara khusus dalam KUHPerdata dan KUHdagang, dan yang bernama. Hal ini dikarenakan tidak ada pengaturannya perjanjian kredit bank ke dalam perjanjian tidak sepatutnya dengan pemberian Mahkamah Agung, dan memasukkan Pasal 1754 KUHPerdata. Menurut hemat penulis tidak perjanjian pinjam-mengganti seperti yang dimaksud dalam telah memasukkan perjanjian kredit bank ke dalam Mahkamah Agung R.I. dari keputusannya a priori

KUHPerdata.<sup>73</sup>

sebagaimana diatur dalam pasal 1754 sampai pasal 1769 terjadi adalah suatu perjanjian pinjam-meminjam pemberian kredit itu diadakan pada hakekatnya yang tergolong perjanjian bernama. Dalam bentuk apapun juga,

perjanjian yang didasarkan pada hubungan pertiagaan syrikah (syarikat persekutuan).

Konstruksi hukum perjanjian pembiayaan al-mudharabah dan al-musyarakah yang berdasarkan pada hubungan pertiagaan, syrikah ini memiliki kesamaan dengan perjanjian persekutuan perdata (maatschap) yang diatur dalam Pasal 1618 sampai dengan Pasal 1652 KUHPerdata. Di dalam Pasal 1618 KUHPerdata menyebutkan bahwa :

Perseroan atau maatschap adalah suatu persekutuan dengan nama dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memberikan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk memberikan sesuatu ke dalam persekutuan yang terjadi karenanya.

Ketentuan Pasal 1618 KUHPerdata tersebut, dapat ditarik beberapa unsur yang terdapat di dalam persekutuan perdata, yaitu :

1. Adanya suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih;
2. Masing-masing pihak harus memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan (inbreng); dan
3. Bermaksud membagi keuntungan bersama.

Angela Schneeman sebagaimana dikutip Ridwan

<sup>74</sup>Khairandy, mendefinisikan *partnership* sebagai suatu asosiasi yang terdiri dari dua orang atau lebih melakukan kepemilikan bersama suatu bisnis untuk mendapatkan keuntungan. *Partnership* dapat juga diartikan sebagai suatu perjanjian (*agreement*) diantara dua orang atau lebih untuk memasukkan uang, tenaga kerja, dan keahlian ke dalam suatu perusahaan, untuk mendapatkan keuntungan yang dibagi bersama sesuai dengan bagian atau proporsi yang telah disepakati bersama.

Tujuan perjanjian perseeroan/persekutuan adalah untuk mendapatkan keuntungan yang harus di bagi diantara anggotanya. Para pihak melakukan usaha dengan bersama-sama memberikan inbreng pada persekutuan dan para pihak berhak untuk mendapatkan bagian dari keuntungan yang telah diperoleh dan sama-sama memikul kerugian yang diderita. Unsur-unsur perjanjian perseeroan/persekutuan adalah :

a) Pemasukan atau inbreng,

---

<sup>74</sup> Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Dagang Indonesia*, Gama Media, 1999  
*Yogyakarta*, hal.14

Ketentuan di atas, tampak bahwa pembagian hasil keuntungan atau pendapatan diserahkan pada kesepakatan bersama. Akan tetapi, jika tidak diperjanjikan, maka pembagian hasil keuntungan dilaksanakan secara proporsional. Hal yang secara prinsip berbeda adalah apa yang diatur didalam Pasal 1633 ayat (2) KUHPerdata,

jika di dalam persetujuan atau perserikatan tidak telah ditentukan bagian masing-masing persero atau anggota dalam untung ruginya perseroan atau perserikatan, maka bagian masing-masing adalah seimbang dengan apa yang telah dimasukkan dalam perseroan atau perserikatan.

menentukan :

Meskipun konstruksi hukum perjanjian pembiayaan al-mudharabah dan perjanjian al-musyarakah memiliki kesamaan dengan perjanjian persekutuan atau perseroan, namun terdapat perbedaan dalam hal pembagian hasil keuntungan. Dalam persekutuan perdata, pembagian nisbah bagi hasil diatur di dalam Pasal 1633 sampai dengan Pasal 1635 KUHPerdata. Pasal 1633 ayat (1) KUHPerdata

ditbagikan kepada para anggotanya.

b) Tujuannya untuk mendapatkan keuntungan yang

benda, tenaga kerja, keahlian.

(2) KUHPerdata dapat berupa uang, barang atau

Pemasukan atau inbreng menurut Pasal 1619 ayat

Pembagian hasil keuntungan atau pendapatan pada pembiayaan al-mudharabah dan al-musyarakah ditetapkan oleh para pihak. Dalam praktek pembiayaan al-mudharabah sebagaimana telah diuraikan terdahulu, nisbah bagi hasil. Mudharib sebagai entrepreneur yang memasukkan modal berupa tenaga atau keahliannya lebih besar

empat dari Pancasila).

kemampuan dan keahlian sosial (sila ke dua dan ke ayat (2) KUHPerdata tidak memperhatikan asas-asas pembagian hasil keuntungan yang diatur dalam Pasal 1633 penting dalam proses produksi. Dengan demikian skill, kualitas sumber daya manusia merupakan unsur pemikiran padahal untuk masa sekarang profesionalisme, kemampuan, yaitu tenaga kerja, baik fisik maupun pemikiran materialisme kurang menghargai aspek Pembentukan undang-undang yang dilandasi oleh

yang dianut bangsa Indonesia.

seperti ini tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan uang atau barang yang paling sedikit. Cara pembagian diperolehnya sama dengan bagian persero yang memasukkan tenaga, skill, manajemen, bagian keuntungan yang akan memasukkan kerajinannya dalam arti yang luas adalah di mana untuk persero atau anggota yang hanya

dibandingkan dengan Bank Muamalat yang memasukkan modal

100 % berupa uang.

Konstruksi hukum yang berbeda antara perjanjian kredit dan perjanjian pembiayaan menimbulkan kontra prestasi yang berbeda. Dalam perjanjian kredit bank, nasabah sebagai mudharib (pengelola usaha) harus mengembalikan kreditnya disertai imbalan bunga (Pasal 1 angka 11 UU No.10 tahun 1998), sementara dalam perjanjian pembiayaan bagi hasil, nasabah sebagai mitra usaha selain harus mengembalikan uang sejumlah pembiayaan yang telah diberikan, juga disertai pembagian hasil keuntungan atau pendapatan dari usaha yang telah dijalankan. Kontra prestasi berupa pembagian hasil keuntungan merupakan unsur yang fundamental yang membedakan kredit bank dengan pembiayaan berdasarkan bagi hasil. Di lihat secara sepiintas, tampaknya tidak ada perbedaan antara bunga dan imbalan atau pembagian hasil keuntungan atau pendapatan, karena keduanya merupakan kontra prestasi yang harus diberikan mudharib (pengusaha) kepada bank atas fasilitas yang disediakan oleh bank (shahibul maal).

Akan tetapi berdasarkan falsafahnya, secara prinsip hal ini sangat berbeda. Dalam kontra prestasi

berupa besar prosentase telah ditetapkan pada saat perjanjian kredit ditanda tangani dan berlaku pada masa perjanjian tersebut dilaksanakan, dengan tidak melihat perkembangan situasi keuangan mudah, apakah usaha mudah mengalami perkembangan, kemunduran atau mungkin dalam keadaan kolaps, atau bahkan sampai mengalami pailit.

Dalam hal usaha mengalami kemajuan yang pesat, maka mudah sendiri yang akan menikmati, sedangkan bank (shahibul maal) tetap menerima pengembalian pokok pembayaan disertai bunga sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Dalam hal usaha mudah mengalami kemunduran atau bahkan sampai pailit, mudah sendiri yang akan menanggung kerugian tersebut, walaupun misalnya kemunduran usaha tersebut bukan semata-mata kesalahan mudah, tetapi karena adanya perubahan situasi perekonomian seperti yang sekarang ini terjadi atau karena adanya kebijakan tertentu dari pemerintah. Dalam keadaan demikian mudah harus membayar pokok pinjaman ditambah dengan bunga bahkan dalam kasus-kasus tertentu, jika mudah terlambat melaksanakan kewajibannya seringkali dibebani bunga berbunga yang semakin memberatkan.



Hal ini berbeda dengan pembiayaan yang berdasarkan prinsip bagi hasil kedua belah pihak, bank dengan mudharib sebagai mitra usaha berdasar atas keadilan dan kebersamaan, bersama-sama mendapatkan keuntungan jika usaha mudharib mengalami kemajuan dan menanggung kerugian jika mengalami kemunduran.

Perbedaan selanjutnya adalah klausul-klausul yang terdapat dalam perjanjian kredit dan klausul-klausul dalam perjanjian pembiayaan al-mudharabah dan dalam perjanjian pembiayaan al-musyarakah. Memperhatikan akta perjanjian kredit bank dan perjanjian pembiayaan baik berdasar al-mudharabah maupun al-musyarakah, maka terdapat klausul-klausul yang sama di mana klausul-klausul ini terdapat dalam semua perjanjian tersebut. Tetapi ada beberapa klausul yang terdapat pada akta perjanjian kredit, namun tidak terdapat dalam akta perjanjian pembiayaan al-mudharabah dan al-musyarakah.

D. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Bank Muallamat Semarang dalam menerapkan prinsip bagi hasil dalam pembiayaan terhadap nasabah.

1. Hambatan-hambatan penerapan prinsip bagi hasil

Memperhatikan laju ekspansi di bank-bank syariah dalam tahun-tahun terakhir ini telah menunjukkan

kelangsungan dan kelayakan sistem operasi tanpa berdasarkan bunga. Hal ini tentu mengesankan siapa saja yang percaya bahwa bank dan sistem keuangan tidak akan dapat beroperasi dalam suatu ekonomi modern tanpa bergantung pada mekanisme tingkat bunga. Pengalaman selama sebelas tahun Bank Muamalat Indonesia beroperasi melalui empat skem produk pembiayaan yaitu Mudharabah, Musyarakah, Murabahah dan Bai' u Bithaman Ajil. Bank Muamalat Semarang dibidang penyaluran dana kepada masyarakat mengintensifkan dua bidang yaitu pembiayaan Mudharabah dan pembiayaan musyarakah. Hal ini ternyata menimbulkan prespsi dari masyarakat menganggap tidak ada bedanya antara margin keuntungan dalam bank Muamalat dengan bunga pada perbankan konvensional. Akibatnya masyarakat masih meragukan kemampuan bank Muamalat sehingga mereka tetap menggunakan jasa perbankan konvensional dan enggan beralih pada bank Muamalat. Kondisi ini merupakan salah satu hambatan bagi perkembangan Bank Muamalat. Kondisi ini merupakan salah satu hambatan bagi perkembangan bank Muamalat dan

a) kurangnya perangkat hukum.

Hambatan yang lain adalah :

perbankan syariah pada umumnya.

Selama ini dasar hukum operasionalnya Bank Umum Syariah di Indonesia diatur dalam Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan dan peraturan pelaksanaannya yang berupa surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah, sehingga masih diperlukan peraturan pendukung lainnya. Ketidadaan perangkat hukum pendukung ini menyebabkan perbankan Syariah khususnya Bank Muamalat berusaha menyesuaikan produknya dengan hukum yang berbeda. Akibatnya ciri-ciri khusus yang melekat padanya tersamar dan perbankan Syariah khususnya Bank Muamalat tampil seperti perbankan konvensional. Perangkat hukum yang kurang kondusif juga mengakibatkan konsekuensi lain dari operasional perbankan Syariah khususnya bank Muamalat. Ketika terjadi likuiditas, misalnya belum tersedia fasilitas likuiditas tanpa bunga dari Bank Indonesia. Demikian pula untuk menjalankan produk-produk kerjasama antara bank bank Indonesia dengan Bank Muamalat, selalu didasarkan atas tingkat pengembalian yang tetap (fixed), adalah bertentangan dengan ciri utama operasional bank bank seperti halnya bank

Dewan syariah Nasional berfungsi mengeluarkan fatwa-fatwa yang diperlukan sebagai referensi bagi kegiatan operasional dan transaksi. Transaksi serta piranti-piranti yang dipergunakan dalam sistem perbankan dan keuangan syariah yang diperlukan untuk menjamin agar undang-undang perbankan dan peraturan

### c) Standar Fatwa

Dikotomi dalam sistem pendidikan syariah dan pendidikan umum menyebabkan adanya dualisme intelektual diantara para ulama dengan sarjana - sarjana muslim, sementara produk-produk perbankan syariah khususnya bank Muamalat harus diciptakan oleh kedua disiplin tersebut secara bersama-sama. Disamping itu masyarakat muslim Indonesia pada umumnya belum terpikir dengan praktek perbankan syariah. Oleh karena itu merangkap memandang perbankan syariah dengan menggunakan persepsi konvensional. Selain itu ada pula sebagian masyarakat menganggap bahwa perbankan syariah sebagai lembaga sosial, bukan lembaga ekonomi atau bisnis.

### b) Masalah sumber daya manusia insan

Muamalat. Kasus yang sama juga terjadi dalam standar akuntansi yang digunakan.

1. Pemerintah segera menindaklanjuti Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dengan membuat peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya yang berkaitan dengan kelembagaan dan operasional bank syariah. Untuk ini, bank Indonesia dengan kewenangan yang diberikan oleh

berikut:

Dalam rangka untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut diatas, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai

## 2. Usaha Mengatasi Hambatan Penerapan Prinsip Bagi Hasil dalam Pembiayaan terhadap Nasabah

menyulitkan pelaksanaan di lapangan.

demikian ini yang dapat mempengaruhi umat dan kemungkinan berbeda dengan yang lain. Kondisi yang mengeluarkan fatwanya sendiri yang memiliki Dewan Pengawas Syariah di setiap institusi dapat produk perbankan syariah. Hal ini disebabkan setiap praktek ternyata keseragaman fatwa tentang beberapa lembaga keuangan syariah. Namun demikian dalam melakukan audit kesyarifatan terhadap perbankan dan dengan prinsip-prinsip syariah. Lembaga ini juga pelaksanaannya benar-benar dilaksanakan sesuai

Undang-undang No.23 tahun 1999 sangat diharapkan dapat mewujudkan peraturan-peraturan pelaksanaan yang akan mendukung tumbuh dan berkembangnya bank syariah di Indonesia.

2. Perlu dilakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan pada tingkat SLTA dan Perguruan Tinggi, guna memberikan bagi mata pelajaran atau kuliah ekonomi Islam khususnya bank Syariah.

3. Perlu adanya penegasan mengenai keseragaman fatwa tentang produk-produk perbankan syariah dari setiap institusi yang berkaitan dengan fatwa sehingga tidak ada lagi kemungkinan fatwa yang membahayakan umat.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Penerapan prinsip bagi hasil pada Bank Muamalat berdasarkan sistem syariat di mana sistem pembiayaan yang terdiri dari mudharabah dan musyarakah yang dilakukan oleh Bank Muamalat di dasarnya pada kepercayaan terhadap nasabah dan apabila terjadi kerugian maupun mendapat keuntungan dalam pembiayaan terhadap nasabah, maka risiko akan ditanggung bersama antara pihak bank Muamalat dengan nasabah. Konsep bank Muamalat berpegang pada prinsip-prinsip ekonomi Islam, sehingga investor maupun pemegang Muamalat serta atas dasar mitra usaha. Berperan sebagai hubungan debitur dan kreditur, sehingga bank dan mitra usahanya sama-sama memperoleh pembagian hasil atau keuntungan dan bersama-sama pula memikul risiko kerugian.
2. Penerapan pembiayaan prinsip bagi hasil berdasarkan mudharabah maupun musyarakah pada Bank Muamalat menimbulkan aspek hukum yang antara lain dalam

3. Hambatan yang dihadapi bank Muamalat dalam menerapkan prinsip bagi hasil adalah belum adanya perangkat hukum yang mengatur secara terperinci dalam suatu peraturan perundang-undangan, sehingga nasabah yang mendapatkan

usaha (mudharib).

terdapat klausul-klausul yang merugikan mitra klausul mencerminkan nilai-nilai keadilan, tidak adalah akad atau perjanjian pembiayaan klausul-prestasi. Selain itu hal yang cukup signifikan dari segi konstruksi hukumnya dan kontra dan perbedaan. Perbedaan yang substansial adalah konvensional, pembiayaan ini memiliki kesamaan dibandingkan dengan perjanjian kredit pada bank pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Jika Indonesia (cabang Semarang) dalam bentuk hasil ini telah dilaksanakan oleh bank Muamalat implementasi, konsep bank syariah. Sistem bagi dengan sistem bagi hasil merupakan salah satu oleh bank Muamalat terhadap nasabah. Pembiayaan untuk mengembalikan pembiayaan yang diberikan yang dimiliki oleh nasabah dijadikan jaminan hal terjadi kerugian dari nasabah, maka asset



pembayaan dari Bank Muamalat, apabila terjadi kemacetan dalam pengembalian dana masih mendasarkan pada peraturan bank konvensional dan perjanjian yang telah disepakati antara pihak bank dengan pihak nasabah.

#### B. Saran

1. Perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat atas keberadaan bank Muamalat dengan sistem syariat yang menerapkan perjanjian pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil dan juga harus didukung dengan sumber daya manusia (SDM) yang profesional.

2. Perlu adanya perangkat hukum yang mendukung keberadaan bank syariat khususnya ketentuan yang berkaitan dengan pembiayaan terhadap nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil, sehingga di dalam penerapannya tidak berdasarkan pada ketentuan bank konvensional.

3. Perlu diperhatikan pengembangan SDM yang memahami bank syariat secara keseluruhan, dengan melakukan pelatihan secara berkelanjutan, sehingga dapat mengembangkan produk-produk dari bank Muamalat yang mudah dipahami masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Apeldoorn, L.J.van, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- AS, Homby, 1989, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, Oyez Publishing, London Ltd.
- Ashshofa, Burhan, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Antonio, Muhammad Safi, 2001, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta.
- ....., 1420 H/1999 M, *Kerjasama Bank Indonesia dan Tazkia Institut*, Jakarta.
- Al Anshari, Mahmud, 1993, *Perbankan Islam, terjemahan Minaret*, Jakarta.
- Arifin, Zainul, 1999, *Memahami Bank Syariah Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, Al Vabet, Jakarta.
- Asikin, Zainal, 1995, *Pokok-pokok Hukum Perbankan di Indonesia*, Radja Grafindo, Jakarta.
- Abu Saud, Mahmud, 1996, *Garis-garis Besar Ekonomi Islam*, Gema Insani Press, Jakarta
- Afzalurrahman, Muhammad, 1995, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang* (Muhammad As A Trader), Yayasan Swarna Bhunay, Jakarta.
- Almath, Muhammad Faiz, 1998, 1100 *Hadist Terpilih*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Agus, Bustanuddin, 1999, *Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial, Studi Perbandingan Antara Pandangan Ilmiah Dengan Ajaran Islam*, Gema Insani Press, Jakarta.

- Alma, Buchari, 1994, *Ajaran Islam Dalam Bisnis*, Alfabeta, Bandung.
- An-Nahdani Tagyuddin, 1996 M/An Nidlam, Al Iqtishadi Fil Islam diterjemahkan oleh Magfur Wachid, Mohammad, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, Ristlah Gusti, Surabaya.
- A. Rifa'i, Mien, 1997, *Pegangan Gaya Penulisan, Penyuntingan dan Penerbitan Karya Ilmiah*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Ashshiddiqi, T.M. Hasbi, Al Qu'an dan Terjemahannya, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- Azhar Basyir, Ahmad, 2000, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, UII Press, Yogyakarta.
- Balai Pustaka, 1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Edisi Kedua, cetakan ke sembilan, Jakarta.
- Black, Donald, 1973, *The Behavior of Law*, Academic Press, Inc, New York.
- Black, Henry Campbell, 1991, *Black's Law Dictionary*, (Sixth Edition), West Publishing Co, St. Paul Minnesota, USA.
- Burgh, Gr. Vander, editor Wila Chandrawila S, 1999, *Buku Tentang Perikatan Dalam Teori dan Yurisprudensi*, Mandar Maju, Bandung.
- Daud Ali, Muhammad, 1998, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Indonesia*, Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- Djumhana, Muhammad, 2001, *Hukum Perbankan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- ....., 1996, *Hukum Perbankan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Darus Badruzaman, Marlam, 1998, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III tentang Hukum Perikatan dengan*

....., 1989, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumnus, Bandung.

Dunne, JM. van der Burght, terjemah Lely Niwa, 1987, *Hukum Perjanjian*, Dewan Kerjasama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia.  
ELIPS, 1998, *Hukum Kontrak Di Indonesia*, Program Kerjasama Proyek ELIPS dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Faisal, Sanapiah, 1990, *Penelitian Kualitatif*, Dasar-Dasar dan Aplikasi, Yayasan Asah, Asih, Asuh, Malang..

....., 1995, *Format-Format Penelitian Sosial*, Dasar-Dasar dan Aplikasi, Rajawali Press.  
Fuady, Munir, 1999, *Hukum Perbankan Modern Berdasarkan Undang-undang No.10 Tahun 1998*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

....., 1996, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung.  
....., 1994, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, Buku kesatu, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Hallaq B. wael, 2000, *Sejarah Teori Hukum Islam*, Pengantar Untuk Usul Fiqh Mazhab Sunni, Radja Grafindo Persada, Jakarta.

Hartono, Sunaryati, 1994, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad Ke-21*, Alumnus, Bandung.

....., 1992, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumnus, Bandung.

Hartono, Sri Redjeki, 2000, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Mandar Madju, Bandung.

....., 1980, *Bentuk-bentuk Kerjasama Dalam Dunia Niaga*, FH-UNTAG, Semarang

Kerat, Gorys, 1997, *Komposisi Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa*, Nusa Indah, Flores.

- ....., 1982, Eksposisi dan Diskripsi, Nusa Indah, Flores.
- Khairandy, Ridwan, 1999, Pengantar Hukum Dagang Indonesia I, Gama Media, Yogyakarta.
- Kusumaadmaja, Mochtar, 1977, Pengantar Hukum Internasional, Binacipta, Bandung.
- Lubis, Ibrahim, 1995, Ekonomi Islam Satu Pengantar, Kalam Mulia, Jakarta.
- Manan, Abdul, 1997, Islamic, Economic, Theory dan Practices, diterjemahkan dalam edisi Bahasa Indonesia oleh Nastangin,dkk,Teori dan Praktek Ekonomi Islam,PT.Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1991, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad, 2001, Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah, UII, Press, Yogyakarta.
- ....., 2000, Sistem dan Prosedr Operasional Bank Islam, UII, Press, Yogyakarta.
- ....., 2000, Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer, UII, Press, Yogyakarta.
- Muslehuddin, Muhammad, 1990, Sistem Perbankan Islam, judul asli: Banking and Islamic Law, Penejemah Aswin Simamora, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muthahart, Murtadha, 1996, Islam dan Tantangan Jaman, Pustaka Hidayah, Bandung.
- ....., 1995, Pandangan Islam Tentang Asuransi Dan Riba, Pustaka Hidayah, Bandung.
- Mutwally, MM, 1995, Teori dan Model Ekonomi Islam, Penterjemah, Sawit, M Hussein, PT. Bangkit Daya Insani, Jakarta.

- Moleong, Lexy J., 1996, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nasution, S., 1998, *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung.
- Nasution, Khairuddin, 1996, *Riba dan Poligami, Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Pustaka Pelajar bekerjasama dengan Akademika, Yogyakarta.
- Nazir, Muhammad, 1985, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Patricia, Nezar dan Andi Arief, 1999, *Antonio Gramsci Negara dan Hukum*, Pustaka Pelajat, Jakarta.
- Perwataatmadjua, Karnaen dan Muhammad Sati'i Antonio, 1994, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, PT. Dana Bakti Prima Yasa, Yogyakarta.
- Poerwataatmadja, Karnaen, dan Muhammad Sati'i Antonio, 1994, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, PT. Dana Bakti Prima Yasa, Yogyakarta.
- Patrik, Purwahid, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-undang)*, Mandar Maju, Bandung.
- ....., 1988, *Hukum Perdata II (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan dari Undang-Undang)*, FH UNDIK, Semarang.
- ....., 1986, *Asas Iktikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian*, Badan Penerbit Undip, Semarang.
- Peter, A.Ag, Koestiani Siswosoebroto, 1988, *Hukum dan Perkembangan Sosial*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Prakoso, Djoko, 1987, *Dasar Hukum Persetujuan Tertentu Di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
- Putra, Edy Tje'Aman, 1985, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty, Yogyakarta.

Qardawi, Yusuf, 1417 H/1997 M, Membumikan Syariat Islam, Penerjemah Muhammad Zakki dan Yasin Tajid, Dunia Ilmu, Surabaya.

....., Fawaid Al Bunuk: Hiya Ar-Riba Al-Haram, diterjemahkan oleh Daud Rasyid, Bank Tanpa Bunga, Sebuah Analisis Hukum (Fiqh) tentang "BUNGA BANK" Berdasarkan Al Qur'an, Sunnah, dan Fakta, Disertai dengan Bantahan Ilmiah terhadap Fatwa' Mufti Mesir mengenai: Sertifikat Obligasi, Usamah Press, Jakarta.

Qardawi, Yusuf, Fawa'id Al Bunuk: Hiya Ar-Riba Al-Haram, diterjemahkan oleh Daud Rasyid, Bank Tanpa Bunga, Sebuah Analisis Hukum (Fiqh) tentang "Bunga Bank" berdasarkan Al Qur'an, Sunnah.

Qurdhow, Yusuf, 2001, Bank Tanpa Bunga, penerjemah Daud Rasyid, Usamah Press, UNAS, Jakarta.

Rasyid, Lili, IB WYasa, 1993, Hukum sebagai Suatu Sistem, Bandung.

Rahardjo, Satjipto, 1996, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.

....., 1983, Aneka Persoalan Hukum Dalam Masyarakat, Angkasa, Bandung.

....., 1983, Hukum dan Perubahan Sosial, Alumni, Bandung.

Rusli, Hardjan, 1993, Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Sembiring, Sentosa, 2000, Hukum Perbankan, Mandar Maju, Bandung.

Slamat, Dahlan, 1995, Manajemen Bank Bagi Hasil, Intermedia, Jakarta.

Siddiqi, M. Nejatullah, penerjemah, Fakhruliyah Mumtihan, 1997, Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam, Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta.

Sjahdeini, Sutan Remy, 1999, *Perbankan Islam dan Keduakannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

....., 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta.

Soemlito, Ronny Hanitjo, 1989, *Perspektif Sosial Dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum*, Agung, Semarang

....., 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia, Jakarta.

....., 1984, *Masalah-Masalah Sosiologi Hukum*, Sinar Baru, Bandung.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mardjito, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta.

....., 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press.

Sudewo, Erl, 1999, *Ekonomi Bebas Bunga, Pedoman Akuntansi Syariah, Panduan Praktis Operasional* Baitul Ma'wat Tamwil, Bandung.

Sumitro, Warkum, 1996, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait (BMUI dan Takaful) di Indonesia*, Radja Grafindo Persada, Jakarta.

Suroso, R. 1993, *Perbandingan Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.

Subekti, 1989, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.

....., 1987, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.

....., 1985, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung.

Widjanarto, 1997, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Grafiti, Jakarta.



Zuhdi, Mastuh, Masald Fiqiyah, 1987, Kapita Selekta Hukum Islam, Haji Mas Agung, Jakarta.

#### B. MAKALAH/ JURNAL PENELITIAN/MAJALAH/TESIS/DISERTASI

Artin, Zainul, 2000, Strategi Mempersiapkan Sumber Daya Insani Mengantisipasi Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah, Makalah Seminar Nasional Ekonomi Islam dan Kongres Kelompok Studi Ekonomi Islam, FE UNDIP, Semarang, 11-13 Mei.

A. Perwataatmadja, Karnaan, Konsep, Operasionalisasi, dan Prospek Pegadaihan Syariah di Indonesia, Majalah Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Vol. 2, No. 3 Desember 1999.

Baraba, Achmad, 1999, Prinsip Dasar Operasional Perbankan Syariah, Majalah Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Vol. 2, No. 3 Desember 1999.

Budi Utomo, Setiawan, 2001, Jawaban Tuntas Masalah Bunga, Kolom Fiqh Kontemporer, Majalah Saksi Bunga, No. 10 Tahun III.

Miftah, Farid, 2000, Konsep dan Etika Bisnis Perbankan Syariah, Bank Indonesia, Makalah Seminar Nasional Perbankan Syariah, Bank Indonesia, Bandung, 13 Oktober.

Gunawan, Dhani, Perbankan Syariah Indonesia Menuju Milenium Baru: Suatu Tinjauan Pengembangan, Pengawasan dan Prospek, Majalah Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Vol. 2, No. 3 Desember 1999.

Hasan, Djuaendah, 2000, Kedudukan dan Fungsi Bank Syariah Sebagai Lembaga Pembiayaan Madani, Makalah Seminar Nasional Perbankan Syariah, Bank Indonesia, Bandung, 13 Oktober.

Joyosumantoro, Soebardjo, 2000, Majalah Saksi No. 20 Tahun II Tanggal 31-13 Juni.

K. Halim, Cecep, 2000, *Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia*, Makalah Seminar Nasional, Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Negeri Mataram.

Karim, Adiwarman, 2000, *Peluang dan Kendala Pasar Keuangan Perbankan Syariah*, Bank Indonesia, Bandung, 13 Oktober.

Kelib, Abdullah, 1998, *Hukum Zakat Profesi dan Pelaksanaananya Pada Kalangan Profesional Muslim di Kotamadia Semarang*, Penelitian, Masalah-Masalah Hukum, Majalah FH-UNDIP, Edisi III, Oktober.

....., 1997, *Falsafah Zakat Dalam Hukum Islam*, Masalah-Masalah Hukum, Majalah FH-UNDIP, No. 1, 1997.

....., 1997, *Pemerataan Ekonomi Perspektif Hukum Islam*, Masalah-Masalah Hukum, Majalah FH-UNDIP, No. 3, 1997.

....., 1997, *Zakat dan Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam*, Masalah-Masalah Hukum, Majalah FH-UNDIP, No. 4, 1997.

....., 1997, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, Masalah-Masalah Hukum, Majalah FH-UNDIP, No. 6-1997.

Maskanul Hakim, Cecep, *Problem Pengembangan Produk dalam Bank Syariah*, Majalah Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Vol. 2, No. 3 Desember 1999.

Muhamidin, 2001, *Eksistensi Bank Syariah dan Pengembangannya Di Indonesia*, Tesis, UNDIP.

Salam, Adi Bastian, 2000, *Kedudukan Perbankan Islam Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jurnal Penelitian Hukum, Edisi X Januari, Bangkok.

Setiawan, 1995, *Kontrak Standar Dalam Teori dan Praktek*, Varia Peradilan No. 103.

Sanusi, M. Arsyad, 1995, *Ikhtikad Baik, Kepatutan, Dan Keadilan Dalam Hukum Perdata, Varia Peradilan*, No. 103.

Setiadi, A., 2000, *Bank Islam Dalam Perspektif Hukum Indonesia*, Newsletter No. 40/III/Maret, Jakarta.

Sjahdeini, Sutan Remy, 1999, *Rahasia Bank Berbagi Masalah dan Sekitarnya*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 8, Jakarta.

Sri Imaniyati, Neni, 2000, *Kesiapan Hukum Ekonomi Indonesia Dalam Mengantisipasi Perbankan Syariah*, Makalah Seminar Nasional, UNISBA, Bandung.

Sri Imaniyati, Neni, 1997, *Sistem dan Prospek Perjanjian Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil Pada Bank Muamalat Indonesia*, Tests, UNDIP.

Soemlitro, Ronny Hanitjo, 1994, *Hukum Sebagai Mekanisme Pengintegrasian, Lembaran Hukum dan Masyarakat*, Majalah Masalah-masalah Hukum, Nomor 6, UNDIP, Semarang.

Suyono, 2000, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Makalah Seminar Nasional Perbankan Syariah, Bank Indonesia, Bandung, 13 Oktober.

Siregar, Mulya E., 2000, *Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia*, Makalah Seminar Nasional Perbankan Syariah, Bank Indonesia, Bandung, 13 Oktober.

Tazkia, Institute, 1999, *Riba dan Permasalahannya*, Makalah.

### C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992

Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

1997-1998-1999

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Hasil

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Bagi

Undang-undang No. 25 tahun 2000, tentang Program  
Pembangunan Nasional 2000-2004 (PROPENAS).